



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

2025



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 dengan baik.

Penyusunan LKjIP dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kepada para pemangku kepentingan atas amanah yang diberikan dalam pengelolaan seluruh sumberdaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025. Tujuan penyusunan LKjIP untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang direncanakan dan kinerja yang dicapai. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tahun 2025, akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Secara umum kami sampaikan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul telah banyak memberikan hasil yang bisa dinikmati masyarakat, namun kami menyadari masih terdapat beberapa kekurangan yang masih harus diperbaiki, semoga di tahun yang akan datang capaian kinerja ini dapat semakin ditingkatkan dan sesuai target yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, namun setidaknya kami berharap masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran mengenai hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Besar harapan kami bahwa laporan ini dapat memberikan

manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan serta partisipasi dalam rangka penyusunan LKjIP ini dan juga dukungan atas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2025.

Wonosari, 31 Maret 2026



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 merupakan wujud pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP semata-mata dibuat untuk mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi pada lembaga. LKjIP adalah salah satu komponen untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Di samping itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 juga bertujuan sebagai:

1. Wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat; dan
2. Informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 agar digunakan untuk memberikan saran/masukan dalam memicu perbaikan kinerja.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 memiliki, 3 (tiga) tujuan, 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran yang harus dicapai.

Rata-rata capaian realisasi kinerja dari hasil pengukuran terhadap 15 target (IKU) tersebut adalah 100,81% dengan rincian sebagai berikut:

1. Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 8 target;
2. Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 2 target;
3. Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 5 target;

Adapun hasil capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Atas Pencapaian Kinerja 2025

No	Tujuan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
I	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	87,23	87,29*	100,07
1.	Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat	Opini BPK	WTP	WTP	100,00
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,50 (A)	78,78 (BB)	94,07
2.	Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban	100,00	100,00	100,00
		Indeks Ketahanan Daerah	0,80	0,81	101,25
II	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	IPM Tahun 2026	75	73,13	97,51
3.	Derajat kualitas SDM meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,54	73,13	100,81
4.	Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun	Angka Pengangguran	2,05	2,15	95,12
		Persentase Angka Kemiskinan	15	14,15	105,67
III	Terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi	PDRB Perkapita	35,50	38,33	107,97
5.	Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan ekonomi	5,16	5,47	106
		Indeks gini	0,322	0,333	96,58
6.	Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Daerah	75	74,25	99,01
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,38	77,66	107,29
7.	Nilai Investasi Meningkat	Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (dalam juta)	4.387.740	4.421.970	100,78
Rata-rata capaian					100,81

Keterangan

* : Hasil sementara

Kerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Kami senantiasa menerima masukan konstruktif demi meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di masa mendatang.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Manfaat	1
C. Gambaran Umum Daerah	2
D. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi.....	5
E. Isu Strategis.....	13
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	16
A. Perencanaan Strategis	16
B. Perjanjian Kinerja	19
C. Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja	22
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Pengukuran Kinerja	26

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran.....	29
1. Tujuan 1 Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	29
a. Sasaran 1 Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan	35
b. Sasaran 2 Ketenteraman, Ketertiban, Keamanan Masyarakat Meningkatkan	44
2. Tujuan 2 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	61
a. Sasaran 3 Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan.....	64
b. Sasaran 4 Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun.....	96
3. Tujuan 3 Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi	118
a. Sasaran 5 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Per-ekonomian Masyarakat Meningkatkan	122
b. Sasaran 6 Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan	148
c. Sasaran 7 Nilai Investasi Meningkatkan	184
C. Akuntabilitas Keuangan.....	202
1. Realisasi Anggaran	202
2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	202
BAB IV : PENUTUP	205

Lampiran-Lampiran:

1. Reviu LPPD oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul
2. Perjanjian Kinerja

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Matriks Perencanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2021-2026	18
Tabel 2.2 Perbandingan Perjanjian Kinerja Sebelum dan Sesudah Perubahan	21
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	27
Tabel 3.2 Hasil Pengukuran atas Pencapaian Kinerja 2025.....	28
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi.....	31
Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Sasaran Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan.....	35
Tabel 3.5 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintahan 2023-2025 dan Capaian 2025 terhadap Target Tahun Akhir RPJMD 2021-2026.....	37
Tabel 3.6 Nilai AKIP 2023-2025 dan Capaian 2025 terhadap Target Tahun Akhir RPJMD 2021-2026.....	40
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan.....	43
Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Sasaran Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat Meningkatkan	44
Tabel 3.9 Capaian Indeks Ketenteraman dan Ketertiban.....	46
Tabel 3.10 Data Penyelesaian Pelanggaran K3 dan Penyelesaian Pelanggaran.....	47
Tabel 3.11 Indeks Ketenteraman dan Ketertiban 2023-2025 dan Capaian 2025 terhadap Target Tahun Akhir RPJMD 2021-2026.....	50
Tabel 3.12 Analisis Faktor Penghambat, Arah Perbaikan dan Dampak yang Diharapkan.....	51
Tabel 3.13 Parameter Penghitungan Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2025	53
Tabel 3.14 Hasil Penilaian IKD Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2024 dan 2025.....	53
Tabel 3.15 Cakupan Layanan Sosialisasi, Penyebarluasan Informasi, dan Penyediaan Sarana Mitigasi Kebencanaan.....	54
Tabel 3.16 Data Bencana di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.....	57
Tabel 3.17 Analisis Permasalahan, Arah Kebijakan, dan Dampak terhadap ketahanan Daerah.....	59
Tabel 3.18 Realisasi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat Meningkatkan.....	60

Tabel 3.19	Capaian IPM 2025 terhadap Target Tahun Akhir RPJMD 2021-2026.....	62
Tabel 3.20	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3.....	64
Tabel 3.21	Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota, Provinsi DIY, dan Nasional Tahun 2021–2025.....	67
Tabel 3.22	Analisis Faktor Penghambat, Upaya dan Arah Perbaikan, dan Dampak Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan.....	76
Tabel 3.23	Analisis Faktor Penghambat, Upaya dan Arah Perbaikan, dan Dampak Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan.....	85
Tabel 3.24	Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Derajat Kualitas SDM Meningkatkan.....	95
Tabel 3.25	Pengukuran Capaian Sasaran Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun.....	96
Tabel 3.26	Realisasi Angka Pengangguran Gunungkidul Tahun 2023-2025, dan Perbandingan Capaian 2025 terhadap Target di Tahun Akhir RPJMD 2021-2026.....	98
Tabel 3.27	Analisis Faktor Penghambat, Faktor Pendukung, Upaya Perbaikan, dan Dampak terhadap Capaian Kinerja Menurunnya Angka Pengangguran.....	105
Tabel 3.28	Realisasi Persentase Angka Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023–2025 dan Perbandingan Capaian Tahun 2025 terhadap Target Akhir RPJMD 2021–2026.....	107
Tabel 3.29	Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota/Provin Tahun 2024-2025.....	110
Tabel 3.30	Perbandingan Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021–2025.....	112
Tabel 3.31	Analisis Faktor Penghambat, Faktor Pendukung, Upaya Perbaikan, dan Dampak terhadap Capaian Kinerja Menurunnya Angka Pengangguran.....	114
Tabel 3.32	Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun.....	117
Tabel 3.33	Pengukuran Capaian Sasaran Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan.....	122
Tabel 3.34	Realisasi Pertumbuhan Ekonomi 2025 dan Capaiannya terhadap Target Akhir Tahun 2026 RPJMD 2021-2026.....	123
Tabel 3.35	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota/Provinsi dan Nasional Tahun 2022-2025 (persen).....	124
Tabel 3.36	Indeks Gini 2025 dan Capaiannya terhadap Target Akhir Tahun 2026 RPJMD 2021-2026.....	128
Tabel 3.37	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota, Provinsi DIY dan Nasional Tahun 2021–2025.....	129
Tabel 3.38	Rata-rata Pertumbuhan Luas Tanam (Ha) dan Produksi Tanaman Pangan (Ton) Tahun 2023-2025.....	131

Tabel 3.39	Analisis Faktor Penghambat, Faktor Pendukung, Upaya Perbaikan, dan Dampak terhadap Capaian Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Masyarakat Meningkat...	144
Tabel 3.40	Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Perekonomian Masyarakat Meningkat.....	147
Tabel 3.41	Pengukuran Capaian Sasaran Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan.....	148
Tabel 3.42	Indeks Infrastruktur Kabupaten Gunungkidul 2022-2025 dan Capaian 2025 terhadap Target Tahun Akhir RPJMD 2021-2026..	150
Tabel 3.43	Komponen Penghitung Indeks Infrastruktur Daerah Tahun 2025.	150
Tabel 3.44	Kebutuhan dan Pemenuhan Fasilitas dan Perlengkapan Jalan...	165
Tabel 3.45	Analisis Faktor Penghambat, Arah Perbaikan dan Hasil yang Diharapkan.....	167
Tabel 3.46	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul 2022-2025 dan Capaian 2025 terhadap Target Tahun Akhir RPJMD 2021-2026.....	172
Tabel 3.47	Analisis Faktor Capaian dan Upaya Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).....	181
Tabel 3.48	Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan.....	183
Tabel 3.49	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7.....	185
Tabel 3.50	Realisasi Anggaran Sasaran Nilai Invesasi Meningkatkan.....	197
Tabel 3.51	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya per Sasaran/Indikator Kinerja.....	203

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Luas Wilayah Administrasi, Komposisi dan Kepadatan Penduduk kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	3
Gambar 1.2 Data Distribusi Persentase dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2025.....	5
Gambar 1.3 Sumber Daya Aparatur Tahun 2025	12
Gambar 2.1 Tampilan SIPD	23
Gambar 2.2 Tampilan SIPANDA.....	23
Gambar 2.3 Aplikasi LPSE Kabupaten Gunungkidul	24
Gambar 2.4 Aplikasi e-Planning Gunungkidul	24
Gambar 2.5 Tampilan SIM Aset	25
Gambar 3.1 Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2025.....	30
Gambar 3.2 Inovasi Pelayanan Publik (Pelayanan Keliling/Jemput Bola Pengurusan Dokumen Kependudukan kepada Kelompok Rentan).....	33
Gambar 3.3 Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2015-2025.....	40
Gambar 3.4 Data Konflik Tertangani Tahun 2018-2025 (dalam Persen).....	48
Gambar 3.5 Piagam Penghargaan Indeks Harmoni Indonesia (IHaI).....	49
Gambar 3.6 Pembentukan Kaltana Tahun 2025.....	56
Gambar 3.7 Layanan Petugas Pemadam Kebakaran.....	58
Gambar 3.8 Capaian IPM Tahun 2015-2025.....	65
Gambar 3.9 Perbandingan IPM Gunungkidul dengan IPM Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY.....	66
Gambar 3.10 Capaian Empat Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.....	68
Gambar 3.11 Umur Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2025	69
Gambar 3.12 Perbandingan UHH Gunungkidul dengan UHH Nasional, Provinsi DIY dan Kabupaten/Kota di DIY.....	70
Gambar 3.13 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2025.....	71
Gambar 3.14 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2025.....	72
Gambar 3.15 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.....	73
Gambar 3.16 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2025.....	80
Gambar 3.17 Perbandingan HLS Gunungkidul dengan HLS Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY.....	80
Gambar 3.18 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2025.....	82
Gambar 3.19 Perbandingan RLS Gunungkidul dengan RLS Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY.....	82

Gambar 3.20	Sistem Transportasi Bus Sekolah Ramah Anak.....	84
Gambar 3.21	Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2025 (Ribu/Rupiah).....	93
Gambar 3.22	Perbandingan Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan Penduduk Gunungkidul dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY.....	94
Gambar 3.23	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2025.....	98
Gambar 3.24	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta.....	100
Gambar 3.25	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunungkidul dengan Daerah Sekitar tahun 2025.....	101
Gambar 3.26	Kegiatan untuk Penyerapan Tenaga Kerja.....	104
Gambar 3.27	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang) dan Penduduk Miskin (Persen) Kabupaten Gunungkidul tahun 2015-2025.....	108
Gambar 3.28	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015–2025.....	109
Gambar 3.29	PDRB per Kapita tahun 2020-2025.....	119
Gambar 3.30	Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura.....	132
Gambar 3.31	Penyerahan Alat Pertanian dan Pembangunan Sumur.....	133
Gambar 3.32	Pelayanan Kesehatan Hewan.....	134
Gambar 3.33	Kegiatan Peningkatan Sektor Pariwisata.....	137
Gambar 3.34	Kegiatan Operasi Pasar dan Pameran Produk IKM.....	141
Gambar 3.35	Kegiatan Even Budaya.....	143
Gambar 3.36	Dokumentasi Hasil Pekerjaan Infrastruktur Pekerjaan Umum...	152
Gambar 3.37	Dokumentasi Hasil Pekerjaan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman.....	154
Gambar 3.38	Capaian Indeks SPBE Tahun 2025.....	160
Gambar 3.39	Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Komunikasi dan Informatika	161
Gambar 3.40	Penyediaan Fasilitas Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Anak Sekolah SIBONA.....	165
Gambar 3.41	Capaian IKLH Tahun 2018-2025.....	173
Gambar 3.42	Capaian IKA, IKU dan IKL Tahun 2020-2025.....	174
Gambar 3.43	Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Sampah.....	180
Gambar 3.44	Capaian Pembentukan Modal Tetap Bruto Tahun 2019-2025...	186
Gambar 3.45	Realisasi Nilai Investasi dari Tahun 2017-2025.....	187
Gambar 3.46	Pelayanan Perizinan Mobile dan MPP.....	189
Gambar 3.47	Temu Bisnis Tahun 2025.....	190
Gambar 3.48	Kajian Peta Potensi Investasi Kabupaten Gunungkidul.....	191
Gambar 3.49	Buku Profil Investasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.....	192

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Instansi Pemerintah perlu menyusun laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibiayai dengan anggaran publik. Laporan kinerja menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan tujuan dan sasaran disertai target kinerja yang telah ditetapkan.

Selain sebagai bentuk akuntabilitas, laporan kinerja merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tujuan dan Manfaat

LkjIP Tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk:

1. Memberikan gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian target sasaran kurun waktu Tahun Anggaran 2025 secara jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Adapun manfaat dari penyusunan LKjIP adalah:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.
3. Sebagai bahan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.

C. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis Daerah





Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di bagian tenggara Kota Yogyakarta, dengan Ibukota di Wonosari yang terletak diantara koordinat 110^o21'-100^o50' Bujur Timur dan 7^o46'-8^o09' Lintang Selatan. Kabupaten Gunungkidul memiliki luas 1.485,36km² atau sekitar 46,63% dari luas wilayah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administratif Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 18 Kapanewon, 144 Kalurahan, dan 1.431 Padukuhan.

2. Kondisi Demografi

Sesuai data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul tercatat sejumlah 780.806 jiwa, terdiri dari 386.337 laki-laki dan 394 469 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 273 386 KK.

Sesuai persebaran wilayah administrasinya di Kabupaten Gunungkidul, data penduduk tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



				Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
WONOSARI	45.453	46.449	91.902	1217,08
NGLIPAR	16.958	17.113	34.071	461,23
PLAYEN	31.262	32.248	63.510	603,36
PATUK	17.565	18.043	35.608	494,28
PALIYAN	16.461	16.931	33.392	575,03
PANGGANG	14.729	15.312	30.041	301,01
TEPUS	17.718	18.465	36.183	344,90
SEMANU	30.261	3.072	33.333	307,53
KARANGMOJO	28.371	29.075	57.446	717,00
PONJONG	28.026	2.852	30.878	295,51
RONGKOP	14.694	14.778	29.472	353,13
SEMIN	29.253	29.347	58.600	742,52
NGAWEN	17.821	17.959	35.780	767,98
GEDANGSARI	20.219	20.348	40.567	595,35
SAPTOSARI	20.058	20.397	40.455	460,66
GIRISUBO	12.532	12.948	25.480	269,43
TANJUNGSARI	14.458	1.491	15.949	222,66
PURWOSARI	10.498	10.906	21.404	298,27
TOTAL	386.337	394.469	780.806	525,67

Gambar 1.1 Luas Wilayah Administrasi, Komposisi dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa tingkat kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Gunungkidul mencapai 525,67 jiwa/km² dengan persebaran penduduk relatif kurang merata dan terpusat pada wilayah-wilayah yang dekat dengan perkotaan. Kapanewon Wonosari merupakan wilayah terpadat yaitu dengan luas wilayah 75,51 km² mempunyai jumlah penduduk terbanyak mencapai 91.902 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.217,08 jiwa/km². Kapanewon dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kapanewon Purwosari dengan luas wilayah 94,57 km² mempunyai jumlah penduduk 21.404 jiwa, sehingga kepadatan penduduk sebesar 298,27 jiwa/km².

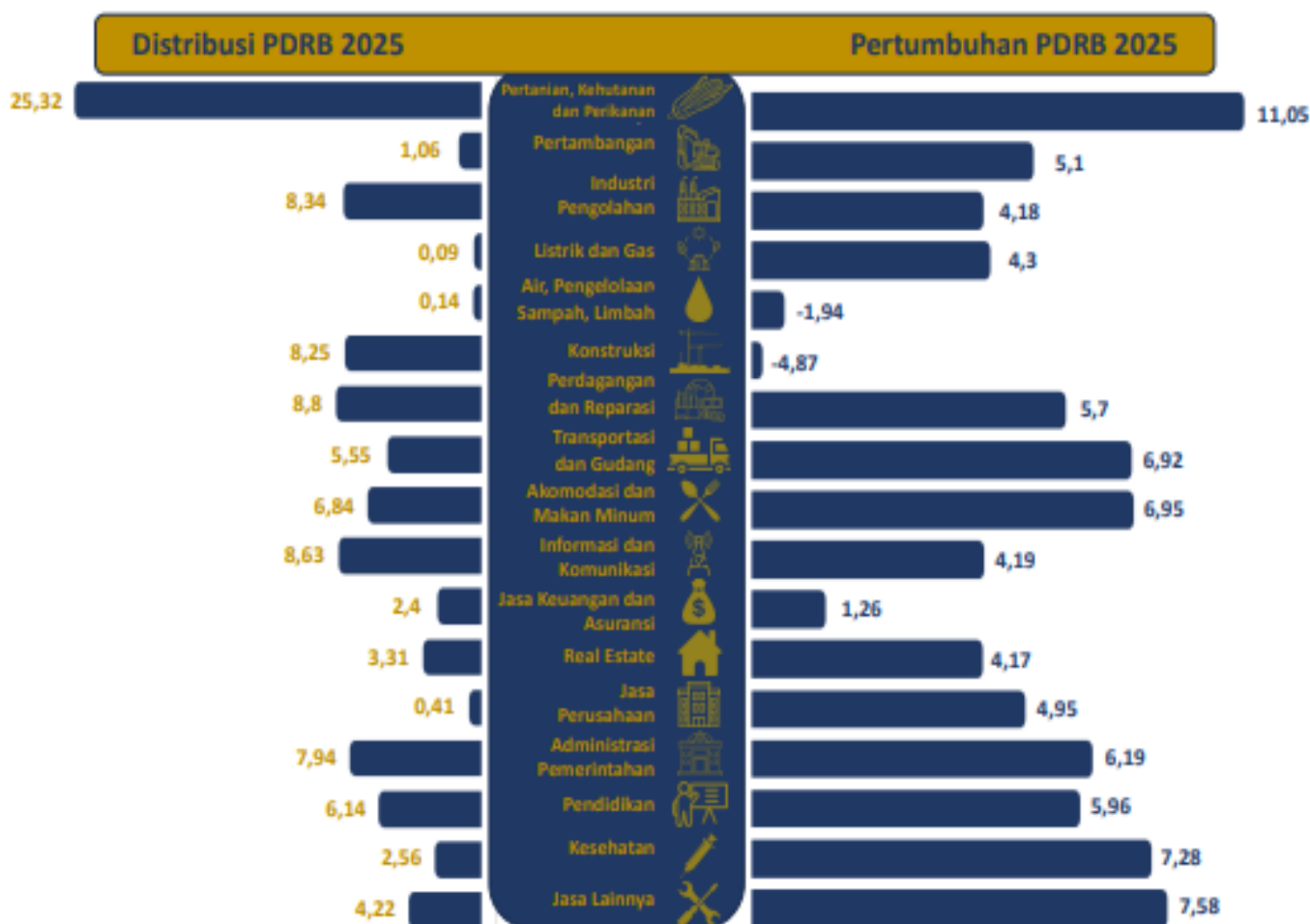
3. Kondisi Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 sebesar 5,47%, lebih tinggi dari tahun 2024 sebesar 4,81%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi perekonomian di Kabupaten Gunungkidul.

Sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar dalam menopang perekonomian Kabupaten Gunungkidul. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 25,32 persen dari total 17 lapangan usaha (BPS, Gunungkidul dalam Angka 2026). Hal ini menegaskan bahwa sektor primer masih menjadi tulang punggung struktur ekonomi daerah.

Namun demikian, kondisi ketenagakerjaan menunjukkan dinamika yang lebih berimbang antar sektor. Sektor jasa menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan proporsi sebesar 35,05 persen, diikuti sektor industri sebesar 32,96 persen, dan sektor pertanian sebesar 31,98 persen. Perbedaan antara kontribusi PDRB dan penyerapan tenaga kerja ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian, meskipun berkontribusi besar terhadap perekonomian, memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja yang relatif lebih rendah dibandingkan sektor industri dan jasa. Di sisi lain, meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor jasa dan industri mencerminkan adanya pergeseran struktur ekonomi menuju sektor sekunder dan tersier, yang menjadi sinyal positif bagi proses transformasi ekonomi daerah, meskipun sektor pertanian tetap memegang peranan strategis.

Data distribusi dan laju pertumbuhan PDRB dari 17 lapangan usaha pada tahun 2025 secara rinci ditampilkan dalam gambar berikut:



Gambar 1.2 Data Distribusi Persentase dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2025

(Sumber : BPS Gunungkidul Dalam Angka Tahun 2026)

D. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Pada awalnya Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan Undang-undang tersebut dicabut dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul.

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa “Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional”. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Kabupaten Gunungkidul melaksanakan 6 bidang urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 bidang urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pilihan sebanyak 8 bidang urusan, serta 10 bidang penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah tersebut dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Struktur Organisasi

Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menindaklanjuti dengan menyusun Peraturan daerah Nomor telah dilaksanakan penataan kelembagaan perangkat daerah yang diatur

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yaitu: Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan yang kemudian sejalan dengan status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, nomenklatur kecamatan diubah menjadi kapanewon.

a. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan Sekretariat Daerah Tipe B, bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, struktur organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- 1) Sekretaris Daerah;
- 2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi:
 - a) Bagian Pemerintahan;
 - b) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - c) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang membawahi:
 - a) Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b) Bagian Administrasi Pembangunan;
 - c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

- 4) Asisten Administrasi Umum, yang membawahi:
 - a) Bagian Umum;
 - b) Bagian Protokol, Komunikasi Pimpinan, dan Rumah Tangga;
 - c) Bagian Organisasi.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Staf Ahli

Dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 106 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Gunungkidul, diatur tersendiri mengenai Staf Ahli Bupati dengan nomenklatur jabatan staf ahli dapat terdiri dari:

- 1) Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik;
- 2) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- 3) Staf Ahli Bidang Sosial, Kemasyarakatan, dan Sumber Daya Manusia.

c. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe A. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- 1) Sekretaris DPRD;
- 2) Bagian Umum;
- 3) Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 4) Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
- 5) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- 1) Inspektur;
- 2) Sekretariat;
- 3) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
- 4) Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana;
- 5) Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 6) Inspektur Pembantu Bidang Investigasi; dan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Dinas Daerah

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Daerah terdiri dari

- 1) Dinas Kesehatan Tipe A;
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B;
- 3) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A;
- 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
- 5) Dinas Perhubungan Tipe B;
- 6) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A;
- 7) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Tipe B;
- 8) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A;
- 9) Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A;
- 10) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A;
- 11) Dinas Pendidikan Tipe A;
- 12) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B;

- 13) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Tipe A;
- 14) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Tipe B;
- 15) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B;
- 16) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A;
- 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B;
- 18) Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B;
- 19) Dinas Pariwisata Tipe A;
- 20) Dinas Perdagangan Tipe B
- 21) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Tipe A

f. Badan Daerah

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah. Badan Daerah terdiri dari:

- 1) Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Tipe B;
- 2) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A;
- 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A; dan
- 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A.
- 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A.

g. Kapanewon

Sejalan dengan status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, nomenklatur kecamatan diubah menjadi kapanewon. Kapanewon terdiri dari 18 kapanewon Tipe A. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023.

Kapanewon mempunyai tugas salah satunya adalah koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Jumlah kalurahan di Kabupaten Gunungkidul adalah 144 kalurahan, dan

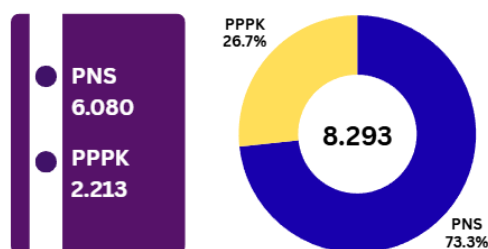
penyelenggaraan pemerintahan kalurahan diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berimbas pada keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah. Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari dan Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari ditetapkan sebagai unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan. Sebagai upaya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan, pada tahun 2025 RSUD Wonosari ditingkatkan menjadi RSUD Tipe B.

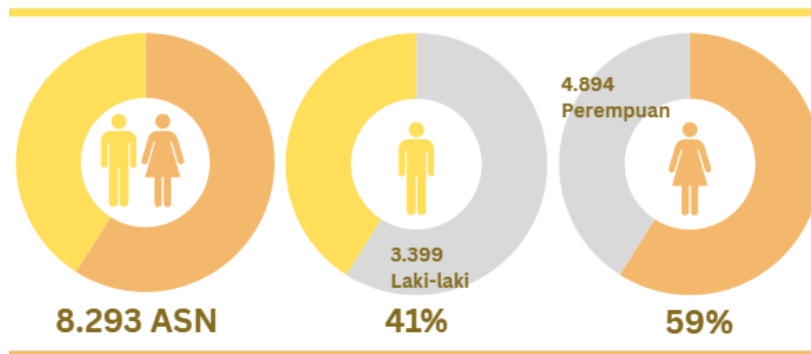
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 juga melakukan penataan kelembagaan sebagai bagian dari penyederhanaan birokrasi menuju birokrasi yang efektif dan efisien dan memastikan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

3. Sumber Daya Aparatur

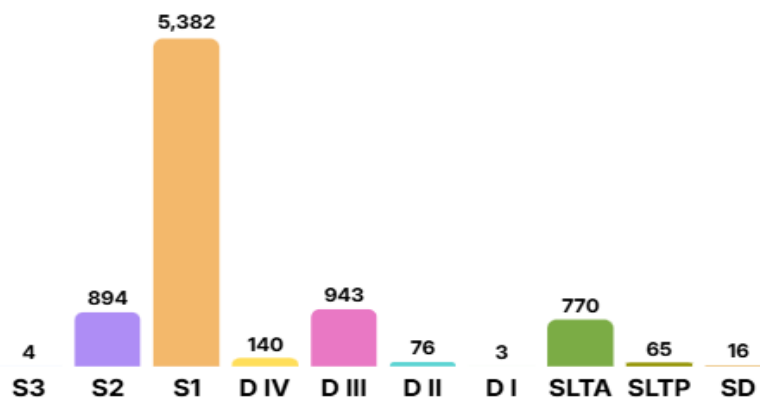
Dalam menunjang visi dan misi Bupati serta untuk mencapai target berdasarkan RPJMD Tahun 2022-2026, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada akhir tahun 2025 mempunyai sumber daya aparatur sebanyak 8.293 pegawai ASN terdiri atas PNS 6.080 orang dan PPPK 2.213 orang. Komposisi perbandingan pegawai berdasarkan status ASN dan PPPK, jenis kelamin, golongan dan berdasarkan pendidikan ditunjukkan dalam gambar berikut:



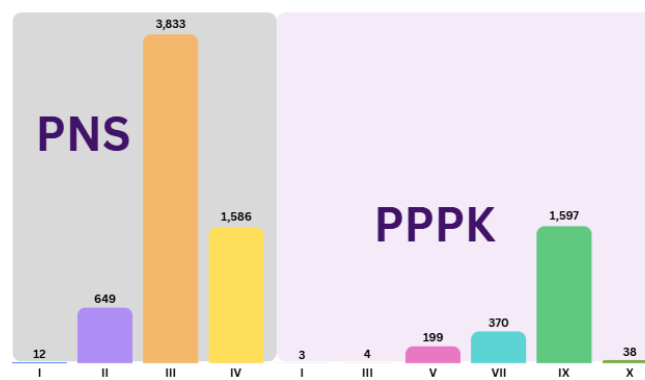
Komposisi Pegawai Berdasarkan Status ASN dan PPPK



Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Gambar 1.3 Sumber Daya Aparatur Tahun 2025

(Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Gunungkidul, 2025)

E. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena bersifat penting, mendasar, mendesak, dan berdampak signifikan bagi penentuan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perencanaan pembangunan Kabupaten Gunungkidul dalam menjawab permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian pada tahun 2025 dikaitkan dengan upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul antara lain:

1. Kapasitas tata kelola pemerintahan
 - a. Nilai SAKIP terendah dibanding Kabupaten/Kota di Provinsi DIY, bahkan mengalami penurunan pada Tahun 2024.
 - b. Kinerja birokrasi dan layanan publik perlu ditingkatkan agar lebih efektif, responsif, transparan dan akuntabel.
 - c. Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2025 dikategorikan rendah, sebagai akibat belum optimalnya pelaksanaan kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah.
 - d. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah perlu ditingkatkan.
 - e. Optimalisasi kinerja BUMD.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia masih menjadi isu strategis yang ditunjukkan oleh capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 sebesar 73,13, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 72,14 dan telah melampaui target kinerja. Namun demikian, capaian IPM tersebut masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target pembangunan jangka menengah.

Di sisi lain, tingkat pengangguran pada tahun 2025 sebesar 2,15%, sedikit membaik dibandingkan tahun 2024 sebesar 2,16%, namun belum mencapai target sebesar 2,05%. Sementara itu, persentase kemiskinan

menunjukkan penurunan menjadi 14,15% pada tahun 2025 dari 15,18% pada tahun 2024, dan telah melampaui target yang ditetapkan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan pada indikator kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia masih menghadapi tantangan, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penurunan pengangguran, serta penguatan daya saing tenaga kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3. Pengangguran dan Kemiskinan

- a. Angka pengangguran di Kabupaten Gunungkidul juga tergolong tinggi mencapai 2,16% pada tahun 2024, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Walaupun angka pengangguran di Gunungkidul paling rendah di DIY, upaya pengurangan angka pengangguran perlu terus dilakukan untuk mendorong peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan.
- b. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2024 masih tinggi yaitu mencapai 120,41 ribu orang dan angka kemiskinan 15,18 persen. Mengalami penurunan daripada tahun 2023 namun persentase tersebut masih di atas persentase angka kemiskinan angka kemiskinan di propinsi DIY yang sebesar 10,83 persen.

4. Penguatan Perekonomian Daerah dan Pemerataan Kesejahteraan

Penguatan perekonomian daerah masih menjadi isu strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,47%, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 4,81% dan melampaui target yang ditetapkan. Selain itu, PDRB per kapita juga meningkat menjadi 38,33 juta rupiah dari 35,50 juta rupiah pada tahun 2024.

Namun demikian, capaian Indeks Gini sebesar 0,333 menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan dibandingkan target (0,322), yang mengindikasikan bahwa hasil pembangunan ekonomi belum sepenuhnya

merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan ekonomi daerah masih perlu difokuskan pada pemerataan hasil pembangunan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan UMKM, serta penguatan sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata.

5. Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Lingkungan Hidup

Pembangunan infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup masih menjadi isu strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Infrastruktur Daerah tahun 2025 sebesar 74,25, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 73,16, namun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan sebesar 75.

Di sisi lain, kualitas lingkungan hidup menunjukkan peningkatan signifikan, dengan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 77,66 pada tahun 2025, meningkat dari 72,38 pada tahun 2024 dan melampaui target kinerja. Selain itu, capaian investasi daerah yang diukur melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4.421.970 juta rupiah juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, air minum, sanitasi, serta penanganan kawasan permukiman dan lingkungan untuk mendukung konektivitas wilayah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata.

BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diwujudkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021–2026. RPJMD secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Visi Kabupaten Gunungkidul 2021-2026

Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang, memperhatikan Visi dan Misi RPJMN, Visi dan Misi RPJMD DIY, serta visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026”.

2. Misi Kabupaten Gunungkidul 2021-2026

Dalam upaya pencapaian Visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2026, ditetapkan misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis.
2. Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah.

3. Tujuan dan Sasaran

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan misi pembangunan daerah lima tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut:

a. Misi 1:

Mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis

Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan Masyarakat Meningkatkan

b. Misi 2

Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah

Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Derajat Kualitas SDM Meningkatkan Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Dan Peningkatan Investasi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan Nilai Investasi Meningkatkan

Berdasarkan tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan, maka ditetapkan pula indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan masing-masing sasaran strategis. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 196/KPTS/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 328/KPTS/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2021-2026. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja serta target indikator tujuan dan sasaran strategis di tahun akhir RPJMD 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Matriks Perencanaan Kinerja
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 2021-2026

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2026
Tujuan 1 Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.	Indeks Reformasi Birokrasi	77,10
Sasaran Strategis 1 Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat	Opini BPK	WTP
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83,50 (A)
Sasaran Strategis 2 Ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban	96,50
	Indeks Ketahanan Daerah	0,90
Tujuan 2 Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75
Sasaran Strategis 3 Derajat kualitas SDM meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75
Sasaran Strategis 4 Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun	Angka Pengangguran	1,50
	Persentase Angka Kemiskinan	11
Tujuan 3 Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Dan Peningkatan Investasi	PDRB Perkapita	28.900.000
Sasaran Strategis 5 Pengelolaan sumber daya alam dan Perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan ekonomi	4,50
	Indeks gini	0,291
Sasaran Strategis 6 Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Daerah	85,0
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,00
Sasaran Strategis 7 Nilai Investasi Meningkatkan	Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.300.000.000.000

4. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 mengusung Tema “Penguatan Ekonomi Daerah, Taraf Hidup Masyarakat, Infrastruktur, dan Peningkatan SDM yang Unggul”.

Prioritas pembangunan daerah tahun 2025 diselaraskan dengan sasaran daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan prioritas yang digunakan untuk mencapai visi misi Bupati Gunungkidul. Prioritas pembangunan yang dimuat dalam RKPD Tahun 2025 adalah:

1. Peningkatan Ekonomi;
2. Penurunan Angka Kemiskinan, dan Penanganan Stunting;
3. Ketahanan Pangan;
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;
6. Ketentraman dan Ketertiban; dan
7. Reformasi Birokrasi.

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul terhadap Prioritas Pemda DIY dan Prioritas Nasional, Tema dan Prioritas Pembangunan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Program untuk Pencapaian Sasaran, dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 pada lampiran laporan ini.

B. Perjanjian Kinerja

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam RPJMD 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam RPJMD dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2025 dan dilakukan perubahan pada tanggal 3 September 2025.

Adapun kondisi yang menyebabkan dilakukan revisi adalah:

1. Pergantian Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak Tahun 2024, yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025.

2. Penyesuaian target menjadi lebih tinggi karena target di PK yang ditandatangani pada bulan Januari 2025 masih lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2024 untuk indikator Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto.
3. Penyesuaian dengan perubahan anggaran.

Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja dimaksud sebagai berikut:

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur: *Perjanjian kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:*

- a. *Terjadi pergantian atau mutas pejabat*
- b. *Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (Perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran); dan*
- c. *Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.*

Tabel 2.2 Perbandingan Perjanjian Kinerja sebelum dan sesudah Perubahan

Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target 2026		
		Satuan	Awal	Revisi
1. Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	-	87,23
2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	IPM Tahun 2026	Indeks	-	75
3. Terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi	PDRB Perkapita	Ribu rupiah	-	35.50

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target		
		Satuan	Awal	Revisi
1. Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat	Opini BPK		WTP	WTP
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		82,50 (A)	82,50 (A)
2. Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban	Indeks	100	100
	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,8	0,8
3. Derajat kualitas SDM meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,54	72,54
4. Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun	Angka Pengangguran	Persen	2,05	2,05
	Persentase Angka Kemiskinan	Persen	15	15
5. Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,16	5,16
	Indeks gini	Indeks	0,322	0,322
6. Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	75	75
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	72,38	72,38
7. Nilai Investasi Meningkat	Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto	Juta rupiah	4.079.710	4.387.740

Perjanjian Kinerja Bupati Gunungkidul Tahun 2025 setelah revisi ini selanjutnya menjadi acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 ini.

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menetapkan program-program strategis daerah terkait Indikator Kinerja Utama beserta pagu anggarannya sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 sebagai berikut:

Nama Program	Jumlah (Rp)
1. Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	561.942.183.518,00
2. Program Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	7.652.979.574,00
3. Program Penanggulangan Bencana	3.987.454.546,00
4. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	225.734.008.284,00
5. Program Pengurangan Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja	1.291.025.000,00
6. Program Penanggulangan Kemiskinan	4.155.780.250,00
7. Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan	49.229.089.973,00
8. Program Pembangunan Infrastruktur	107.511.438.985,00
9. Program Peningkatan Investasi	11.888.507.400,00

C. Instrumen untuk mendukung pengelolaan kinerja

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berupaya melakukan perbaikan manajemen pembangunan berbasis kinerja. Beberapa instrumen yang digunakan untuk peningkatan kinerja baik pada fase perencanaan maupun pengendalian pembangunan antara lain adalah:

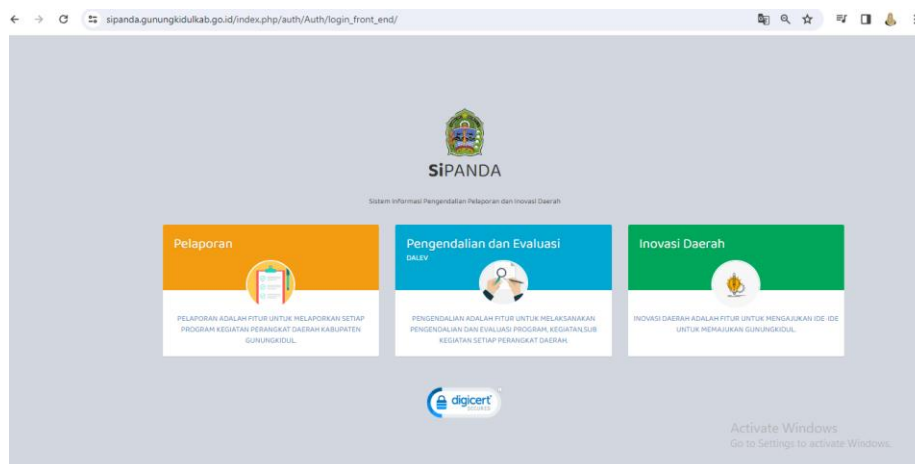
1. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Dalam mengelola keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang mendukung pencapaian kinerja dalam penyusunan dokumen perencanaan, mengawal proses perencanaan, serta merespon aspirasi masyarakat. Selain itu aplikasi ini juga mendukung pencapaian kinerja dalam penyusunan dokumen rencana kerja anggaran (RKA).



Gambar 2.1 Tampilan SIPD

SIPANDA merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengevaluasi capaian indikator RKPD maupun RPJMD baik evaluasi fisik maupun evaluasi keuangan.



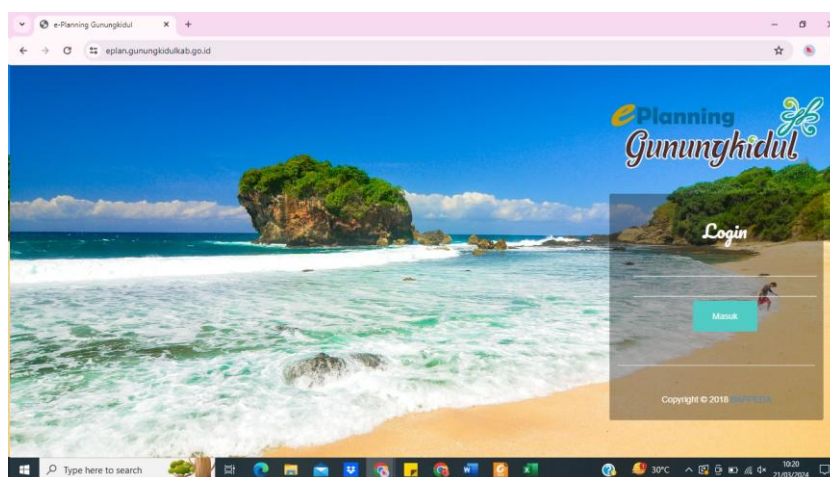
Gambar 2.2 Tampilan SIPANDA

2. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) telah digunakan untuk menginput pengadaan barang/jasa di Kabupaten Gunungkidul dan pengadaan barang dan jasa menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).



Gambar 2.3
Aplikasi LPSE Kabupaten Gunungkidul

3. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan menggunakan aplikasi e-Planning Gunungkidul.



Gambar 2.4
Aplikasi e-Planning Gunungkidul

4. Sistem Informasi Manajemen Aset (SIM Aset), merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung penyusunan laporan aset.



Gambar 2. Tampilan SIM Aset

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk transparansi capaian keberhasilan kinerja instansi pemerintah kepada masyarakat. Kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan menjadi bagian penting dalam pencapaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik. Akuntabilitas kinerja daerah merupakan representasi dari pengukuran kinerja Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran strategis pada akhir satu periode tahun anggaran.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dilakukan secara berkala secara triwulanan dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur perencanaan, keuangan, pengawasan serta pengendalian pembangunan. Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 diukur dari capaian indikator kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Bupati Gunungkidul Tahun 2025.

Kerangka pengukuran kinerja dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2x \text{ Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% s.d ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dokumen ini menyajikan ringkasan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk tahun 2025, berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja terhadap Perjanjian Kinerja tahun 2025 ini menunjukkan realisasi dan persentase capaian dari berbagai indikator kinerja utama tujuan dan sasaran daerah. Secara keseluruhan, dengan rata-rata capaian kinerja di angka 100.81%, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berhasil menunjukkan hasil yang positif dalam mencapai tujuan strategisnya, menunjukkan dedikasi dalam

melayani masyarakat dan membangun daerah Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Atas Pencapaian Kinerja 2025

No	Tujuan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
I	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	87,23	87,29*	100,07
1.	Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat	Opini BPK	WTP	WTP	100,00
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,50 (A)	78,78 (BB)	94,07
2.	Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban	100,00	100,00	100,00
		Indeks Ketahanan Daerah	0,80	0,81	101,25
II	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	IPM Tahun 2026	75	73,13	97,51
3.	Derajat kualitas SDM meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,54	73,13	100,81
4.	Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun	Angka Pengangguran	2,05	2,15	95,12
		Persentase Angka Kemiskinan	15	14,15	105,67
III	Terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi	PDRB Perkapita	35,50	38,33	107,97
5.	Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan ekonomi	5,16	5,47	106
		Indeks gini	0,322	0,333	96,58
6.	Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Daerah	75	74,25	99,01
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,38	77,66	107,29
7.	Nilai Investasi Meningkat	Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (dalam juta)	4.387.740	4.421.970	100,78
Rata-rata capaian					100,81

Keterangan

* : Hasil sementara

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja per tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja utama.

Tujuan 1: Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

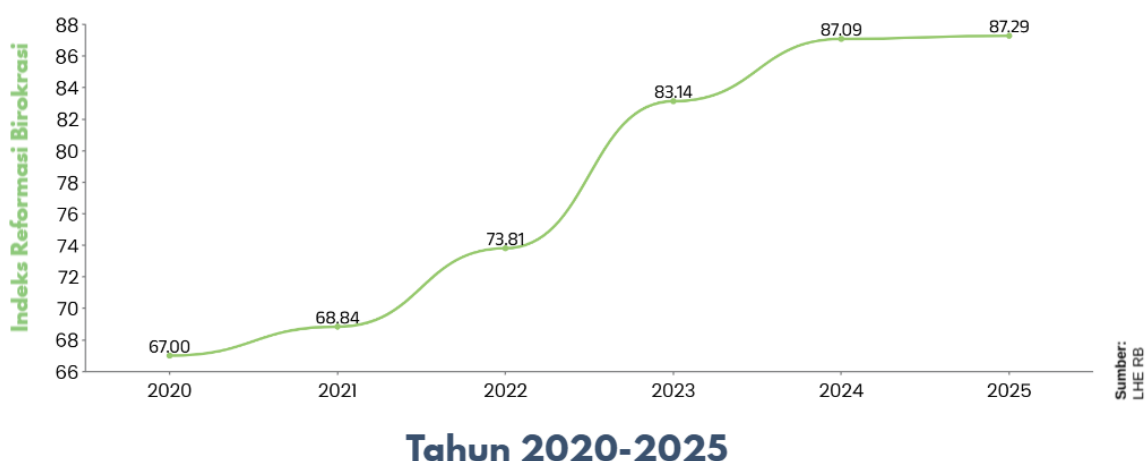
Tujuan Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik merupakan bagian strategis dalam mendukung pencapaian Misi 1 RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021–2026, yaitu “Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis.” Tujuan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam membangun sistem pemerintahan yang profesional, adaptif, serta berorientasi pada hasil dan pelayanan publik yang berkualitas.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dimaknai sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Implementasi tata kelola yang baik diwujudkan melalui birokrasi yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, memiliki kinerja yang efektif dan efisien, serta mampu berdaya saing dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu instrumen utama untuk mewujudkan kondisi tersebut adalah pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Capaian tujuan ini diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Perkembangan nilai Indeks RB Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menunjukkan tren peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, nilai Indeks RB tercatat sebesar 68,84 (kategori B), meningkat menjadi 73,81 (kategori BB) pada tahun 2022. Sejak tahun 2023 terjadi perubahan signifikan dalam sistem evaluasi Reformasi Birokrasi secara nasional. Apabila pada periode sampai dengan tahun 2022 penilaian lebih menitikberatkan pada pemenuhan komponen pengungkit dan delapan area perubahan, maka mulai tahun 2023 evaluasi diarahkan pada pendekatan yang lebih tematik dan berdampak, dengan

fokus pada isu prioritas nasional serta keterkaitan langsung dengan kinerja dan hasil yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, capaian tahun 2020–2022 tidak dapat diperbandingkan secara langsung dengan capaian tahun 2023 dan seterusnya.

Berdasarkan metode evaluasi yang baru, nilai Indeks RB Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 mencapai 83,14 (kategori A-), meningkat menjadi 87,09 (kategori A-) pada tahun 2024, dan nilai sementara tahun 2025 tercatat sebesar 87,29 (kategori A-). Dengan target 87,23 maka capaian kinerjanya adalah 100,07%. Tren tersebut menunjukkan konsistensi perbaikan tata kelola pemerintahan serta penguatan implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Gunungkidul, meskipun masih terdapat ruang perbaikan untuk mencapai kategori yang lebih tinggi.



Gambar 3.1 Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2025

Berdasarkan grafik perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten sejak tahun 2023. Kenaikan nilai tersebut menunjukkan adanya perbaikan tata kelola yang berkelanjutan serta kemampuan pemerintah daerah dalam beradaptasi terhadap metode evaluasi RB yang berbasis dampak.

Peningkatan nilai tersebut tidak terlepas dari kontribusi capaian kinerja pada kegiatan utama Reformasi Birokrasi. Rincian capaian indikator kinerja kegiatan utama Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi

No	Indikator Kegiatan Utama	2023	2024	2025
1.	Tingkat implementasi Penyederhanaan Birokrasi	80,93	Tidak ada	Tidak Ada
2.	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru pasca Penyederhanaan Birokrasi dan Penyetaraan Jabatan	5	5	5
3.	Indeks SPBE	2,84	3,96	4,07
4.	Nilai SAKIP	79,39	77,08	78,78
5.	Perangkat Daerah yang mendapat predikat ZI	0,75	1,5	1,5
6.	Tingkat Maturitas SIPP	3,191	3,21	3,07
7.	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	4	2	5
8.	Survei Penilaian Integritas	78,13	80,08	74,45
9.	Indeks Kualitas Kebijakan	87,11	87,11	88,44
10.	Indeks Reformasi Hukum	56,39	97,96	99
11.	Kualitas Pengelolaan Arsip	86,59	93,64	94,91
12.	Tingkat penyelenggaraan data statistik sektoral	1,13	2,37	2,37*
13.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	71,97	82,42	85,95
14.	Opini BPK	5	3	3
15.	Nilai Sistem Merit	265	265	265*
16.	Indeks BerAKHLAK	62,3	75,53	75,53*
17.	Indeks Pelayanan Publik	4,34	4,27	4,59
18.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	89,42	95,3	95,3
19.	Survei Kepuasan Masyarakat	82,54	82,94	83,69

* : pada tahun 2025 tidak dilaksanakan penilaian

Dari tabel di atas, tersaji adanya aspek-aspek yang berperan sebagai pengungkit utama dalam peningkatan nilai Reformasi Birokrasi, sebagaimana tercermin pada beberapa capaian indikator komponen evaluasi yang menunjukkan kinerja sangat baik dan stabil. Aspek-aspek yang menjadi pengungkit keberhasilan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Aspek Akuntabilitas dan Tata Kelola Keuangan

Opini BPK tetap pada predikat WTP dengan capaian 100%, tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan mencapai 98,50%, serta nilai SAKIP sebesar 78,78 (kategori B). Stabilitas pada aspek ini menjadi pengungkit penting karena keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja merupakan komponen utama dalam evaluasi RB berbasis hasil.

2. Aspek Kualitas Kebijakan dan Regulasi

Indeks Reformasi Hukum mencapai 99,20 dan Indeks Kualitas Kebijakan sebesar 88,40 (kategori sangat baik). Capaian ini menunjukkan penguatan tata kelola dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan daerah secara lebih sistematis, terukur, dan partisipatif.

3. Aspek Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik mencapai 92,00, tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan sebesar 95,50%, serta tingkat penyelesaian pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR! mencapai 100%. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 83,75 menunjukkan persepsi publik yang semakin positif terhadap kualitas layanan pemerintah daerah. Hal ini merupakan wujud dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang terus dilakukan dan didukung dengan inovasi-inovasi pada unit penyelenggara pelayanan publik.





Gambar 3.2 Inovasi Pelayanan Publik (Pelayanan Keliling/Jemput Bola Pengurusan Dokumen Kependudukan kepada Kelompok Rentan)

4. Aspek Digitalisasi dan Tata Kelola Administrasi

Indeks SPBE Tahun 2025 mencapai 81,33 dan tingkat digitalisasi arsip sebesar 94,80, yang memperlihatkan kemajuan dalam penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik serta peningkatan efisiensi dan transparansi administrasi.

Secara keseluruhan, konsistensi peningkatan nilai RB sejak tahun 2023 didukung oleh kinerja pada aspek akuntabilitas keuangan, kualitas kebijakan, pelayanan publik, serta digitalisasi administrasi. Faktor-faktor tersebut menjadi fondasi utama yang menjaga stabilitas nilai RB pada kategori A-.

Strategi untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ke depan dilaksanakan melalui penguatan perencanaan Reformasi Birokrasi dan tindak lanjut hasil evaluasi secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyusun dan menetapkan Roadmap Reformasi Birokrasi yang selaras dengan arah Roadmap RB Nasional serta kebijakan Reformasi Birokrasi terbaru dari Kementerian PANRB, dan menjabarkannya ke dalam rencana aksi tahunan yang terukur, realistis, serta berorientasi hasil. Roadmap tersebut menjadi pedoman dalam memastikan kesinambungan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara sistematis.

Selain itu, dilakukan tindak lanjut secara sistematis terhadap rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi Tahun

2025 dengan menetapkan langkah perbaikan yang spesifik, terukur, terbatas waktu, dan disertai mekanisme monitoring serta evaluasi berkala.

Secara substantif, langkah tindak lanjut difokuskan pada:

1. Penguatan tata kelola dan sistem pengendalian intern, melalui peningkatan maturitas SPIP, serta percepatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dan evaluasi.
2. Percepatan transformasi digital pemerintahan, melalui penyusunan dan implementasi Arsitektur SPBE, integrasi sistem layanan publik, serta penguatan digitalisasi proses administrasi untuk mendukung transparansi dan efisiensi.
3. Penguatan integritas dan kualitas pelayanan publik, melalui pembangunan Zona Integritas, optimalisasi sistem pengelolaan pengaduan dan *Whistleblowing System*, serta pemanfaatan hasil Survei Penilaian Integritas dan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
4. Penguatan implementasi Reformasi Birokrasi Tematik yang berdampak, dengan menyempurnakan rencana aksi agar lebih dikawal dengan target yang logis, realistis, dan berorientasi peningkatan kinerja kolaboratif, berbasis pemecahan masalah, dan terintegrasi dengan pencapaian indikator pembangunan daerah.

Dengan strategi tersebut, diharapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Gunungkidul semakin terarah, terukur, dan mampu mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menetapkan dua sasaran strategis sebagai tahapan antara (intermediate outcome), yaitu (1) Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan dan (2) Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat.

Sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan diukur melalui indikator Opini BPK dan Nilai AKIP (SAKIP), yang mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah

daerah. Sementara itu, sasaran Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah serta Indeks Ketenteraman dan Ketertiban, yang menggambarkan tingkat stabilitas wilayah dan kondusivitas sosial di daerah.

Penetapan kedua sasaran tersebut menunjukkan bahwa Reformasi Birokrasi tidak hanya diarahkan pada penguatan sistem tata kelola internal, tetapi juga pada penciptaan stabilitas dan rasa aman di masyarakat sebagai dampak dari tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Selanjutnya, capaian masing-masing sasaran diuraikan sebagai berikut.

Sasaran 1 : Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Meningkat

Sasaran Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat merupakan salah satu upaya strategis dalam mendukung pencapaian Misi 1 RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021–2026, yaitu “Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis”, serta tujuan “Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”.

Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Opini BPK dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Hasil pengukuran kinerja sasaran Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pengukuran Capaian Sasaran Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1.	Opini BPK	WTP	WTP	100,00	Sangat Tinggi
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80,50 (A)	78,78 (BB)	97,86	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian Kinerja				98,93	Sangat tinggi

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran kapasitas tata kelola pemerintah meningkat tahun 2025

Indikator Kinerja : Opini BPK

Opini BPK merupakan penilaian BPK atas hasil pemeriksaan atau audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Opini BPK atas Laporan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni:

- 1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- 2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- 3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- 4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa (BPK), yakni:

- 1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material;
- 2) WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Opini WTP DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya;
- 3) Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian;
- 4) Tidak Wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya;
- 5) Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), Opini ini oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Sumber data yang digunakan dalam pengukuran realisasi indikator ini

adalah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi oleh BPK RI.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi bukti-bukti mendukung angka pengujian dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11B/LHP/XVILYOG/4/2025 Tanggal 14 April 2025, BPK memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 yang merupakan opini terbaik yang diberikan oleh BPK. Hal ini dimaksudkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemkab Gunungkidul tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Capaian opini WTP ini telah diperoleh 10 (sepuluh) tahun secara berturut-turut atas laporan keuangan tahun 2015-2024.

Perbandingan realisasi Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023-2025, serta target dan capaian kinerja terhadap tahun akhir RPJMD 2021-2026 adalah:

Tabel 3.5 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah 2023-2025 dan Capaian 2025 terhadap Target Tahun Akhir RPJMD 2021-2026

Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026 (Akhir RPJMD)	Capaian 2025 terhadap 2026 (%)
WTP	WTP	WTP	WTP	100

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan komitmen pimpinan daerah dan dukungan kelembagaan, yang melibatkan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, seluruh Kepala Perangkat Daerah, serta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI maupun hasil audit Inspektorat Daerah secara tepat waktu dan terukur sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan dan penguatan akuntabilitas
3. Peningkatan koordinasi dan konsolidasi pengelolaan keuangan, mulai dari tingkat unit kerja dan Perangkat Daerah hingga konsolidasi di tingkat kabupaten oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.
4. Penguatan pengawasan dan pembinaan, melalui reviu atas laporan keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Inspektorat Daerah, disertai pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus, serta pendampingan tindak lanjut atas temuan BPK RI maupun hasil audit Inspektorat.
5. Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan, melalui penyelenggaraan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah dan BLUD, serta koordinasi intensif dalam persiapan penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
6. Pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan, antara lain implementasi SIPD untuk perencanaan dan penganggaran APBD, serta SIPKD untuk penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
7. Penguatan pengelolaan aset dan persediaan, melalui penggunaan aplikasi SIM Aset dan SIM Persediaan yang telah diterapkan secara konsisten.
8. Pelaksanaan rekonsiliasi fisik dan keuangan secara rutin setiap bulan, guna memantau serapan anggaran dan capaian kinerja perangkat daerah sebagai bagian dari pengendalian pembangunan.

9. Peningkatan tata kelola pengadaan barang dan jasa, melalui implementasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) serta pelaksanaan pengadaan secara elektronik melalui LPSE.

Dalam rangka mempertahankan Opini BPK pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SIPD, SIPKD, SIPANDA, LPSE, dan SIM Aset dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah.
2. Memperkuat mekanisme pemantauan dan percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan
3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
4. Memperkuat sistem pengendalian internal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi berkala bersama pengelola keuangan Perangkat Daerah untuk memastikan pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan.

Indikator Kinerja: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator ini mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja (AKIP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Evaluasi Implementasi AKIP di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dilakukan oleh Kementerian PANRB dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Realisasi Nilai Implementasi AKIP Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sesuai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 Nomor B/289/AA.04/2025 Tanggal 29 Desember 2025 menunjukkan nilai sebesar 78,78 dengan kategori nilai “BB” dengan interpretasi “Sangat Baik”. Dari hasil evaluasi, implementasi SAKIP di Kabupaten Gunungkidul dinilai sudah

sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, dan telah diimplementasikan pada sebagian besar unit kerja.

Untuk perkembangan nilai AKIP dari tahun 2015-2025 dapat dilihat dari grafik berikut berikut ini:



Gambar 3.3 Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2015-2025

Perbandingan realisasi Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023-2025, serta target dan capaian kinerja terhadap tahun akhir RPJMD 2021-2026 adalah:

Tabel 3.6 Nilai AKIP 2023-2025 dan Capaian 2025 Terhadap Target Tahun Akhir RPJMD 2021-2026

Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026 (Akhir RPJMD)	Capaian 2025 terhadap 2026 (%)
79,37 (BB)	77,08 (BB)	78,78 (BB)	83,50 (A)	94,35

Berdasarkan Tabel 3.6, nilai AKIP Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2023 sebesar 79,37 (BB), mengalami penurunan pada Tahun 2024 menjadi 77,08 (BB), dan kembali meningkat pada Tahun 2025 menjadi 78,78 (BB). Kenaikan sebesar 1,70 poin pada Tahun 2025 menunjukkan adanya tren perbaikan setelah penurunan pada tahun sebelumnya, meskipun predikat masih berada pada kategori BB.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 83,50 (predikat A), capaian Tahun 2025 telah mencapai sekitar 94,35% dari target tersebut. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, khususnya pada aspek perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja. Meskipun peningkatan tersebut belum signifikan dalam perubahan kategori, tren positif ini mencerminkan komitmen berkelanjutan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis kinerja.

Dari hasil evaluasi, terdapat beberapa faktor pendorong peningkatan nilai SAKIP.

1. Penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja melalui penyusunan dan perbaikan Pohon Kinerja yang semakin mengarah pada keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerja.
2. Pemutakhiran metadata Indikator Kinerja Utama (IKU) serta peningkatan kualitas pengukuran kinerja.
3. Perbaikan kualitas pelaporan kinerja yang mulai menampilkan analisis faktor pendukung dan penghambat capaian.
4. Pelaksanaan evaluasi internal oleh APIP yang semakin sistematis sehingga mendorong perbaikan implementasi SAKIP di perangkat daerah.
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimtek dengan narasumber dari KemenPANRB dan Pemerintah Daerah DIY. Selain itu, juga dilaksanakan Penguatan SDM di Inspektorat Daerah melalui Pelatihan di Kantor Sendiri dengan narasumber dari KemenPANRB.

Namun demikian, masih terdapat faktor penghambat yang memerlukan perhatian. Integrasi lintas perangkat daerah (*crosscutting*) dalam perencanaan dan pengukuran kinerja belum sepenuhnya optimal. Kualitas analisis dalam pelaporan kinerja masih bervariasi antar perangkat daerah dan belum sepenuhnya berbasis data serta berorientasi *outcome*. Selain itu, evaluasi internal belum sepenuhnya memberikan rekomendasi yang tajam dan berbasis akar permasalahan, sehingga pemanfaatannya sebagai instrumen perbaikan kinerja belum maksimal.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul akan melakukan penguatan pada beberapa aspek strategis, yaitu:

1. Melakukan penyempurnaan Pohon Kinerja pada level Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dengan memastikan penjenjangan kinerja tersusun secara logis, sistematis, dan berorientasi pada outcome sesuai prinsip PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021. Penyempurnaan tersebut juga mencakup penguatan integrasi lintas Perangkat Daerah (crosscutting), melalui pemetaan peran dan kontribusi masing-masing unit dalam mendukung pencapaian sasaran strategis daerah;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan manual Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan utama dalam pengukuran dan pelaporan kinerja, serta manual IKU secara konsisten dalam pengukuran dan pelaporan;
3. Memaksimalkan penggunaan aplikasi SIPANDA dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja secara terintegrasi dan berkala.
4. Peningkatan kualitas analisis dalam LKjIP perangkat daerah agar lebih komprehensif dan berbasis data; serta
5. Penguatan kapasitas evaluator internal dan mekanisme *quality assurance* agar rekomendasi evaluasi lebih tajam, spesifik, dan dapat ditindaklanjuti secara efektif.
6. Meningkatkan koordinasi antara Sekretariat Daerah, Bapperida dan Inspektorat Daerah sebagai pengelola SAKIP Kabupaten Gunungkidul.

Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas SAKIP secara lebih signifikan pada tahun berikutnya serta diharapkan dapat memastikan penyelenggaraan pemerintahan dapat memberikan dampak yang positif pada masyarakat.

Untuk mencapai keberhasilan capaian sasaran meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintah daerah, dilaksanakan Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah yang didukung dengan alokasi anggaran dengan rincian sebesar tabel berikut:

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat

Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	561.942.183.518	532.250.945.927	94,72	29.691.237.591	5,28

Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah menyerap anggaran sebesar Rp561.942.183.518,00. Dalam pelaksanaannya, program tersebut terealisasi sebesar Rp532.250.945.927,00 atau mencapai 94,72 persen dari total anggaran yang dialokasikan.

Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran yang direncanakan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Adapun terdapat selisih anggaran sebesar Rp29.691.237.591,00 atau 5,28 persen dari pagu yang tersedia, yang mencerminkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan program.

Dengan tingkat serapan anggaran yang sangat tinggi serta adanya efisiensi penggunaan anggaran, pelaksanaan Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah secara umum menunjukkan pengelolaan program yang cukup efektif dalam mendukung peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah.

Sasaran 2 : Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat Meningkat

Sasaran strategis ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi 1 dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis”** dan tujuan **“Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”**.

Pemerintah Kabupaten dalam upaya menciptakan kondisi yang tenteram, tertib, dan aman menetapkan sasaran strategis ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Ketenteraman dan Ketertiban serta Indeks Ketahanan Daerah. Hasil pengukuran kinerja sasaran strategis ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Pengukuran Capaian Sasaran Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat Meningkat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1.	Indeks ketenteraman dan ketertiban	100	100	100	Sangat Tinggi
2.	Indeks Ketahanan Daerah	0,80	0,81	101,25	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian Kinerja				100,62	Sangat tinggi

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata 100,62% yang masuk kategori sangat tinggi. Capaian indikator kinerja indeks ketenteraman dan ketertiban sebesar 100 sehingga dengan target 100 kinerjanya tercapai sebesar 100% masuk kategori sangat tinggi. Sementara itu, capaian indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada Tahun 2025

terrealisasi sebesar 0,81 dari target 0,80, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 101,25% dan berada pada kategori sangat tinggi.

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis 2 tahun 2025.

Indikator Kinerja : Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Indeks Ketenteraman dan Ketertiban merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kondusivitas wilayah melalui penilaian terhadap kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Indeks ini disusun berdasarkan tiga komponen utama, yaitu: (1) persentase pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan; (2) persentase kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang terselesaikan; dan (3) persentase konflik sosial yang tertangani. Ketiga komponen tersebut mencerminkan efektivitas pemerintah daerah dalam melakukan penegakan peraturan, penanganan gangguan ketertiban, serta pengelolaan potensi konflik sosial secara responsif dan terukur.

Data penyusunan indeks diperoleh dari laporan kinerja perangkat daerah terkait, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan Perda dan Perkada, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penanganan konflik sosial dan pembinaan ketahanan masyarakat, serta Kapanewon dalam pelaporan kejadian dan fasilitasi penyelesaian di tingkat wilayah. Dengan demikian, Indeks Ketenteraman dan Ketertiban mencerminkan sinergi lintas perangkat daerah dalam menjaga stabilitas sosial dan ketertiban umum.

Selanjutnya, capaian Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Tahun 2025 diuraikan berdasarkan realisasi masing-masing komponen indikator sebagai berikut :

Tabel 3.9 Capaian Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

No	Komponen Indeks	Capaian
1.	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	100%
2.	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan	100%
3.	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	100%
4.	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban yang Terselesaikan	100%
	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	100%

Sumber: Laporan Kinerja Satpol PP, Kapanewon dan Bakesbangpol

Mengacu pada capaian masing-masing komponen sebagaimana tersaji pada Tabel di atas, Indeks Ketenteraman dan Ketertiban pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Kondisi ketenteraman dan ketertiban daerah relatif terjaga dengan baik, yang berkontribusi positif terhadap peningkatan Indeks Ketenteraman dan Ketertiban. Tingginya tingkat penyelesaian konflik sosial dan pelanggaran Perda/Perkada menunjukkan efektivitas upaya penegakan regulasi daerah dan respons cepat terhadap potensi gangguan ketertiban. Sepanjang tahun 2025 tercatat 214 kasus pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan) dan 30 kasus pelanggaran Perda dan Perkada, dengan total 244 kasus. Seluruh kasus tersebut telah diselesaikan, sehingga tingkat penyelesaian mencapai 100%. Indikator Persentase Konflik Sosial yang Tertangani terealisasi sebesar 100% dari target 100%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% dan termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Berdasarkan data Tahun 2025, terdapat 14 (empat belas) konflik sosial yang terjadi dan seluruhnya berhasil ditangani secara tuntas, sehingga tidak terdapat konflik yang tidak terselesaikan. Kondisi ini mencerminkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas sosial melalui deteksi dini potensi konflik, respons penanganan yang cepat, serta penegakan peraturan secara konsisten.

Kinerja penyelesaian pelanggaran K3, penegakan pelanggaran Perda dan Perbup, penanganan konflik di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.10 Data Penyelesaian Pelanggaran K3 dan Penyelesaian Pelanggaran

No	Uraian Kasus	Kasus Terjadi	Kasus terselesaikan	Persentase Penyelesaian Kasus
1.	Pelanggaran K3	214	214	100%
	Pelanggaran Perda dan Perbup	30	30	100%
2.	Kejadian konflik	14	14	100%

Pencapaian target persentase pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3), dan pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan, didukung dengan berbagai kegiatan antara lain kegiatan penanganan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, sosialisasi dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, kerjasama antar lembaga kemitraan dan masyarakat, serta melalui pembinaan kepada masyarakat melalui kegiatan jaga warga.

Kondisi keamanan dan ketertiban yang terjaga tidak terlepas berkat sinergi dengan TNI, Polri, dan kelompok masyarakat di wilayah kapanewon. Sosialisasi, pembinaan dan komunikasi dan kerjasama yang baik, efektif, dan kontinyu dijalin sehingga masalah ketentraman dan ketertiban pada tahun 2025 dapat ditangani dengan baik dan meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan.

Data persentase penanganan konflik di Kabupaten Gunungkidul sejak tahun 2018 digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.4
Data Konflik Tertangani Tahun 2018-2025 (dalam Persen)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa sejak tahun 2020, pencapaian angka persentase konflik sosial yang tertangani mencapai 100%. Capaian ini merupakan hasil kerja sama, dan koordinasi antara pemerintah dalam hal ini instansi/perangkat daerah terkait/tim penanganan konflik sosial dengan mitra kerja yaitu: forum kerukunan umat beragama (FKUB), forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM), Kominda, Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK), serta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.



Gambar. 3.5 Piagam Penghargaan Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)

Keberhasilan dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat kerukunan masyarakat tersebut juga mendapatkan pengakuan di tingkat nasional. Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menerima Piagam Penghargaan Indeks Harmoni Indonesia (IHaI), dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada sejumlah daerah yang berpartisipasi aktif serta memenuhi target dalam pengukuran Indeks Harmoni Indonesia, yaitu indikator strategis yang digunakan untuk menilai tingkat harmoni sosial, toleransi, dan kohesi masyarakat.

Penghargaan tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk terus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga stabilitas, persatuan, dan kerukunan masyarakat. Selain itu, capaian ini juga mencerminkan peran aktif Kabupaten Gunungkidul dalam mendukung upaya pengukuran sekaligus penguatan indeks harmoni di tingkat lokal. Dengan demikian, penghargaan ini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan, tetapi juga menjadi pemicu untuk terus meningkatkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga persatuan serta keharmonisan kehidupan sosial di wilayah Kabupaten Gunungkidul..

Dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 2025, capaian Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kabupaten Gunungkidul menunjukkan kinerja yang sangat baik dan stabil. Perbandingan realisasi Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kabupaten Gunungkidul Tahu 2023-2025, serta target dan capaian kinerja terhadap tahun akhir RPJMD 2021-2026 adalah:

Tabel 3.11 Indeks Ketenteraman dan Ketertiban 2023-2025 dan Capaian 2025 terhadap Target Tahun Akhir RPJMD 2021-2026

Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026 (Akhir RPJMD)	Capaian 2025 terhadap 2026 (%)
100	100	100	96,50	103,63

Dari tabel terlihat bahwa nilai indeks yang secara konsisten mencapai angka 100 pada tahun 2023, 2024, dan 2025. Capaian tersebut tidak hanya menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga kondisi wilayah yang aman dan kondusif, tetapi juga melampaui target akhir RPJMD Tahun 2021–2026 yang ditetapkan sebesar 96,50.

Meskipun capaian indikator ketenteraman dan ketertiban menunjukkan hasil yang sangat baik, masih terdapat beberapa tantangan dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Gunungkidul. Permasalahan tersebut antara lain peningkatan pelanggaran ketertiban umum seperti pemasangan reklame atau baliho yang tidak sesuai ketentuan, belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap regulasi, serta potensi gangguan stabilitas sosial akibat penyebaran informasi yang tidak benar di media sosial.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah kabupaten Gunungkidul melakukan berbagai upaya melalui penguatan penegakan regulasi, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, penguatan deteksi dini potensi konflik sosial, pemanfaatan analisis data sebagai dasar perencanaan, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat. Permasalahan, tindak lanjut, dan dampak yang diharapkan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Analisis Faktor Penghambat, Arah Perbaikan dan Dampak yang Diharapkan

No	Aspek	Permasalahan	Tindak Lanjut/Arah Perbaikan	Dampak yang Diharapkan
1	Penegakan Regulasi dan Pengawasan	Peningkatan pelanggaran K3 (reklame, baliho, dll.) serta belum meratanya sosialisasi Perda/Perkada	Penegakan Perda dan Perbup secara konsisten melalui patroli rutin, penindakan tanpa diskriminasi, serta pemetaan wilayah rawan pelanggaran	Penurunan jumlah pelanggaran dan meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap regulasi
2	Sosialisasi dan Edukasi	Pemahaman masyarakat terhadap substansi regulasi masih beragam	Sosialisasi terjadwal berbasis wilayah rawan, penggunaan media variatif (tatap muka, media sosial, radio, video edukasi), serta pelibatan tokoh masyarakat	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat
3	Pencegahan Konflik Sosial	Pengaruh hoaks dan provokasi di media sosial yang berpotensi memicu konflik	Penguatan deteksi dini, peningkatan literasi digital dan wawasan kebangsaan, koordinasi rutin penanganan konflik sosial	Stabilitas sosial terjaga dan potensi konflik dapat dicegah sejak dini
4	Sinergi Lintas Sektor	Koordinasi dan pembagian peran lintas sektor perlu diperkuat	Optimalisasi forum koordinasi dengan perangkat daerah, FKUB, forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM), Kominda, Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK), serta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Gunungkidul.	Penanganan gangguan ketertiban lebih terintegrasi dan efektif
5	Partisipasi Masyarakat	Kesadaran sebagian masyarakat untuk menjaga ketertiban masih perlu ditingkatkan	Penguatan peran jagawarga, pelibatan tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan	Terbangunnya budaya tertib dan kepedulian sosial di masyarakat

Indikator Kinerja: Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Penilaian IKD dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dari IKD, maka setiap daerah mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko, atau dengan kata lain, IKD sebagai instrumen untuk melakukan skenario dan proyeksi ke depan. Penilaian IKD Kabupaten Gunungkidul merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul memperoleh nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebesar 0,81 dengan kategori Tinggi, sesuai dengan Surat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor B-43/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026 tanggal 30 Januari 2026 tentang Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Target Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 ditetapkan sebesar 0,80. Berdasarkan hasil penilaian, realisasi mencapai 0,81, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai 101,25%, yang menunjukkan bahwa target telah terlampaui sebesar 1,25%.

Peningkatan nilai ini mengindikasikan bahwa kapasitas daerah dalam aspek kelembagaan, sumber daya, regulasi, dan tata kelola penanggulangan bencana semakin kuat. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kesiapsiagaan, serta konsistensi dalam pemenuhan indikator yang menjadi komponen penilaian IKD.

Meskipun selisih capaian relatif tipis, posisi pada kategori Tinggi menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul telah berada pada level kapasitas yang baik. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan nilai tersebut agar tetap kompetitif dan responsif terhadap risiko bencana.

Tabel 3.13
Parameter Penghitungan Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2025

No.	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Ketahanan Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	1,00		
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,80		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,72		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	1,00	0,81	TINGGI
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,73		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,78		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,84		

Perbandingan Hasil Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dengan kabupaten lain sebagai berikut:

Tabel 3.14
Hasil Penilaian IKD Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2024 dan 2025

No	Provinsi /Kabupaten /Kota	2024	2025	Kelas
1	Kota Yogyakarta	0,63	0,75	Sedang
2	Kab. Sleman	0,77	0,79	Sedang
3	Kab. Bantul	0,72	0,78	Sedang
4	Kab. Kulonprogo	0,64	0,67	Sedang
5	Kab. Gunungkidul	0,77	0,81	Tinggi

Dari tabel di atas terlihat bahwa abupaten Gunungkidul memperoleh nilai IKD sebesar 0,81 dengan kategori Tinggi, menjadi satu-satunya daerah di DIY yang masuk kategori tinggi. Nilai IKD Provinsi DIY sebesar 0,75 (Sedang).

Dengan capaian 0,81, Gunungkidul berada 0,06 poin di atas rata-rata provinsi. Hal ini menunjukkan kapasitas daerah dalam mendukung urusan pemerintahan dan pelayanan publik relatif lebih kuat dibandingkan kabupaten/kota lain di DIY. Hasil penilaian ketahanan daerah kemudian ditindaklanjuti menjadi rekomendasi dan kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan daerah yang secara langsung berdampak pada penurunan resiko bencana.

Dalam menjalankan manajemen penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggunakan strategi peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana. Dalam rangka mendukung strategi tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi kebencanaan melalui berbagai media dan metode untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas.. Cakupan layanan sosialisasi, penyebaran informasi dan penyediaan sarana prasarana mitigasi kebencanaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15. Cakupan Layanan Sosialisasi, Penyebarluasan Informasi, dan Penyediaan Sarana Mitigasi Kebencanaan

No	Jenis Media/Kegiatan	Uraian	Penerima/Unit
1	Sosialisasi langsung	Sosialisasi PRB di Kalurahan Pacarejo, Semanu	3.931 orang
		Sosialisasi bencana kebakaran di 9 kalurahan	70.835 orang
		Apel Siaga Bencana	600 orang
2	Media Sosial	Facebook	1.700 orang
		Instagram	8.975 orang
		TikTok	3.232 orang
		YouTube	100 orang
3	Sarana prasarana mitigasi	Rambu Sarpras Pendukung EWS	50 unit
		KALTANA	20 unit
		SPAB	6 unit
		Gladi kesiapsiagaan	10 kegiatan

Sumber : BPBD Kabupaten Gunungkidul (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut, cakupan layanan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat diupayakan melalui:

1. Pelayanan informasi rawan bencana.
 - a. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya maupun melalui media sosial. Selain itu juga dilaksanakan sosialisasi bencana kebakaran yang dilakukan UPT Pemadam Kebakaran.
 - b. Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi

2. Pelayanan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Pada tahun 2025, Pelayanan Pencegahan dan Mitigasi Bencana di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan melalui berbagai kegiatan strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, antara lain penyelenggaraan Gladi Kesiapsiagaan Bencana di Kanigoro dan Saptosari, pelatihan relawan di Jurangjero, Ngawen, serta Pacarejo (Semanu), pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran di Kalurahan Sodo, serta pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di SD Wiloso sebagai upaya memperkuat kapasitas sekolah dalam menghadapi potensi bencana.

3. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Diwujudkan dalam kegiatan pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana dan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dengan dilibatkannya masyarakat pada Kaltana dan SPAB maka sistem penanggulangan bencana yang integratif diharapkan dapat meningkat.

- a. Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana)

Pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) di Kabupaten Gunungkidul dimulai sejak tahun anggaran 2012. Sampai dengan tahun 2025, Kaltana yang terbentuk berjumlah 90 Kalurahan, dari 144 Kalurahan. Pada Tahun Anggaran 2025, kegiatan pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana dilaksanakan di Kalurahan Jetis (Saptosari) dan Kalurahan Grogol (Paliyan).



Gambar 3.6 Pembentukan Kaltana Tahun 2025

b. Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)

Satuan Pendidikan Aman Bencana merupakan upaya pengurangan risiko bencana untuk peningkatan kapasitas satuan pendidikan guna menciptakan ekosistem pendidikan yang aman bencana. Penyelenggaraan SPAB berdasarkan pada Permendikbud RI No 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Pilar SPAB antara lain fasilitas sekolah aman bencana, manajemen bencana di sekolah, dan pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana.

Pada tahun 2025, pembentukan SPAB dilaksanakan di SD Wiloso. Capaian pembentukan SPAB di SD maupun SMP di kabupaten Gunungkidul masih tergolong sangat rendah. Dari 466 SD dan 110 SMP yang ada baru 9 SD dan 5 SMP yang sudah menyelenggarakan SPAB atau dari 576 satuan pendidikan baru 14 satuan pendidikan atau 2,43% yang menerapkan SPAB. Sedangkan SPAB yang sudah terbentuk untuk tingkat SMA sudah mencapai 24, SLB ada 5 SPANB dan 1 pondok pesantren yang terbentuk SPAB.

4. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
5. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana di Kalurahan Kanigoro, Saptosari
6. Penguatan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)

Penanganan kejadian bencana skala kalurahan yang berlokasi di kalurahan dilaksanakan pertama oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Penanganan bencana ditingkat FPRB dapat dijadikan indikator bahwa responsif penanganan bencana meningkat sehingga persentase penanganan bencana dapat maksimal.

7. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pada tahun 2025 telah terjadi 581 kejadian bencana dari total kejadian bencana tersebut telah dapat tertangani.

Tabel 3.16
Data Bencana di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No	Kapanewon	Jenis Bencana				
		Banjir	Tanah Longsor	Cuaca Ekstrim	Kebakaran Hutan dan Lahan	Kebakaran Gedung dan Permukiman
1	Gedangsari		24	9		10
2	Nglipar		11	44		3
3	Ngawen		19	21		5
4	Semin		12	37		5
5	Ponjong		11	12		1
6	Karangmojo		2	34		9
7	Semanu	3	1	31		10
8	Rongkop		3	2		1
9	Girisubo			21		
10	Tepus	1		2	1	2
11	Tanjungsari	4	3	12		2
12	Wonosari	5	2	88		12
13	Playen	3	5	20		9
14	Paliyan	4		10	1	2
15	Saptosari		3	2		
16	Purwosari		1	2		
17	Panggung		4	1		
18	Patuk		18	19		2
Jumlah		20	119	367	2	73

Sumber: BPBD Kabupaten Gunungkidul

Pada tahun 2025 musim kemarau terjadi kemarau basah, sehingga Kabupaten Gunungkidul tidak mengalami bencana kekeringan ekstrim, hanya beberapa wilayah yang mengalami kekurangan air bersih. Tahun Anggaran 2025, BPBD Kabupaten Gunungkidul melalui APBD Kabupaten Gunungkidul mengalokasikan belanja air sebanyak 1.500 tangki dan dikurangi melalui APBD Perubahan sehingga tersedia 880 tangki, terealisasi 224 tangki.

Pada tahun 2025 berdasarkan data yang dilaporkan oleh Pusdalops-PB terdapat 581 kejadian bencana. Total kerugian akibat bencana di tahun 2025 sebesar Rp 6.409.560,-, dengan total korban terdampak sebanyak 9.956 jiwa.

Selain bencana di atas, bencana lain yang sering terjadi adalah kebakaran. Peristiwa kebakaran merupakan suatu kejadian yang sering terjadi pada pemukiman warga terutama pada musim kering, terkadang kebakaran terjadi pula pada lahan kosong dan juga terjadi karena kelalaian masyarakat. Untuk penanganan kebakaran di Kabupaten Gunungkidul dilakukan oleh UPT Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Gunungkidul dan oleh relawan kebakaran dalam hal ini masyarakat. Ketersediaan sarana prasarana dan SDM pemadam kebakaran di UPT Damkarmat Gunungkidul pada tahun 2025 mengalami peningkatan meski belum sepenuhnya terpenuhi.

Pada Tahun 2025, UPT Damkarmat telah melaksanakan pelayanan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam waktu tanggap sebanyak 59 kejadian. Dari jumlah tersebut, 41 kejadian berhasil ditangani dengan waktu respons maksimal 15 menit, sesuai dengan ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran.

Selain melakukan kegiatan pemadaman kebakaran di Kabupaten Gunungkidul, UPT Pemadam Kebakaran memiliki tugas melakukan penyelamatan non kebakaran. Selama tahun 2025, kegiatan penyelamatan yang telah dilakukan sebanyak 260 kali, berupa evakuasi binatang, membantu pelepasan cacing, penyemprotan/pembersihan lapangan/lahan, maupun evakuasi pohon tumbang.



Gambar 3.7 Layanan Petugas Pemadam Kebakaran

Analisis Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan ketahanan daerah terhadap berbagai ancaman bencana, dilakukan evaluasi terhadap permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai dasar perbaikan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Hasil evaluasi menunjukkan beberapa aspek strategis yang perlu diperkuat, meliputi kebijakan dan tata kelola, perencanaan berbasis risiko, kapasitas SDM, sarana prasarana, sistem informasi, serta pemberdayaan masyarakat, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.17 Analisis Permasalahan, Arah Kebijakan, dan Dampak terhadap Ketahanan Daerah

No	Aspek	Permasalahan Utama	Arah Perbaikan	Dampak terhadap Ketahanan Daerah
1	Kebijakan dan Tata Kelola	Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas; regulasi belum lengkap; rencana kontinjensi belum menyeluruh; rehab-rekon belum terpadu.	Reviu regulasi; penyusunan rencana kontinjensi; integrasi dalam perencanaan dan penganggaran daerah.	Terbangunnya tata kelola penanggulangan bencana yang lebih terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
2	Perencanaan Berbasis Risiko	Kajian risiko belum optimal menjadi dasar pembangunan, dengan luas wilayah dan ancaman beragam.	Pemutakhiran kajian risiko dan integrasi dalam dokumen perencanaan berbasis mitigasi risiko.	Pembangunan daerah lebih adaptif terhadap risiko sehingga potensi kerugian dan dampak bencana dapat ditekan.
3	Kapasitas SDM	Keterbatasan kuantitas dan kualitas personel BPBD dan Damkar.	Penambahan personel dan peningkatan kompetensi melalui pelatihan teknis/manajerial.	Meningkatnya kesiapsiagaan dan kecepatan respons dalam penanganan keadaan darurat bencana.
4	Sarana dan Prasarana	Sarpras belum sesuai standar nasional; EWS dan peralatan damkar terbatas.	Pemenuhan sarpras berbasis prioritas risiko wilayah dan peningkatan dukungan anggaran.	Terwujudnya sistem peringatan dini dan penanganan darurat yang lebih efektif dalam mengurangi dampak bencana.
5	Sistem Informasi dan Manajemen Data	Database manual dan belum terintegrasi; logistik belum terpadu.	Pengembangan sistem informasi kebencanaan terpadu berbasis digital dan integrasi lintas sektor.	Tersedianya data kebencanaan yang akurat dan terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
6	Pemberdayaan dan Ketahanan Masyarakat	Kapasitas dan kesadaran masyarakat belum optimal (SPAB, kalurahan tangguh).	Penguatan edukasi dan pembentukan komunitas tangguh bencana serta peningkatan partisipasi masyarakat.	Meningkatnya kemandirian dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.

Pencapaian Sasaran strategis “Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat Meningkat” yang diukur dengan dua indikator kinerja sasaran Indeks Ketenteraman dan Ketertiban serta Indeks Ketahanan Daerah didukung dua program, yaitu Program Peningkatan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat dan Program Penanggulangan Bencana.

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp11.640.434.120,00 dengan realisasi sebesar Rp11.148.057.135,00 atau mencapai 95,77 persen dari total pagu anggaran. Dengan demikian terdapat selisih anggaran sebesar Rp492.376.985,00 yang menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 4,23 persen. Rincian realisasi anggaran pada masing-masing program disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.18 Realisasi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat Meningkat

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Peningkatan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	7.652.979.574	7.458.013.254	97,45	194.966.320	2,55
2.	Penanggulangan Bencana	3.987.454.546	3.690.043.881	92,53	297.410.665	7,47
	Jumlah	11.640.434.120	11.148.057.135	95,77	492.376.985	4,23

Berdasarkan tabel tersebut, Program Peningkatan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat memiliki pagu anggaran sebesar Rp7.652.979.574,00 dengan realisasi Rp7.458.013.254,00 atau mencapai 97,45 persen, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp194.966.320,00 dengan tingkat efisiensi sebesar 2,55 persen. Sementara itu, Program Penanggulangan Bencana memiliki pagu anggaran sebesar Rp3.987.454.546,00 dengan realisasi Rp3.690.043.881,00 atau mencapai 92,53 persen, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp297.410.665,00 dengan tingkat efisiensi sebesar 7,47 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kedua program memiliki tingkat penyerapan anggaran yang tinggi dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kedua program tersebut menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilakukan secara efektif serta didukung oleh perencanaan kegiatan yang tepat sasaran dalam rangka mendukung penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan penanggulangan bencana di daerah.

Tujuan 2: Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten menetapkan misi “Meningkatkan Pembangunan Manusia dan Keunggulan Potensi Daerah”. Misi ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas dan kualitas manusia melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pengembangan potensi daerah sehingga masyarakat memiliki kemampuan, daya saing, dan produktivitas yang lebih baik dalam mendukung pembangunan daerah.

Untuk mendukung pencapaian misi tersebut, ditetapkan tujuan pembangunan daerah yaitu “Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”. Pencapaian tujuan ini diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2026. IPM merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah melalui tiga dimensi dasar kualitas hidup.

Dimensi pertama adalah umur panjang dan hidup sehat, yang diukur melalui indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). UHH menggambarkan rata-rata perkiraan lamanya seseorang dapat hidup sejak lahir, sehingga mencerminkan kondisi kesehatan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

Dimensi kedua adalah pengetahuan, yang diukur melalui dua indikator yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara itu, HLS menggambarkan lamanya pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak pada usia tertentu di masa yang akan datang.

Dimensi ketiga adalah standar hidup layak, yang diukur melalui indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Indikator ini mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Nilai IPM diperoleh dari penghitungan rata-rata geometrik indeks pada ketiga dimensi tersebut, yaitu indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan

indeks pengeluaran. Berdasarkan nilai IPM yang diperoleh, capaian pembangunan manusia di suatu wilayah dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu:

- Sangat Tinggi : $IPM \geq 80$
- Tinggi : $70 \leq IPM < 80$
- Sedang : $60 \leq IPM < 70$
- Rendah : $IPM < 60$

Pemerintah Kabupaten menargetkan peningkatan IPM dari 69,98 pada tahun 2020 menjadi 75 pada tahun 2026. Berdasarkan publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 5 November 2025, nilai IPM Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar 73,13

Untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembangunan daerah serta posisi pencapaian indikator terhadap target akhir yang telah ditetapkan, dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan target yang ditetapkan pada tahun 2026 sebagai tahun terakhir periode RPJMD 2021–2026. Adapun capaian kinerja tujuan “Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas” tahun 2025 terhadap target tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.19 Capaian IPM 2025 terhadap Target Tahun Akhir RPJMD 2021-2026

Tujuan	Indikator	Realisasi 2025	Target 2026 (Akhir RPJMD)	Capaian 2025 terhadap 2026 (%)
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2026	73,13	75,00	97,51

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 sebesar 73,13, sedangkan target IPM pada tahun 2026 sebagai tahun terakhir periode RPJMD 2021–2026 ditetapkan sebesar

75,00. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD telah mencapai 97,51%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pembangunan manusia di daerah telah berada pada jalur yang tepat dan semakin mendekati target yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD. Selisih yang masih perlu dicapai untuk memenuhi target tahun 2026 adalah sebesar 1,87 poin IPM.

Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, serta peningkatan standar hidup masyarakat, telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap peningkatan IPM. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap perlu mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan manusia agar peningkatan IPM dapat terus berlanjut dan target yang telah ditetapkan pada tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.

Dalam rangka memperkuat pencapaian tujuan pembangunan manusia, Pemerintah Kabupaten menetapkan dua sasaran yang berperan dalam mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia di daerah.

Sasaran pertama adalah “Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkat” yang diukur melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator ini sama dengan indikator pada tujuan pembangunan daerah, namun pada tingkat sasaran ditetapkan target capaian setiap tahun selama periode RPJMD sebagai tahapan untuk mencapai target akhir pada tahun 2026 yang merupakan tahun terakhir RPJMD. Penetapan target tahunan ini dimaksudkan untuk memantau perkembangan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara bertahap dari tahun ke tahun.

Sasaran kedua adalah “Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun” sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia. Sasaran ini diukur melalui indikator persentase angka kemiskinan dan angka pengangguran, yang mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi

kebutuhan dasar serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Dengan adanya kedua sasaran tersebut, pencapaian tujuan pembangunan manusia diharapkan dapat terwujud secara lebih optimal melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, capaian kinerja dari masing-masing sasaran tersebut beserta faktor pengungkit, hambatan yang dihadapi, serta strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah ditetapkan diuraikan pada analisis sasaran berikut:

Sasaran 3: Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan

Sasaran strategis **Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan** merupakan salah satu upaya untuk mendukung pencapaian Misi 2 dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah”, dengan tujuan “Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas.”

Capaian sasaran Derajat Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan diukur menggunakan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul termasuk dalam kategori tinggi yang menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak telah berada pada tingkat yang relatif baik.

Tabel 3.20
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori	Target 2026 (Akhir RPJMD)	Capaian 2025 terhadap 2026 (%)
Indeks Pembangunan Manusia	72,54	73,13	100,81	Sangat tinggi	75,00	97,51

Pada tahun 2025, target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam RPJMD ditetapkan sebesar 74. Namun demikian, dalam RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 target IPM disesuaikan pada rentang 72,54–73,53. Berdasarkan rentang tersebut, target yang digunakan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2025 ditetapkan sebesar 72,54. Dengan realisasi IPM tahun 2025 sebesar 73,13, maka capaian kinerja pada sasaran kapasitas sumber daya manusia meningkat mencapai 100,81%, sehingga termasuk dalam kategori sangat tinggi. Realisasi tersebut juga menunjukkan bahwa kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

Secara umum, perkembangan nilai IPM Kabupaten Gunungkidul menunjukkan pola semakin meningkat. Peningkatan ini menggambarkan kualitas Pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul semakin membaik.

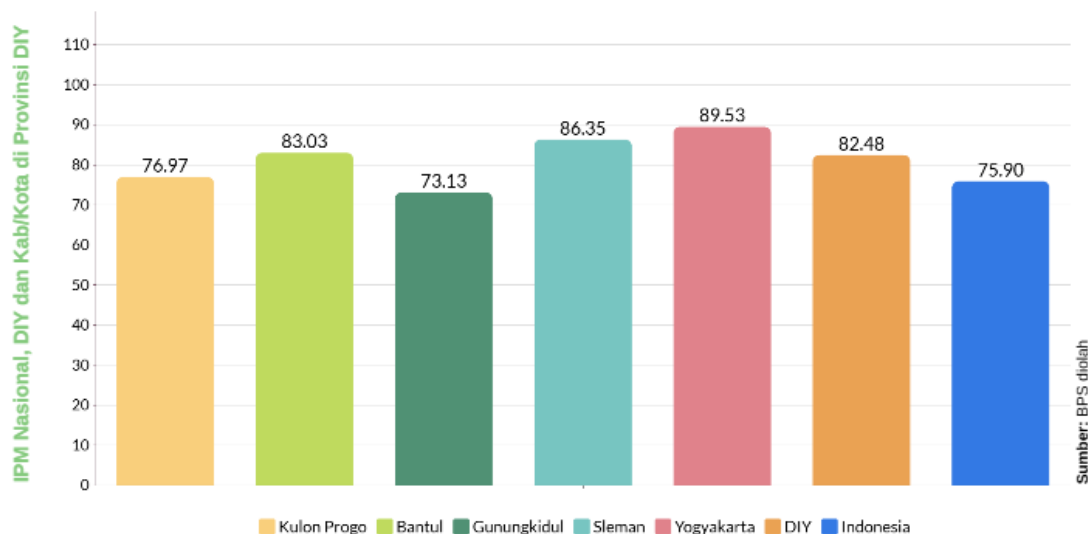


Gambar 3.8 Capaian IPM Tahun 2015-2025

Grafik di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunungkidul selama periode 2015–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 nilai IPM tercatat sebesar 67,14 dan terus meningkat hingga mencapai 73,13 pada tahun 2025. Dengan demikian, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir IPM Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan sebesar 5,99 poin. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya perbaikan pada

berbagai dimensi pembangunan manusia, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Apabila dilihat dari dinamika pertumbuhannya, kenaikan tertinggi terjadi pada periode 2024–2025 dengan peningkatan sebesar 0,99 poin, yang merupakan peningkatan terbesar selama periode pengamatan. Kondisi ini menunjukkan adanya percepatan peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu terus diperkuat agar capaian IPM Kabupaten Gunungkidul dapat semakin meningkat dan kesenjangan dengan wilayah lain dapat semakin diperkecil.

Meskipun mengalami perkembangan yang baik, angka IPM Gunungkidul masih tertinggal dibanding dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional tahun 2025 yang mencapai 75,90 dan juga tertinggal dari kabupaten/kota di Provinsi DIY. Perbandingan capaian IPM dari kabupaten/kota se-DIY, provinsi dan nasional ditunjukkan dalam grafik berikut:



Gambar 3.9 Perbandingan IPM Gunungkidul dengan IPM Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY

Grafik di atas menunjukkan bahwa ilai IPM Kabupaten Gunungkidul masih lebih rendah dari IPM Nasional, dan berada di posisi terendah jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun berada pada

level yang lebih rendah, apabila dilihat dari pertumbuhan IPM tahun 2025 dibandingkan tahun 2024, Kabupaten Gunungkidul menunjukkan pertumbuhan tertinggi di antara kabupaten/kota di DIY, bahkan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan rata-rata IPM provinsi maupun nasional. Perbandingan perkembangan nilai IPM kabupaten/kota di DIY serta provinsi dan nasional selama periode 2021–2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.21 Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota, Provinsi DIY, dan Nasional Tahun 2021–2025

Wilayah	2021	2022	2023	2024	2025	Pertumbuhan 2024–2025	Pertumbuhan 2021–2025
Kulon Progo	74,71	75,46	75,82	76,18	76,97	0,79	2,26
Bantul	80,28	80,69	81,74	82,05	83,03	0,98	2,75
Gunungkidul	70,16	70,96	71,46	72,14	73,13	0,99	2,97
Sleman	84,00	84,31	84,86	85,71	86,35	0,64	2,35
Kota Yogyakarta	87,18	87,69	88,61	89,10	89,53	0,43	2,35
D.I. Yogyakarta	80,22	80,65	81,09	81,62	82,48	0,86	2,26
Indonesia	73,16	73,77	74,39	75,02	75,90	0,88	2,74

Sumber : BPS (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunungkidul dalam lima tahun terakhir, menunjukkan tren peningkatan yang konsisten meskipun tingkat capaian IPM masih berada di bawah rata-rata kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta serta rata-rata provinsi dan nasional.

Meskipun nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunungkidul masih berada pada level terendah di antara kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, laju peningkatannya menunjukkan perkembangan yang relatif lebih cepat. Pada tahun 2025, IPM Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar 73,13, meningkat 0,99 poin dibandingkan tahun 2024. Peningkatan ini merupakan yang tertinggi di antara kabupaten/kota di DIY serta lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan IPM Provinsi DIY yang sebesar 0,86 poin dan nasional sebesar 0,88 poin.

Dalam periode lima tahun terakhir (2021–2025), IPM Kabupaten Gunungkidul juga menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 70,16 pada tahun 2021 menjadi 73,13 pada tahun 2025 atau meningkat

sebesar 2,97 poin. Peningkatan tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan IPM Provinsi DIY yang naik sebesar 2,26 poin serta IPM nasional yang meningkat sebesar 2,74 poin pada periode yang sama.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat capaian IPM Kabupaten Gunungkidul masih berada di bawah rata-rata provinsi (82,48) maupun nasional (75,90), pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan tren percepatan peningkatan baik dalam jangka pendek maupun dalam lima tahun terakhir.

Kenaikan nilai IPM tidak terlepas dari kenaikan empat komponen indikator pembentuk IPM, yaitu: Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Konsumsi Riil Perkapita disesuaikan. Capaian dari empat komponen pembentuk IPM Kabupaten Gunungkidul ditunjukkan dalam grafik berikut:



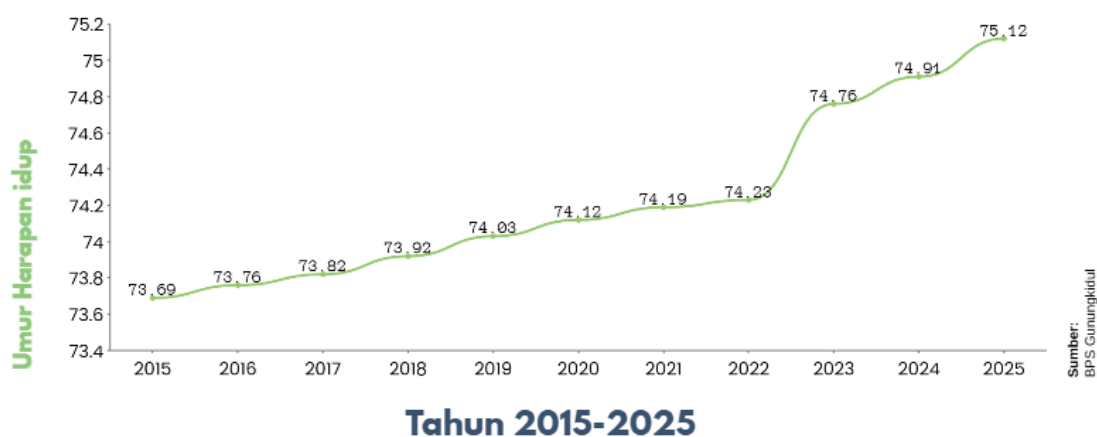
Gambar 3.10 Capaian Empat Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja dari 4 (empat) komponen indikator pembentuk IPM Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 .

Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

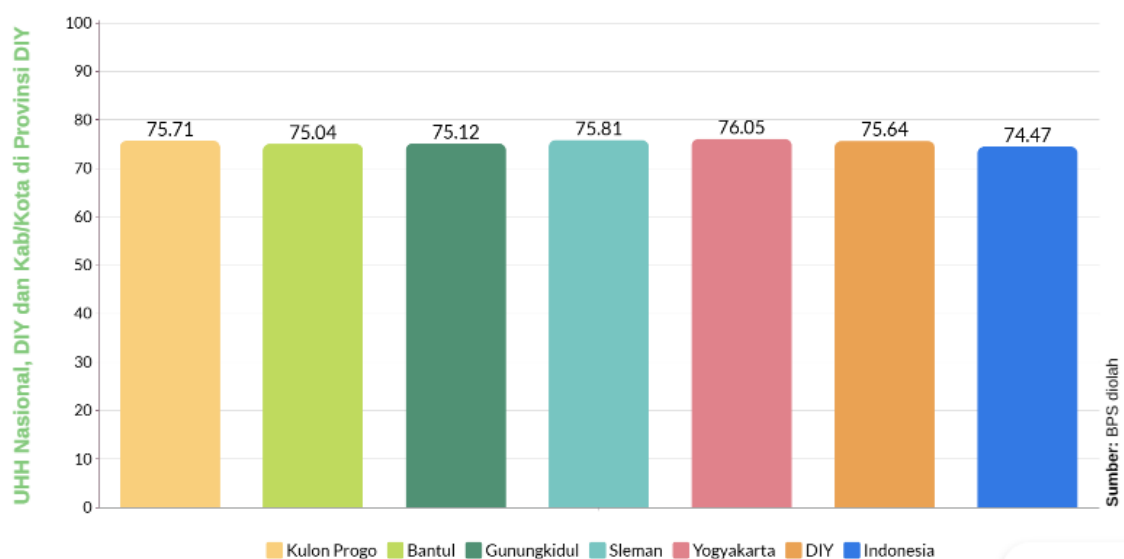
Dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) direpresentasikan melalui indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). UHH Kabupaten Gunungkidul menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari 73,69 tahun pada tahun 2015 menjadi 75,12 tahun pada tahun 2025. Nilai tersebut menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh bayi yang lahir hidup pada tahun 2025 hingga akhir hayatnya, dengan asumsi pola kematian menurut umur pada saat kelahiran tetap sepanjang hidupnya. Dengan demikian, bayi yang lahir di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 diperkirakan memiliki harapan hidup hingga 75,12 tahun (BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunungkidul 2025).

Pada tahun 2025, capaian UHH tercatat 75,12 tahun, meningkat 0,21 tahun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 74,91 tahun. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan pada aspek kesehatan masyarakat yang berkontribusi terhadap meningkatnya harapan hidup penduduk di Kabupaten Gunungkidul.



Gambar 3.11 Umur Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2025

Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 sebesar 75,12 tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan UHH nasional yang mencapai 74,47 tahun, serta mendekati capaian UHH Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 75,64 tahun. Di tingkat kabupaten/kota di DIY, capaian UHH Kabupaten Gunungkidul juga berada di atas Kabupaten Bantul yang sebesar 75,04 tahun. Perbandingan capaian UHH tingkat nasional, Provinsi DIY, serta lima kabupaten/kota di DIY pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.



Gambar 3.12 Perbandingan UHH Gunungkidul dengan UHH Nasional, Provinsi DIY dan Kabupaten/Kota di DIY

Peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan adanya perbaikan derajat kesehatan masyarakat yang terus diupayakan dari tahun ke tahun. Secara umum, peningkatan UHH menggambarkan semakin baiknya kualitas kesehatan penduduk. Kondisi ini didukung oleh ketersediaan infrastruktur kesehatan yang semakin memadai, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, serta dukungan tenaga kesehatan yang semakin berkualitas. Berbagai fasilitas kesehatan seperti rumah sakit negeri maupun swasta, balai atau klinik pengobatan, serta Puskesmas telah tersedia untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Di samping itu, Puskesmas pembantu (Pustu) juga telah dikembangkan hingga menjangkau sebagian wilayah padukuhan, meskipun ketersediaannya belum merata di

seluruh padukuhan. Selain itu, Dinas Kesehatan bersama perangkat daerah terkait dan organisasi kemasyarakatan juga aktif melakukan sosialisasi dan pembinaan pola hidup sehat kepada masyarakat.

Secara umum, derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Gunungkidul dapat dikatakan cukup baik. Hal ini tercermin dari tidak ditemukannya kasus kesehatan yang menonjol seperti gizi buruk maupun kematian akibat Kejadian Luar Biasa (KLB) dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu faktor yang mempengaruhi capaian UHH adalah Angka Kematian Ibu (AKI), yaitu jumlah kematian ibu yang terjadi selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Perkembangan AKI di Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu 2014–2025 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Data historis perkembangan AKI tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3.13 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2025

Pada tahun 2025, jumlah kasus kematian ibu tercatat sebanyak 5 kasus yang tersebar di lima kapanewon, yaitu Gedangsari, Tepus, Paliyan, Semanu, dan Semin.

Selain AKI, faktor lain yang mempengaruhi capaian UHH adalah Angka Kematian Bayi (AKB). Perkembangan AKB di Kabupaten Gunungkidul selama

periode 2015–2025 juga menunjukkan pola yang fluktuatif sebagaimana disajikan pada grafik berikut.



Gambar 3.14 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2025

Jumlah kasus kematian bayi pada tahun 2023 tercatat sebanyak 71 kasus, kemudian menurun pada tahun 2024 menjadi 68 kasus, dan kembali menurun pada tahun 2025 menjadi 50 kasus. Kasus kematian bayi tersebut tersebar di hampir seluruh kapanewon, kecuali Rongkop, Karangmojo, Tepus, Paliyan, dan Saptosari.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus berupaya menekan angka kematian ibu dan bayi melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir. Pada tahun 2025, capaian pelayanan kesehatan ibu hamil tercatat sebesar 96,1%, pelayanan kesehatan ibu bersalin 100%, dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 91,89% (LKJIP Dinas Kesehatan, 2025). Selain itu, inovasi pelayanan kesehatan juga dikembangkan oleh RSUD Wonosari, antara lain melalui kegiatan senam ibu hamil, seminar kesehatan ibu hamil, layanan Paket Persalinan Normal Ibu Hamil dengan Bidan (*Parsel Budebi*), yaitu layanan persalinan normal dengan fasilitas rumah sakit, serta kelas ibu hamil sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kesehatan ibu selama masa kehamilan.



Gambar 3.15

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Selain itu, peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga didukung oleh upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui penguatan kualitas fasilitas kesehatan. Pada tahun 2025, RSUD Wonosari berhasil mempertahankan akreditasi tingkat Paripurna yang telah diraih selama tiga kali berturut-turut, sementara RSUD Saptosari meraih akreditasi Paripurna untuk kedua kalinya. Di tingkat layanan primer, sebanyak 28 dari 30 Puskesmas di Kabupaten Gunungkidul juga telah terakreditasi Paripurna, sehingga hingga tahun 2024 persentase fasilitas kesehatan pemerintah yang terakreditasi Paripurna mencapai 93,75%.

Perkembangan angka harapan hidup tidak hanya dipengaruhi oleh keberhasilan penurunan angka kematian ibu dan bayi, tetapi juga oleh kualitas kesehatan penduduk sejak tahap awal siklus kehidupan. Oleh karena itu, peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu didukung

melalui intervensi yang lebih komprehensif pada aspek pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga, termasuk peningkatan kesehatan remaja sebagai calon orang tua, serta penguatan program keluarga berencana, serta upaya pencegahan stunting sejak dini.

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.. Melalui pengendalian angka kelahiran dan peningkatan kualitas keluarga, setiap keluarga diharapkan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anggota keluarga, sehingga pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia secara berkelanjutan.

Kinerja pengendalian angka kelahiran diukur melalui indikator *Total Fertility Rate* (TFR). Pada tahun 2025 nilai TFR Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar 1,90 dari target 1,91, sehingga target indikator belum sepenuhnya tercapai meskipun selisihnya relatif kecil. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 1,89, nilai TFR tahun 2025 mengalami sedikit peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa angka kelahiran masih berada pada kisaran yang relatif terkendali, namun terdapat kecenderungan peningkatan yang perlu menjadi perhatian dalam menjaga pengendalian kelahiran.

Capaian kinerja pengendalian penduduk didukung oleh PUS yang menjadi peserta KB aktif meningkat dengan indikator Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif. Pada tahun 2025 jumlah PUS di Kabupaten Gunungkidul tercatat sebanyak 105.033 pasangan, dengan 67.879 akseptor kontrasepsi modern. Realisasi persentase PUS peserta KB aktif sebesar 64,63% dari target 78,16%, atau tingkat capaian 82,69%. Hasil ini menunjukkan bahwa partisipasi PUS dalam penggunaan kontrasepsi modern masih belum optimal sehingga berpengaruh terhadap capaian pengendalian angka kelahiran. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain masih adanya pernikahan pada usia muda, rendahnya kesadaran penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), serta keterbatasan jumlah Petugas Lapangan KB (PLKB) dibandingkan dengan jumlah desa yang harus didampingi.

Sebagai tindak lanjut, dilakukan penguatan sosialisasi dan edukasi penggunaan kontrasepsi khususnya MKJP, peningkatan koordinasi dengan BKKBN Perwakilan DIY terkait pemenuhan dan penguatan peran PLKB. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan partisipasi PUS dalam penggunaan kontrasepsi modern sehingga pengendalian angka kelahiran dapat lebih optimal serta mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul juga difokuskan pada pencegahan dan penanganan stunting. Stunting (pendek dan sangat pendek) merupakan kondisi kekurangan gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan standar pertumbuhan anak dari WHO tahun 2005. Kondisi ini mencerminkan masalah gizi yang terjadi dalam jangka panjang dan dapat berdampak pada pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta meningkatkan risiko kesakitan dan kematian pada anak.

Berdasarkan data tahun 2025, prevalensi stunting di Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar 15,34 persen, yang berasal dari 4.589 balita stunting dari total 29.908 balita yang tersebar di seluruh kapanewon. Capaian ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam upaya penurunan stunting, mengingat prevalensi tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 14,35 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya percepatan penurunan stunting perlu terus diperkuat melalui intervensi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi masih tingginya prevalensi stunting antara lain kondisi gizi ibu sebelum dan selama kehamilan, praktik pemberian makan pada bayi dan anak yang belum optimal, kondisi sanitasi dan lingkungan yang belum memadai, serta faktor sosial ekonomi keluarga. Selain itu, kejadian anemia pada remaja putri dan ibu hamil serta kasus kekurangan energi kronis (KEK) pada ibu juga dapat meningkatkan risiko stunting pada anak.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat intervensi pencegahan stunting, khususnya melalui pendekatan hulu. Salah satunya adalah pelaksanaan konseling bagi calon pengantin melalui aplikasi Elsimil yang bertujuan untuk memastikan kesiapan kesehatan calon pasangan sebelum memasuki masa kehamilan. Selain itu, juga dilaksanakan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam memberikan dukungan pemenuhan gizi dan pendampingan bagi keluarga berisiko stunting di seluruh kapanewon.

Melalui penguatan intervensi spesifik dan sensitif secara terpadu, peningkatan edukasi masyarakat terkait gizi dan kesehatan ibu-anak, serta dukungan lintas sektor, diharapkan prevalensi stunting di Kabupaten Gunungkidul dapat terus ditekan sehingga kualitas kesehatan dan sumber daya manusia pada masa mendatang semakin meningkat.

Tabel 3.22 Analisis Faktor Penghambat, Upaya dan Arah Perbaikan, dan Dampak Peningkatan Akseibilitas dan Kualitas Kesehatan

Aspek	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya dan Arah Perbaikan	Dampak yang Diharapkan
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Program pelayanan kesehatan ibu dan anak, cakupan pelayanan maternal relatif baik, peningkatan perawatan neonatal esensial, serta ketersediaan tenaga kesehatan dan layanan spesialisik di RS rujukan	Belum optimalnya kualitas dan kesinambungan pelayanan kesehatan ibu dan bayi dari masa kehamilan hingga pascapersalinan, masih tingginya ibu hamil risiko tinggi (hipertensi, obesitas, grande multipara, gangguan kejiwaan), serta pemantauan ibu nifas di rumah yang belum optimal	Penguatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui skrining kesehatan ibu hamil, peningkatan pemantauan masa nifas, deteksi dini risiko kehamilan dan neonatal, serta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi serta penurunan risiko komplikasi dan kematian ibu dan bayi

Aspek	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya dan Arah Perbaikan	Dampak yang Diharapkan
Pelayanan Kesehatan Rujukan	Keberadaan RSUD, jejaring fasilitas kesehatan dasar, sistem Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons (AMP-SR), serta jejaring rujukan maternal dan neonatal	Keterbatasan rumah sakit yang mampu menangani neonatal risiko tinggi, kesiapan rujukan terencana belum optimal, serta integrasi layanan kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang masih terbatas	Peningkatan kapasitas layanan kesehatan rujukan, penguatan sistem rujukan maternal dan neonatal, serta integrasi layanan kesehatan jiwa dalam pelayanan kesehatan dasar	Pelayanan rujukan kesehatan lebih optimal dan penanganan kasus risiko tinggi menjadi lebih cepat dan tepat
Kondisi Kesehatan Ibu dan Bayi	Peningkatan penanganan kasus bayi berat badan lahir rendah (BBLR) dan prematur serta optimalisasi pelayanan kesehatan ibu dan bayi	Tingginya risiko komplikasi pada masa kehamilan dan persalinan, adanya penyakit penyerta pada ibu, serta kondisi bayi baru lahir seperti BBLR dan prematuritas	Penguatan deteksi dini dan tata laksana kasus risiko tinggi pada ibu hamil dan bayi melalui pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berkesinambungan	Penurunan risiko komplikasi pada ibu dan bayi serta peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak
Perilaku dan Sosial Masyarakat	Program edukasi kesehatan bagi remaja, calon pengantin, ibu hamil dan keluarga, serta kegiatan kesehatan remaja di sekolah	Rendahnya pemberian ASI eksklusif, pemberian MPASI yang belum optimal, stigma terhadap gangguan kesehatan jiwa, serta perilaku merokok di dekat balita	Penguatan promosi kesehatan dan edukasi masyarakat terkait kesehatan ibu dan anak, pemberian ASI eksklusif, pola asuh dan gizi anak, serta peningkatan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat	Meningkatnya kesadaran dan perilaku hidup sehat masyarakat dalam mendukung kesehatan ibu dan anak
Pengendalian Angka Kelahiran dan Program Keluarga Berencana	Dukungan program KB dari pemerintah, ketersediaan layanan kontrasepsi di fasilitas kesehatan, serta konseling calon	Masih adanya pernikahan usia muda, rendahnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), serta keterbatasan jumlah petugas lapangan KB (PLKB)	Meningkatkan sosialisasi penggunaan kontrasepsi terutama MKJP, memperkuat koordinasi dengan BKKBN untuk penguatan peran PLKB, serta	Meningkatnya penggunaan kontrasepsi oleh pasangan usia subur dan pengendalian angka kelahiran yang lebih baik

Aspek	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya dan Arah Perbaikan	Dampak yang Diharapkan
	pengantin melalui aplikasi Elsimil		meningkatkan konseling kesehatan dan kesiapan reproduksi bagi calon pengantin	
Perbaikan Gizi Masyarakat dan Lingkungan	Program pemberian makanan tambahan (PMT), pemberian tablet tambah darah, pemantauan status gizi masyarakat, serta peningkatan akses sanitasi dan air bersih	Kemiskinan yang mempengaruhi kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan gizi anak, kasus gizi kurang, anemia dan KEK pada ibu hamil, serta higiene dan sanitasi lingkungan yang belum memadai	Penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif melalui pemberian PMT bagi balita bermasalah gizi dan ibu hamil KEK, peningkatan pemantauan status gizi, serta perbaikan sanitasi lingkungan	Perbaikan status gizi ibu dan anak serta penurunan risiko stunting
Pencegahan dan Penanganan Stunting	Komitmen pemerintah daerah dalam percepatan penurunan stunting, pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) di seluruh kapanewon, serta dukungan intervensi gizi spesifik dan sensitif lintas sektor	Masih adanya balita stunting yang tersebar di seluruh kapanewon, kondisi gizi ibu sebelum dan selama kehamilan yang belum optimal, praktik pemberian makan bayi dan anak yang belum sesuai, serta faktor sosial ekonomi keluarga	Penguatan pendampingan keluarga berisiko stunting, peningkatan pemantauan pertumbuhan balita, penguatan intervensi gizi pada ibu hamil dan balita, serta peningkatan koordinasi lintas sektor melalui pelaksanaan program GENTING	Penurunan prevalensi stunting, peningkatan kualitas pertumbuhan dan perkembangan anak, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang

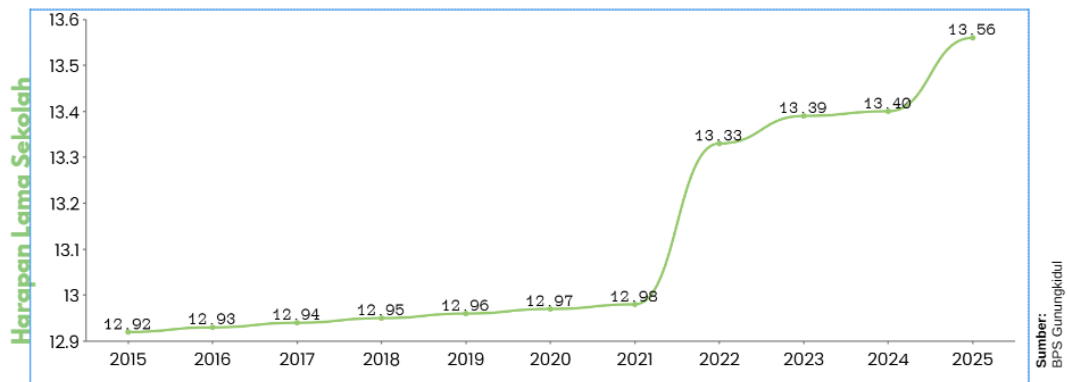
Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang menggambarkan lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan ditempuh oleh seorang anak pada usia tertentu di masa mendatang. Perhitungan HLS didasarkan pada asumsi bahwa peluang anak untuk tetap bersekolah pada usia-usia berikutnya sama dengan peluang penduduk yang sedang bersekolah pada usia yang sama saat ini. Indikator ini dihitung untuk penduduk usia 7 tahun ke atas dan digunakan untuk menggambarkan kondisi pembangunan pendidikan, khususnya terkait peluang penduduk dalam mengakses pendidikan pada berbagai jenjang.

Nilai HLS menunjukkan lamanya pendidikan formal yang diharapkan dapat ditempuh oleh seorang anak apabila pola partisipasi sekolah pada saat ini tetap berlangsung. Semakin tinggi nilai HLS, semakin besar peluang anak untuk mengenyam pendidikan yang lebih lama.

Pada tahun 2025, angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar 13,56 tahun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa anak yang berusia 7 tahun atau yang baru memasuki Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Gunungkidul memiliki harapan untuk menempuh pendidikan formal selama 13,56 tahun atau hampir setara dengan lama pendidikan hingga setingkat Diploma II. Capaian ini mencerminkan semakin terbukanya akses masyarakat terhadap pendidikan serta meningkatnya partisipasi sekolah pada berbagai jenjang pendidikan.

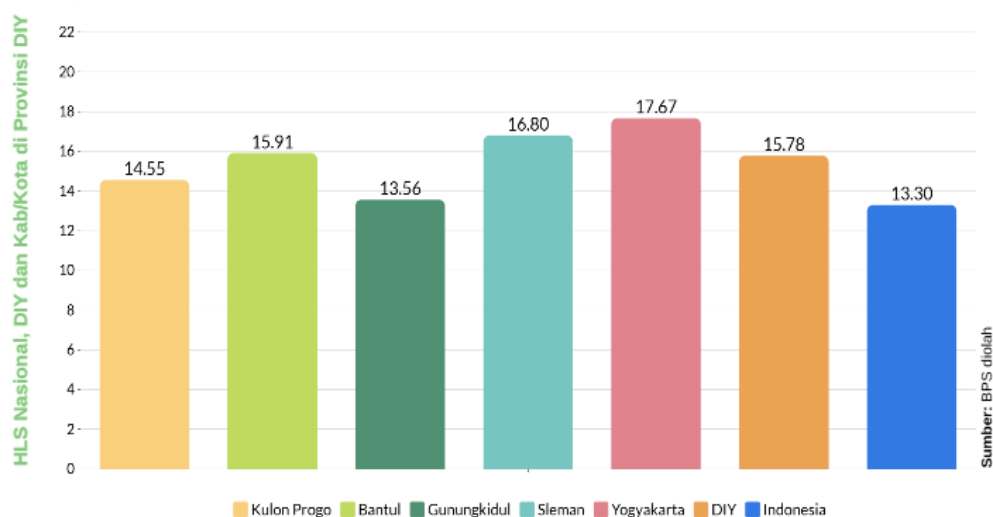
Perkembangan angka HLS Kabupaten Gunungkidul selama periode 2015–2025 menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam akses dan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Perkembangan angka HLS Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3.16 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2025

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi Gunungkidul Dalam Angka 2026, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk Indonesia usia 7 tahun pada tahun 2025 tercatat sebesar 13,30 tahun. Sementara itu, HLS Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 mencapai 13,56 tahun, sehingga berada di atas capaian nasional. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), nilai HLS Kabupaten Gunungkidul masih merupakan yang terendah di antara lima kabupaten/kota di DIY.

Perbandingan capaian HLS Kabupaten Gunungkidul dengan capaian HLS kabupaten/kota lain di DIY dan nasional tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.17 Perbandingan HLS Gunungkidul dengan HLS Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY

Dari gambar tersebut terlihat bahwa nilai Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Gunungkidul masih berada di bawah rata-rata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mencapai 15,78 tahun. Selain itu, apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di DIY, capaian HLS Kabupaten Gunungkidul juga merupakan yang terendah.

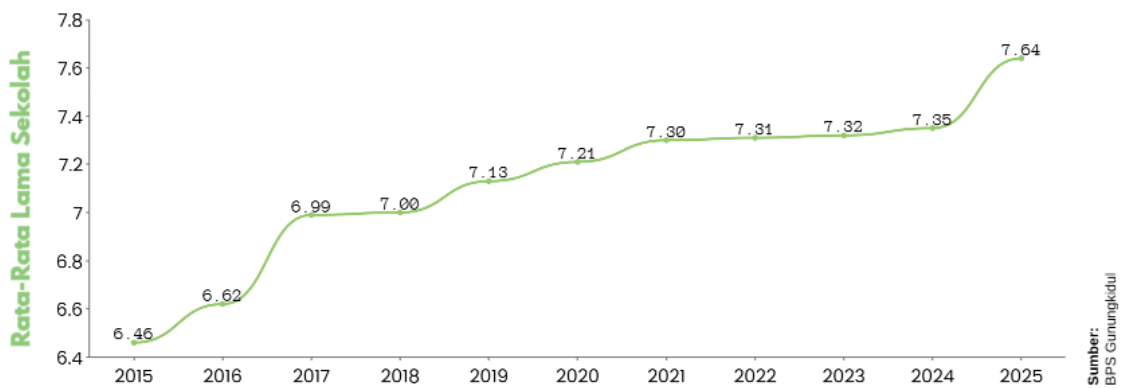
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan di Kabupaten Gunungkidul terus mengalami perbaikan, peluang penduduk untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi masih relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain di DIY. Oleh karena itu, peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, masih menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Gunungkidul.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat capaian pendidikan penduduk dalam suatu wilayah serta mencerminkan kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan.

Pada tahun 2025, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar 7,64 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Gunungkidul menempuh pendidikan formal selama 7,64 tahun, atau setara dengan pendidikan hingga sekitar kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk belum menyelesaikan pendidikan pada jenjang menengah pertama secara penuh.

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gunungkidul selama periode 2015–2025 menunjukkan adanya peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun. Tren perkembangan RLS Kabupaten Gunungkidul tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.

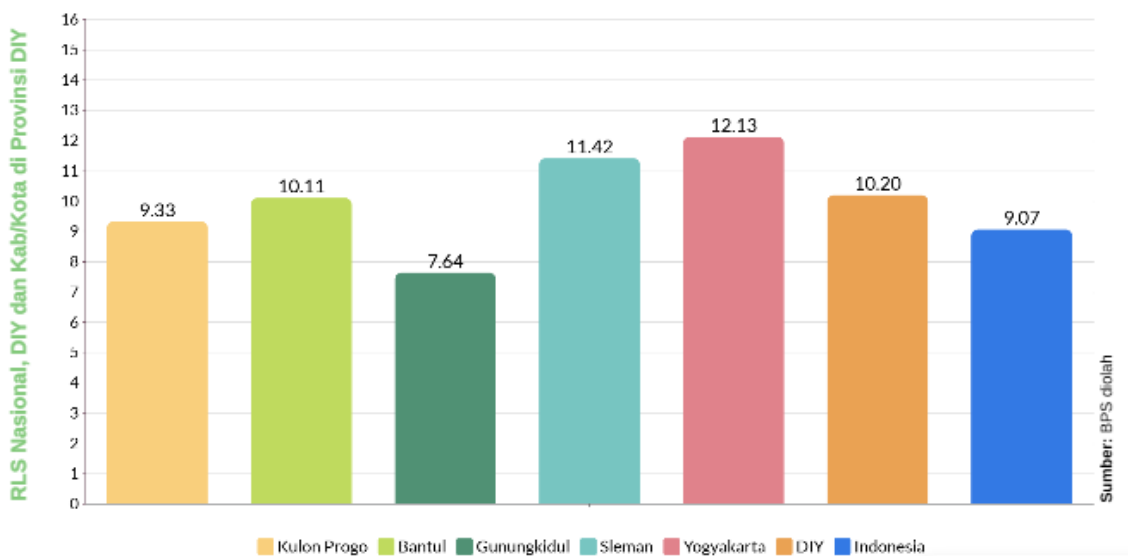


Tahun 2015-2025

Gambar 3.18 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2025

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Indonesia pada tahun 2025 tercatat sebesar 9,07 tahun. Dengan demikian, capaian RLS Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 yang sebesar 7,64 tahun masih berada di bawah rata-rata nasional. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), nilai RLS Kabupaten Gunungkidul juga merupakan yang terendah.

Perbandingan capaian Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gunungkidul dengan kabupaten/kota lain di DIY serta dengan capaian nasional pada tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.19 Perbandingan RLS Gunungkidul dengan RLS Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY

Berdasarkan grafik Rata-rata Lama Sekolah (RLS) kabupaten/kota di Provinsi DIY, terlihat adanya perbedaan tingkat capaian pendidikan antar wilayah. Nilai RLS Kabupaten Gunungkidul sebesar 7,64 tahun berada di bawah capaian kabupaten/kota di DIY, capaian ini rata-rata Provinsi DIY (10,20 tahun) dan juga lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional Indonesia (9,07 tahun). Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Gunungkidul menempuh pendidikan hingga sekitar kelas VII–VIII SMP, sehingga masih terdapat kesenjangan dibandingkan daerah lain di DIY.

Selisih capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Gunungkidul yang masih cukup besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan bahwa sektor pendidikan masih menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan capaian pada dimensi pengetahuan, diperlukan perluasan program pendidikan yang mampu menjangkau seluruh wilayah sehingga tidak ada masyarakat yang menunda bersekolah ataupun mengalami putus sekolah. Selain itu, perlu diberikan kesempatan yang lebih luas, terutama bagi masyarakat dari kelompok berpendapatan menengah ke bawah, agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pengelolaan pendidikan dari tingkat PAUD hingga SMP di Kabupaten Gunungkidul masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kondisi geografis wilayah yang luas dan didominasi daerah perbukitan, sehingga mempengaruhi kemudahan akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian penduduk, khususnya yang tinggal di wilayah terpencil, menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan, terutama pada jenjang SMA dan pendidikan yang lebih tinggi, mengingat ketersediaan dan persebaran infrastruktur pendidikan pada jenjang tersebut belum sepenuhnya merata.

Dalam rangka mendukung akses pendidikan bagi anak sekolah dari kelompok rentan dan keluarga fakir miskin, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

pada tahun 2025 telah merealisasikan bantuan biaya personal peserta didik dengan rincian sebagai berikut::

- Peserta Didik SD sebanyak 178 siswa sebesar Rp 89.000.000
- Peserta Didik SMP sebanyak 340 siswa sebesar Rp 170.000.000
- Peserta Didik PAUD sebanyak 157 siswa sebesar Rp 78.500.000
- Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan sebanyak 79 orang sebesar Rp25.000.000

Selain dukungan pembiayaan pendidikan, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan akses menuju fasilitas pendidikan melalui penyediaan layanan angkutan sekolah gratis melalui inovasi Sistem Transportasi Bus Sekolah Ramah Anak (SiBONA). Program ini didukung oleh 7 unit bus sekolah yang melayani keberangkatan dan kepulangan siswa secara gratis. Salah satu bus juga dirancang secara khusus untuk melayani siswa penyandang disabilitas, sehingga diharapkan dapat memperluas akses pendidikan yang inklusif bagi seluruh masyarakat.



Gambar 3.20 Sistem Transportasi Bus Sekolah Ramah Anak

Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang belum optimal juga dipengaruhi oleh struktur demografi penduduk. Kelompok penduduk usia tua sebagian besar menempuh pendidikan pada masa ketika akses pendidikan masih terbatas, sehingga banyak yang hanya menamatkan pendidikan di bawah jenjang Sekolah Dasar, bahkan tidak sedikit yang tidak tamat SD atau tidak pernah bersekolah. Kondisi ini merupakan hasil dari proses pendidikan

beberapa dekade sebelumnya yang secara statistik masih mempengaruhi nilai rata-rata lama sekolah saat ini. Secara alamiah, populasi tersebut akan berkurang seiring waktu, sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan RLS secara bertahap.

Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan keterampilan melalui pendidikan nonformal, seperti kegiatan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) serta berbagai program kursus dan pelatihan bagi warga belajar yang putus sekolah, termasuk bagi mereka yang telah berumah tangga dan tidak mengikuti program pendidikan kesetaraan.

Selain faktor akses pendidikan dan kondisi demografi, capaian RLS juga dipengaruhi oleh mobilitas penduduk. Sebagian penduduk yang telah menempuh pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi memilih untuk bermigrasi ke daerah lain untuk mencari peluang pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Fenomena migrasi ini secara tidak langsung mempengaruhi tingkat stok modal manusia di daerah, khususnya dalam perhitungan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 3.23 Analisis Faktor Penghambat, Upaya dan Arah Perbaikan, dan Dampak Peningkatan Akseibilitas Pendidikan

No	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Upaya dan Arah Perbaikan	Dampak yang Diharapkan
1	Kondisi geografis wilayah yang luas dan berbukit menyebabkan akses pendidikan belum merata.	Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses layanan pendidikan.	Optimalisasi layanan transportasi sekolah (Sistem Transportasi Bus Sekolah Ramah Anak/SiBONA) dengan memperluas akses pendidikan terutama di wilayah yang sulit dijangkau.	Akses siswa menuju sekolah menjadi lebih mudah dan mendukung keberlanjutan pendidikan.
2	Keterbatasan kemampuan ekonomi sebagian masyarakat berpotensi menghambat keberlanjutan pendidikan.	Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok rentan. program beasiswa Gunungkidul Cerdas,	Pemberian bantuan biaya personal peserta didik bagi siswa dari keluarga kurang mampu disertai peningkatan efektivitas program bantuan pendidikan agar tepat sasaran.	Beban biaya pendidikan berkurang dan kesempatan melanjutkan sekolah meningkat.
3	Rendahnya tingkat pendidikan penduduk	Tersedianya layanan pendidikan nonformal	Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, kegiatan SKB,	Masyarakat memperoleh

No	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Upaya dan Arah Perbaikan	Dampak yang Diharapkan
	usia 25 tahun ke atas mempengaruhi nilai rata-rata lama sekolah.	dan pendidikan kesetaraan.	serta program kursus dan pelatihan yang diarahkan pada penguatan pendidikan nonformal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.	kesempatan meningkatkan jenjang pendidikan melalui jalur nonformal.
4	Migrasi penduduk berpendidikan ke daerah lain karena peluang kerja yang lebih baik.	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.	Peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang diiringi dengan pengembangan sektor ekonomi daerah agar mampu menyerap tenaga kerja terdidik.	Mendorong peningkatan kualitas SDM dan keterkaitan pendidikan dengan kebutuhan ekonomi daerah.
5	Perbedaan pemahaman tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan serta keterbatasan guru ASN	Dukungan pemangku kepentingan pendidikan dan program peningkatan kapasitas pendidik	Koordinasi pemangku kepentingan untuk pemenuhan SPM pendidikan, pengajuan formasi guru ASN, serta peningkatan kompetensi guru melalui komunitas belajar	Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pemerataan tenaga pendidik
6	Budaya pendidikan masyarakat belum sepenuhnya mendorong keberlanjutan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi (Rendahnya minat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, warga belajar putus sekolah memilih bekerja atau berumah tangga)	Meningkatnya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. inovasi GENI SEKO GUNUNG	Sosialisasi pentingnya pendidikan serta penguatan peran sekolah dan masyarakat untuk menumbuhkan budaya belajar sepanjang hayat melalui kolaborasi pemerintah, sekolah, dan masyarakat.	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan.

Berdasarkan analisis tersebut, peningkatan capaian indikator HLS dan RLS di Kabupaten Gunungkidul memerlukan upaya yang berkelanjutan melalui penguatan akses layanan pendidikan, peningkatan keberlanjutan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, optimalisasi peran pendidikan

nonformal dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan penguatan kebijakan tersebut diharapkan capaian dimensi pengetahuan dalam pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul dapat terus meningkat.

Upaya mencapai keberhasilan capaian sasaran Derajat Kualitas SDM Meningkat selain diupayakan dari peningkatan capaian indikator dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak, juga didukung dengan keberhasilan dalam program pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia antara lain pemenuhan hak anak dan pengarusutamaan gender, juga peningkatan daya saing dan prestasi pemuda.

1. Capaian pemberdayaan gender dan pemenuhan hak anak

Capaian pemberdayaan gender diukur dengan Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang nilainya diambil dari data BPS dengan komponen pembentuk Indeks keterwakilan di parlemen (Ipar) ditambah Indeks pengambilan keputusan (IDM) ditambah Indeks distribusi pendapatan (Linc-Disc) dibagi 3. Berdasarkan data BPS nilai Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2025 masih dalam proses pengolahan data, sehingga nilai IDG yang digunakan adalah nilai tahun 2024 yaitu 79,41. Capaian IDG Kabupaten Gunungkidul masih di atas rata-rata nasional yaitu 77,62, dan di atas capaian DIY sebesar 74,65. Capaian IDG didukung dengan kegiatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan sampai di tingkat kalurahan.

Dalam kaitannya dengan pemenuhan hak anak, Pemkab Gunungkidul memfasilitasi terpenuhinya hak anak antara lain hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar, hak pendidikan dan hak perlindungan khusus.

2. Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan prestasi olahraga

Pembangunan kepemudaan dan olahraga memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi salah satu faktor penentu dalam capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Melalui pengembangan kapasitas pemuda serta pembinaan prestasi

olahraga, pemerintah daerah berupaya mendorong terbentuknya generasi muda yang sehat, produktif, kreatif, dan berdaya saing.

Dalam aspek pengembangan kepemudaan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul secara konsisten mengikutsertakan pemuda dalam ajang Pemuda Pelopor tingkat Provinsi DIY dengan mendelegasikan perwakilan pada lima bidang, yaitu pendidikan; agama, sosial, dan budaya; pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata; pangan; serta inovasi teknologi. Program ini menjadi sarana untuk mendorong munculnya gagasan dan inovasi pemuda yang berkontribusi pada pembangunan daerah. Meskipun pada tahun 2025 belum terdapat perwakilan dari Kabupaten Gunungkidul yang berhasil meraih predikat terbaik di tingkat provinsi sehingga belum dapat melaju ke tingkat nasional, keberlanjutan program ini menunjukkan adanya upaya pembinaan kapasitas pemuda secara berkelanjutan. Hal ini menjadi modal penting dalam membangun generasi muda yang memiliki kreativitas, kepemimpinan, dan partisipasi aktif dalam pembangunan.

Sementara itu, dari sisi pembinaan olahraga, pada tahun 2025 Kabupaten Gunungkidul dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah (PORDA) XVII Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pekan Paralimpik Daerah (PEPARDA) IV Daerah Istimewa Yogyakarta. Penunjukan tersebut menjadi momentum strategis dalam mendorong kemajuan pembangunan olahraga di daerah, baik dari sisi peningkatan prestasi atlet, penguatan sistem pembinaan olahraga, maupun peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.

Dari sisi prestasi, penyelenggaraan PORDA XVII DIY menunjukkan capaian yang cukup membanggakan bagi Kabupaten Gunungkidul. Kontingen daerah berhasil memperoleh total 236 medali yang terdiri dari 52 medali emas, 71 medali perak, dan 113 medali perunggu. Sementara pada ajang PEPARDA IV DIY, kontingen Gunungkidul juga menunjukkan capaian positif dengan memperoleh total 66 medali yang terdiri dari 29 medali emas, 13 medali perak, dan 24 medali perunggu. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembinaan olahraga di Kabupaten Gunungkidul tidak hanya

berkembang pada olahraga umum, tetapi juga pada olahraga bagi penyandang disabilitas secara inklusif.

Keberhasilan tersebut juga didukung oleh meningkatnya kualitas pembinaan atlet serta peran pelatih yang memberikan pendampingan secara optimal dalam proses latihan maupun kompetisi. Beberapa atlet daerah bahkan mampu menunjukkan prestasi yang menonjol hingga tingkat nasional, yang menunjukkan bahwa potensi atlet Gunungkidul memiliki daya saing yang semakin kuat. Selain itu, pelaksanaan event olahraga tingkat provinsi di daerah turut memberikan dampak positif terhadap peningkatan motivasi atlet, memperluas pengalaman bertanding, serta memperkuat ekosistem pembinaan olahraga secara berkelanjutan.

Di sisi lain, penyelenggaraan PORDA dan PEPARDA juga memberikan dampak pada meningkatnya perhatian pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pengembangan olahraga, termasuk dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana olahraga serta penguatan dukungan terhadap atlet dan pelatih. Hal ini secara tidak langsung mendorong terbentuknya budaya olahraga yang lebih kuat di masyarakat serta meningkatkan partisipasi generasi muda dalam kegiatan olahraga.

Secara keseluruhan, keberhasilan Kabupaten Gunungkidul sebagai tuan rumah PORDA XVII DIY dan PEPARDA IV DIY tahun 2025 tidak hanya menunjukkan kapasitas daerah dalam menyelenggarakan event olahraga skala provinsi, tetapi juga menjadi indikator kemajuan pembangunan olahraga daerah. Momentum ini menjadi dasar yang penting untuk terus memperkuat sistem pembinaan olahraga, meningkatkan prestasi atlet, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, dan berdaya saing.

Secara keseluruhan, pengembangan kepemudaan dan olahraga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui pembentukan generasi muda yang sehat, berkarakter, dan berprestasi. Upaya pembinaan yang berkelanjutan di bidang kepemudaan dan olahraga diharapkan dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia di Kabupaten

Gunungkidul, yang pada akhirnya turut mendukung peningkatan capaian Indeks Pembangunan Manusia di daerah.

3. Terwujudnya Pembangunan Literasi Masyarakat

Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai komponen utama dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak terlepas dari tingkat literasi masyarakat. Literasi berperan penting dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi, memperluas wawasan, serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan sepanjang hayat. Dalam konteks tersebut, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menjadi indikator yang menggambarkan kondisi akses, pemanfaatan, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi.

Pada Tahun 2025, nilai IPLM Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar 16,67, yang menunjukkan kinerja yang cukup baik karena berada di atas rata-rata nasional kabupaten/kota sebesar 10,37. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penguatan layanan perpustakaan dan peningkatan budaya literasi masyarakat telah berjalan cukup efektif. Di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta, posisi Kabupaten Gunungkidul berada di bawah Kota Yogyakarta (25,53) dan Kabupaten Kulon Progo (20,47), namun masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Sleman (11,14) dan Kabupaten Bantul (8,41).

Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian literasi masyarakat Kabupaten Gunungkidul masih berada pada posisi kompetitif di tingkat regional, meskipun masih terdapat ruang peningkatan agar mampu sejajar dengan daerah dengan capaian lebih tinggi.

Beberapa komponen telah menunjukkan capaian kinerja yang tinggi, antara lain ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan, serta pemenuhan Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi ketersediaan sumber daya manusia, standar layanan, dan minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan perpustakaan sudah berada pada kondisi yang cukup baik. Selain itu, ketercukupan koleksi perpustakaan juga relatif memadai meskipun masih memerlukan peningkatan

kualitas dan relevansi bahan bacaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan literasi digital.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan literasi masyarakat. Permasalahan utama antara lain belum meratanya akses layanan perpustakaan hingga ke wilayah desa, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi yang masih terbatas, serta jumlah anggota perpustakaan aktif yang belum merata, khususnya pada kelompok usia muda. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur dan layanan dasar perpustakaan telah tersedia, pemanfaatan layanan literasi oleh masyarakat masih perlu terus diperkuat melalui pendekatan yang lebih inovatif dan inklusif.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan berbagai inovasi dan penguatan program literasi. Salah satunya melalui program LAJANG CAKAP (Layanan Antar Jemput Anak Gunungkidul Calon Kader Pemustaka) yang bertujuan meningkatkan akses anak-anak terhadap layanan perpustakaan serta menumbuhkan minat baca sejak dini. Selain itu, layanan perpustakaan keliling terus dioptimalkan untuk menjangkau masyarakat di wilayah yang belum memiliki akses langsung terhadap fasilitas perpustakaan.

Penguatan literasi juga dilakukan melalui pengembangan E-Pusda Gunungkidul, yaitu layanan perpustakaan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses koleksi bacaan secara daring sehingga memperluas jangkauan layanan literasi tanpa terbatas oleh lokasi dan waktu. Di samping itu, peningkatan ketersediaan bahan bacaan dilakukan melalui gerakan SAJISAKA (Satu Jiwa Satu Pustaka) yang mendorong partisipasi masyarakat, lembaga, maupun dunia usaha untuk menyumbangkan buku secara masif guna memperkaya koleksi perpustakaan serta memperluas akses bahan bacaan bagi masyarakat.

Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan terjadi peningkatan pemerataan akses layanan perpustakaan, penguatan budaya membaca, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi. Dalam

jangka panjang, penguatan literasi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas kapasitas pengetahuan masyarakat, serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunungkidul.

Pengeluaran Riil Per kapita Disesuaikan

Standar hidup layak sebagai salah satu dimensi dalam pembangunan manusia diproksi melalui indikator Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan, yang mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Indikator ini dihitung berdasarkan data konsumsi rumah tangga yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity/PPP*) sehingga dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif.

Perkembangan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat, kondisi tersebut mulai pulih pada tahun-tahun berikutnya. Pada periode 2021 hingga 2025, pengeluaran per kapita kembali menunjukkan tren peningkatan seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat.

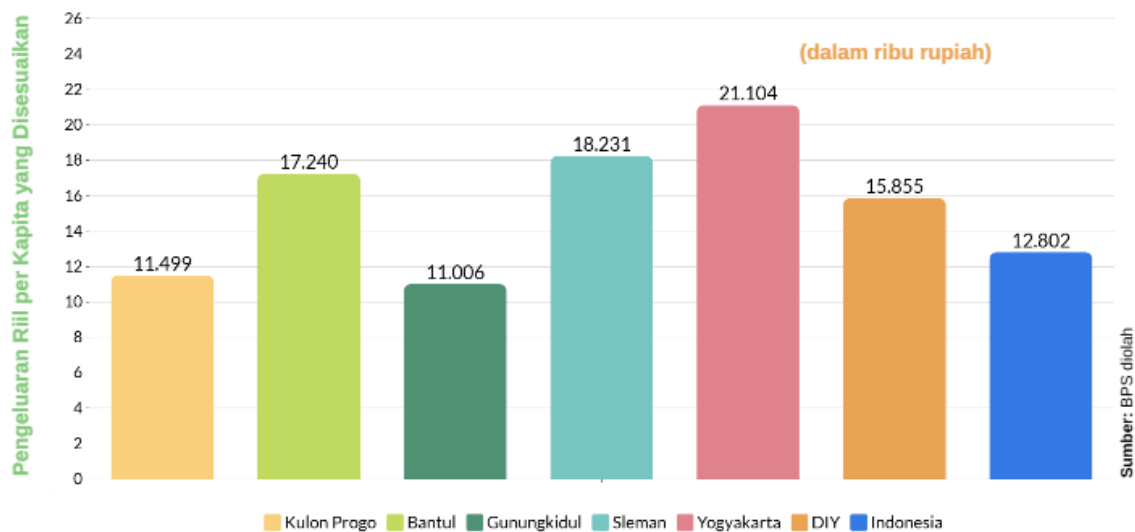
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), pengeluaran riil per kapita disesuaikan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 mencapai Rp11.006.000,00 per tahun. Nilai tersebut menggambarkan bahwa secara rata-rata setiap penduduk di Kabupaten Gunungkidul mengeluarkan sekitar Rp11.006.000,00 per tahun untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumsi. Peningkatan nilai pengeluaran per kapita ini menunjukkan adanya perbaikan kemampuan daya beli masyarakat yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan standar hidup layak sebagai salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Perkembangan pengeluaran riil per kapita disesuaikan di Kabupaten Gunungkidul pada periode 2015–2025 dapat dilihat pada grafik berikut.:



Gambar 3.21 Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2025 (Ribu/Rupiah)

Pengeluaran riil per kapita penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 jika dibandingkan dengan daerah lain di DIY yang mencapai Rp15.855.000 menduduki posisi paling rendah dan juga masih di bawah pendapatan riil per kapita nasional yang mencapai Rp12.802.000 pada tahun 2025. Perbandingan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan penduduk Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten/Kota lain di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun di tingkat nasional dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 3.22 Perbandingan Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan Penduduk Gunungkidul dengan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di DIY

Peningkatan daya beli masyarakat yang tercermin dari pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan tidak terlepas dari membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang antara lain ditunjukkan oleh menurunnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Kedua indikator tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan standar hidup layak sebagai salah satu dimensi pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran ditetapkan sebagai sasaran pembangunan daerah dengan indikator kinerja berupa persentase angka kemiskinan dan angka pengangguran.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melaksanakan Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang didukung oleh alokasi anggaran daerah. Realisasi anggaran program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.24
Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Derajat Kualitas SDM
Meningkat

Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	282.158.206.432	267.264.375.497	94,72	14.893.830.935	5,28

Realisasi anggaran pada Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam mendukung pencapaian sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dari total anggaran sebesar Rp282.158.206.432, terealisasi sebesar Rp267.264.375.497 atau mencapai 94,72% dari pagu anggaran yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan yang direncanakan dalam program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Selisih antara anggaran dan realisasi sebesar Rp14.893.830.935 atau sekitar 5,28% menunjukkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan program. Efisiensi ini dapat disebabkan oleh optimalisasi penggunaan anggaran, penyesuaian kebutuhan kegiatan di lapangan, serta efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Secara keseluruhan, tingkat penyerapan anggaran yang cukup tinggi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia berjalan secara efektif dan efisien, serta mampu mendukung berbagai kegiatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Melalui pelaksanaan program ini diharapkan kualitas sumber daya manusia dapat terus meningkat sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan

Sasaran 4: Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun

Sasaran Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun merupakan bagian dari upaya pencapaian Misi 2 RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah”, dengan tujuan daerah Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas. Sasaran ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya perluasan kesempatan kerja serta pengurangan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Tingkat pencapaian sasaran tersebut diukur melalui dua indikator kinerja, yaitu angka pengangguran dan persentase angka miskin. Kedua indikator ini digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengukuran capaian indikator dilakukan berdasarkan data resmi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Adapun hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran menurunnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin pada tahun 2025 adalah sebagai berikut;

Tabel 3.25
Pengukuran Capaian Sasaran Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1.	Angka Pengangguran	2,05	2,15	95,12	Sangat Tinggi
2.	Persentase Angka Kemiskinan	15	14,15	105,67	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian Kinerja				100,40	Sangat tinggi

Sumber : BPS, diolah

Dari hasil evaluasi data tersebut bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata 100,40% yang masuk kategori sangat tinggi. Capaian indikator kinerja angka pengangguran sebesar 2,15 sehingga dengan target 2,05 kinerjanya tercapai sebesar 95,12% masuk kategori sangat tinggi. Sementara itu, untuk capaian indikator kinerja persentase angka kemiskinan tahun 2025 sebesar 14,15 dari target 15, sehingga capaian kinerjanya sebesar 105,67% dan masuk kategori sangat tinggi.

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun tahun 2025

Angka Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan sosial dan ekonomi yang terjadi ketika pertumbuhan jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja. Kondisi tersebut dapat menyebabkan sebagian penduduk usia kerja tidak terserap dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan jumlah angkatan kerja perlu diimbangi dengan penyediaan dan perluasan kesempatan kerja guna mencegah peningkatan angka pengangguran.

Dalam konsep ketenagakerjaan, penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja terdiri atas Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan, sedangkan bukan angkatan kerja meliputi penduduk yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran mencakup penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan

karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan, serta penduduk yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Indikator ini digunakan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah.

Capaian indikator kinerja tingkat pengangguran pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,15. Capaian tersebut menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 2,16, atau turun 0,01 poin. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja meskipun penurunannya relatif kecil.



Gambar 3.23
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2025

Perbandingan realisasi angka pengangguran Kabupaten Gunungkidul tahun 2023–2025 serta target akhir RPJMD tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.26 Realisasi Angka Pengangguran Gunungkidul Tahun 2023-2025, dan Perbandingan Capaian 2025 terhadap Target di Tahun Akhir RPJMD 2021-2026

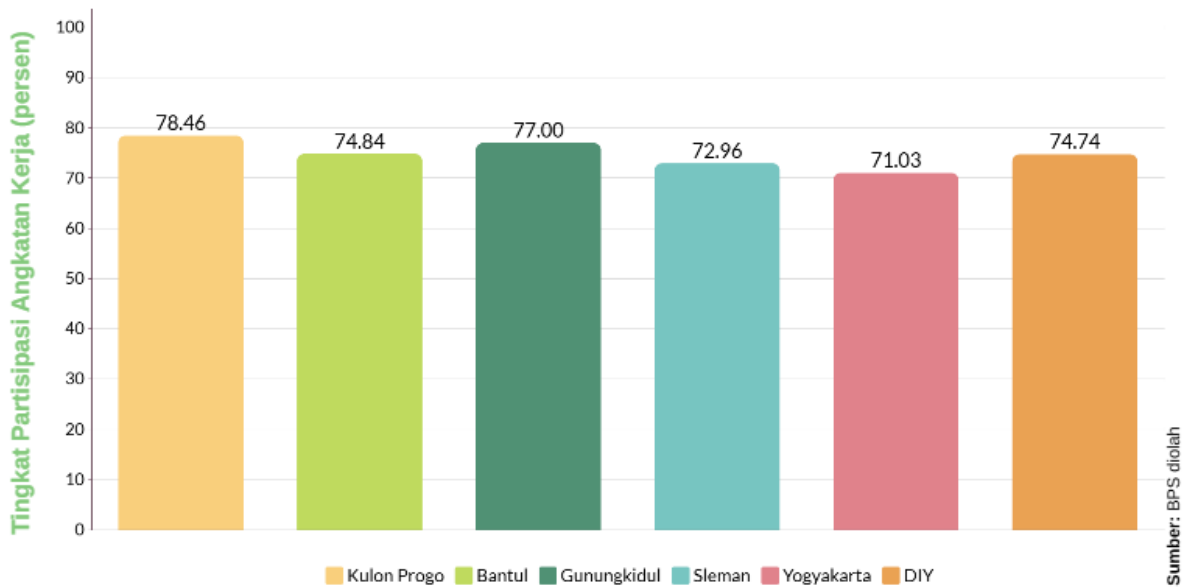
Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026 (Akhir RPJMD)	Capaian 2025 terhadap 2026 (%)
2,09	2,16	2,15	1,50	56,67

Realisasi tingkat pengangguran pada tahun 2023 tercatat sebesar 2,09, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 2,16. Pada tahun 2025, angka pengangguran menunjukkan perbaikan dengan realisasi sebesar 2,15, atau turun 0,01 poin dibandingkan tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan, capaian tersebut masih lebih tinggi dibandingkan kondisi tahun 2023.

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 1,50, maka capaian kinerja tahun 2025 baru mencapai 56,67% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih optimal untuk menurunkan tingkat pengangguran agar dapat mendekati target akhir RPJMD.

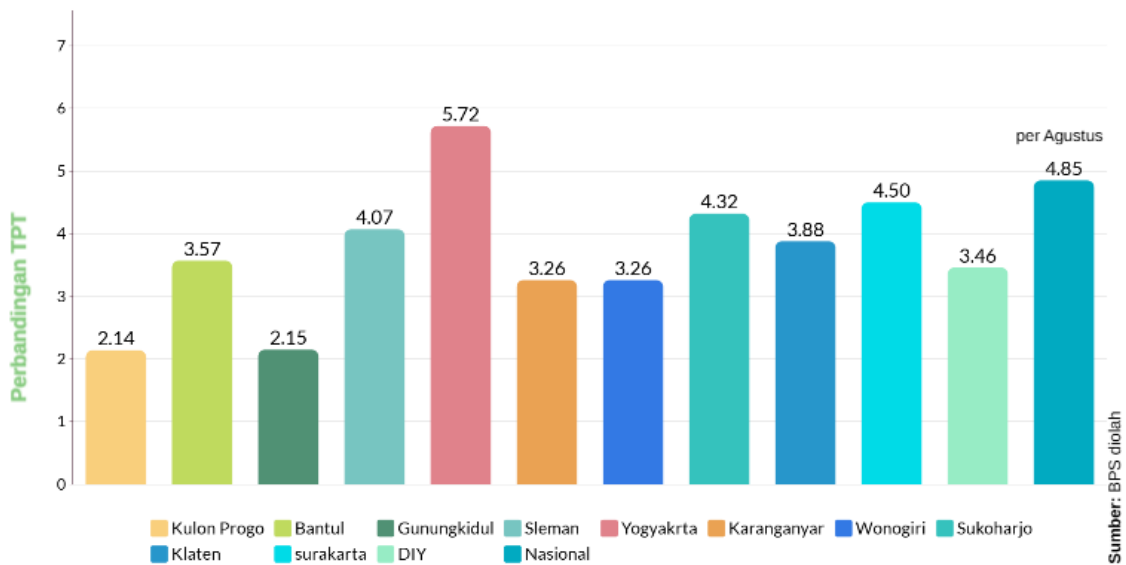
Secara umum, tren tingkat pengangguran selama periode 2023–2025 relatif stabil dengan fluktuasi yang tidak terlalu besar. Namun demikian, angka pengangguran pada tahun 2024 sempat meningkat sebelum kembali menurun pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja masih menghadapi tantangan, sehingga diperlukan penguatan kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja serta peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Jika dibandingkan dengan daerah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta, tingkat pengangguran Kabupaten Gunungkidul tergolong relatif rendah. Berdasarkan data BPS tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi terdapat di Kota Yogyakarta sebesar 5,8 persen, diikuti Kabupaten Sleman sebesar 4,13 persen, Kabupaten Bantul sebesar 3,62 persen, Kabupaten Kulon Progo sebesar 2,01 persen, dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 2,16 persen. Selain itu, jika dibandingkan dengan rata-rata TPT nasional sebesar 4,91 persen dan TPT DIY sebesar 3,48 persen, tingkat pengangguran di Kabupaten Gunungkidul masih berada pada kategori relatif rendah.



Gambar 3.24 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta

Sementara itu, TPT tertinggi di D.I.Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta sebesar 5,8 persen, diikuti Kabupaten Sleman sebesar 4,13 persen, Kabupaten Bantul 3,62 persen, Kabupaten Kulon Progo sebesar 2,01 persen, dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 2,16 persen. Jika dibandingkan dengan daerah sekitar di wilayah DIY maupun Jawa Tengah, pengangguran di Gunungkidul tergolong rendah. Demikian pula jika dibandingkan dengan rata-rata TPT Nasional sebesar 4,91 persen dan TPT DIY sebesar 3,48 persen, maka pengangguran di Gunungkidul tahun 2024 cukup rendah. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 jika dibandingkan dengan daerah-daerah sekitar baik di DIY, Jawa Tengah disajikan dalam gambar berikut ini:



Gambar 3.25 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunungkidul dengan Daerah Sekitar tahun 2025

Selain TPT, kondisi ketenagakerjaan juga dapat dilihat melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang menggambarkan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Semakin tinggi nilai TPAK menunjukkan semakin besar proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi.

Berdasarkan data BPS, TPAK Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 sebesar 77,00 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 76,87 persen atau naik 0,13 poin. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di DIY, TPAK Kabupaten Gunungkidul merupakan yang kedua tertinggi setelah Kabupaten Kulon Progo sebesar 78,46 persen, diikuti Kabupaten Bantul sebesar 74,84 persen, Kabupaten Sleman sebesar 72,96 persen, dan Kota Yogyakarta sebesar 71,03 persen.

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di DIY, kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Gunungkidul tergolong baik. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat pengangguran yang lebih rendah dibandingkan rata-rata DIY maupun nasional, serta didukung oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang termasuk tinggi di antara kabupaten/kota di DIY. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja di Kabupaten Gunungkidul aktif dalam

kegiatan ekonomi dan memiliki peluang yang relatif lebih baik untuk terserap dalam pasar kerja.

Upaya untuk mengurangi angka pengangguran diantaranya melalui peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta penciptaan hubungan industrial yang kondusif. Pada tahun 2025, persentase tenaga kerja yang ditempatkan, target yang ditetapkan sebesar 68 persen dan terealisasi sebesar 82,74 persen, sehingga capaian kinerjanya mencapai 121,68 persen dengan kategori sangat tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya penempatan tenaga kerja berjalan efektif dalam mempertemukan pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesiapan tenaga kerja, dilaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi yang meliputi pelatihan menjahit, pengelasan, dan servis sepeda motor. Pada tahun 2025, kegiatan ini diikuti oleh 112 orang pencari kerja. Pelatihan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi yang dilaksanakan oleh UPT BLK, dengan tujuan memberikan bekal keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Selain itu, upaya peningkatan penempatan tenaga kerja juga didukung melalui pelaksanaan program *3 in 1* yang melibatkan unsur pemerintah daerah, masyarakat, dan perusahaan, sehingga pelatihan yang diberikan dapat langsung dihubungkan dengan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan.

Dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap informasi kesempatan kerja, dilaksanakan kegiatan Job Fair/Bursa Kerja yang berhasil memfasilitasi 1.117 pencari kerja untuk memperoleh informasi lowongan pekerjaan serta berinteraksi langsung dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Selain itu, penyebaran informasi pasar kerja juga dilakukan melalui BKOL (Bursa Kerja Online) yang memungkinkan pencari kerja memperoleh informasi lowongan secara lebih luas dan cepat. Melalui kegiatan tersebut diharapkan proses mempertemukan antara pencari kerja dan pemberi kerja dapat berjalan lebih efektif.

Selain melalui kegiatan pelatihan dan penyediaan informasi pasar kerja, upaya penyerapan tenaga kerja juga dilakukan melalui pelaksanaan program padat karya. Program ini bertujuan untuk menyerap tenaga kerja sementara melalui kegiatan pembangunan infrastruktur seperti jalan, taud, dan fasilitas lainnya dengan sistem kerja gotong royong. Program padat karya memberikan kesempatan kerja jangka pendek bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok penganggur dan setengah penganggur, sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur di daerah.

Selain itu, upaya pemerataan penduduk dan pengembangan wilayah juga dilakukan melalui program pembangunan kawasan transmigrasi. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari satu daerah kabupaten/kota, dengan jumlah realisasi sebanyak 3 kepala keluarga yang diberangkatkan ke Polowali Mandar, Sulawesi Barat sebagai daerah tujuan transmigrasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan kawasan transmigrasi melalui pengembangan potensi ekonomi wilayah tujuan.

Selanjutnya, pada aspek perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak, target yang ditetapkan sebesar 15,6 persen dan terealisasi sebesar 16,54 persen, sehingga capaian kinerjanya mencapai 106,00 persen dengan kategori sangat tinggi. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan perusahaan dalam menerapkan norma ketenagakerjaan serta prinsip-prinsip kerja yang layak. Penerapan tata kelola kerja yang baik akan menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha sehingga dapat mendukung keberlangsungan usaha dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Secara keseluruhan, penempatan tenaga kerja dan penerapan tata kelola kerja yang layak menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, seperti pelatihan berbasis kompetensi, penyelenggaraan job fair, pengelolaan informasi pasar kerja, program padat karya, serta program transmigrasi, telah mampu mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja serta mendukung terciptanya

hubungan industrial yang kondusif. Dengan demikian, kinerja tersebut diharapkan dapat terus memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja serta mendukung upaya penurunan angka pengangguran di daerah.



Gambar 3.26
Kegiatan untuk Penyerapan Tenaga Kerja

Dalam upaya pencapaian berkurangnya angka pengangguran, dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat penghambat maupun pendukung.

Faktor-faktor tersebut antara lain berkaitan dengan kondisi pasar kerja, kualitas tenaga kerja, ketersediaan informasi ketenagakerjaan, serta pengelolaan data dan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan ketenagakerjaan. Identifikasi terhadap faktor-faktor tersebut penting sebagai dasar dalam merumuskan upaya perbaikan guna meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai berikut.

Tabel 3.27 Analisis Faktor Penghambat, Faktor Pendukung, Upaya Perbaikan, dan Dampak terhadap Capaian Kinerja Menurunnya Angka Pengangguran

Kategori / Aspek	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Upaya dan Arah Perbaikan	Dampak terhadap Pencapaian Sasaran
Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah lowongan pekerjaan terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Pekerja yang sudah ditempatkan jarang melaporkan kembali status pekerjaannya sehingga data penempatan kurang akurat.	Ketersediaan jumlah tenaga kerja yang cukup banyak serta adanya komitmen masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup melalui pekerjaan.	Meningkatkan kerja sama dengan Bursa Kerja Khusus (BKK) di sekolah-sekolah serta memperluas jejaring dengan perusahaan/pemb eri kerja untuk membuka peluang penempatan tenaga kerja.	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan serta meningkatnya efektivitas layanan penempatan tenaga kerja.
Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kerja	Sebagian calon tenaga kerja masih memiliki keterampilan yang terbatas sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.	Antusiasme masyarakat untuk mengikuti pelatihan kerja dan meningkatkan keterampilan.	Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi seperti pelatihan menjahit, pengelasan, dan servis sepeda motor serta penguatan program pelatihan berbasis kebutuhan industri.	Meningkatnya kompetensi dan kesiapan kerja tenaga kerja sehingga peluang untuk terserap di dunia kerja menjadi lebih besar.
Informasi Pasar Kerja	Informasi pasar kerja belum	Dukungan kegiatan	Menyelenggarakan Job Fair secara	Akses masyarakat terhadap informasi

Kategori / Aspek	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Upaya dan Arah Perbaikan	Dampak terhadap Pencapaian Sasaran
	sepenuhnya terintegrasi dan belum menjangkau seluruh pencari kerja.	penyebaran informasi pasar kerja melalui Job Fair dan Bursa Kerja Online (BKOL).	berkala serta mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi ketenagakerjaan dan BKOL.	lowongan pekerjaan semakin luas dan proses mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan menjadi lebih efektif.
Data Ketenagakerjaan dan Kepatuhan Perusahaan	Ketersediaan dan pemutakhiran data ketenagakerjaan belum optimal serta kesulitan memperoleh data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu masih terdapat pemberi kerja yang belum sepenuhnya menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	Adanya dukungan kebijakan pemerintah dalam peningkatan perlindungan tenaga kerja serta kesadaran perusahaan yang mulai meningkat dalam penerapan tata kelola kerja yang layak.	Meningkatkan koordinasi dengan perusahaan dan instansi terkait dalam pemutakhiran data ketenagakerjaan serta mendorong penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan.	Meningkatnya kualitas data ketenagakerjaan serta meningkatnya penerapan tata kelola kerja yang layak pada perusahaan.

Persentase Angka Kemiskinan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 sebesar 14,15 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 15,18 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat meskipun angka kemiskinan masih relatif tinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir

RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021–2026 sebesar 11,00 persen, capaian tahun 2025 telah mencapai 71,36 persen dari target yang ditetapkan.

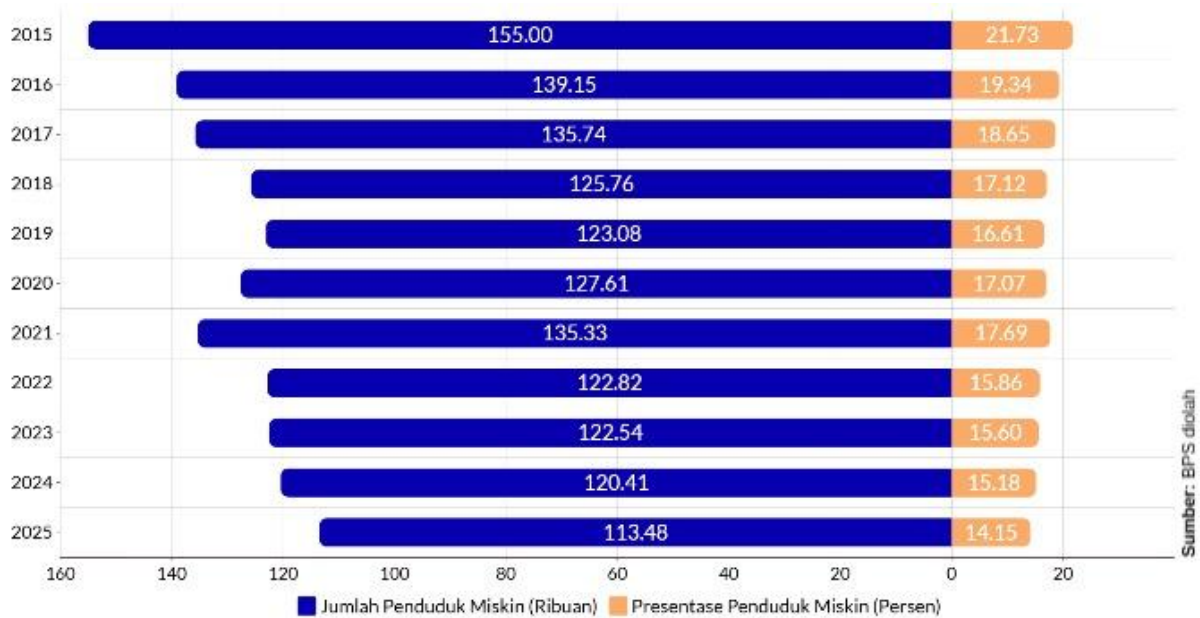
Perkembangan realisasi persentase angka kemiskinan Kabupaten Gunungkidul serta perbandingan capaian tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.28
Realisasi Persentase Angka Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023–2025 dan Perbandingan Capaian Tahun 2025 terhadap Target Akhir RPJMD 2021–2026

Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026 (Akhir RPJMD)	Capaian 2025 terhadap 2026 (%)
15,60	15,18	14,15	11,00	71,36

Selain dilihat dari persentasenya, perkembangan kemiskinan juga dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2025 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul tercatat sebanyak 113,48 ribu orang, menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 120,41 ribu orang. Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat, meskipun persentase kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul masih berada di atas rata-rata nasional yang pada tahun 2025 sebesar 8,57 persen.

Perkembangan jumlah penduduk miskin dan persentase kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.27 Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang) dan Penduduk Miskin (Persen) Kabupaten Gunungkidul tahun 2015-2025

Permasalahan kemiskinan tidak hanya dilihat dari jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga dari tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks ini menunjukkan seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan. Sementara itu, Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks tersebut, maka semakin berat tingkat kemiskinan yang dialami oleh masyarakat.

Pada tahun 2025, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar 1,99, sedangkan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) sebesar 0,42. Nilai tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan serta ketimpangan pengeluaran di antara kelompok penduduk miskin yang perlu menjadi perhatian dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.28 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015–2025

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta, tingkat kemiskinan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 berada pada posisi kedua tertinggi setelah Kabupaten Kulon Progo yang sebesar 14,53 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul sebesar 11,54 persen, Kabupaten Sleman 6,71 persen, dan Kota Yogyakarta 6,14 persen. Persentase kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul juga masih berada di atas

angka kemiskinan nasional yang pada tahun 2025 sebesar 8,57 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul masih menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.

Perbandingan indikator kemiskinan antar kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.29
Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota/Provinsi
Tahun 2024-2025

Kabupaten/ Kota/Provinsi	2024					2025				
	Jml Penduduk Miskin (dlm ribuan jiwa)	P0	P1	P2	GK (Rp/Kap/Bln)	Jml Penduduk Miskin (dlm ribuan jiwa)	P0	P1	P2	GK (Rp/Kap/Bln)
Kulon Progo	71,48	15,62	2,48	0,62	438.007	67,25	14,53	1,81	0,34	452.717
Bantul	126,93	11,66	2,18	0,56	510.740	127,25	11,54	1,28	0,26	531.456
Gunungkidul	120,41	15,18	2,56	0,65	401.209	113,48	14,15	1,99	0,42	413.617
Sleman	97,94	7,46	1,21	0,27	513.926	89,28	6,71	0,76	0,14	534.300
Yogyakarta	28,79	6,26	0,76	0,14	686.973	28,58	6,14	0,61	0,08	729.196
D.I. Yogyakarta	445,55	10,83	1,87	0,45	602.437	425,82	10,23	1,59	0,34	626.363

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Berdasarkan Tabel 3.23, pada tahun 2025 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar 113,48 ribu jiwa, menurun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 120,41 ribu jiwa. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, dari sisi persentase kemiskinan (P0), Kabupaten Gunungkidul masih termasuk wilayah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi di DIY.

Jika dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 memiliki nilai 1,99, yang menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin masih berada cukup jauh di bawah garis kemiskinan.

Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta, sehingga menggambarkan bahwa tingkat kesenjangan pengeluaran masyarakat miskin di Kabupaten Gunungkidul masih relatif lebih besar.

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 sebesar 0,42, yang menunjukkan masih adanya ketimpangan pengeluaran di antara kelompok masyarakat miskin. Meskipun demikian, nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 0,65, sehingga menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pengeluaran di antara kelompok penduduk miskin.

Apabila dilihat dari garis kemiskinan, Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 memiliki garis kemiskinan sebesar Rp413.617 per kapita per bulan, yang merupakan salah satu yang terendah di wilayah DIY. Kondisi ini menunjukkan bahwa standar kebutuhan minimum masyarakat relatif lebih rendah dibandingkan wilayah lain di DIY, yang juga dipengaruhi oleh struktur ekonomi wilayah dan karakteristik sosial ekonomi masyarakat.

Apabila dilihat dari perubahan dalam satu tahun terakhir (2024–2025), tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul mengalami penurunan dari 15,18 persen menjadi 14,15 persen, atau turun sebesar 1,03 poin persentase. Penurunan ini termasuk cukup besar dibandingkan beberapa wilayah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta dan menjadi penurunan terbesar kedua setelah Kabupaten Kulon Progo yang turun sebesar 1,09 poin persentase. Dalam periode yang sama, tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengalami penurunan dari 10,83 persen menjadi 10,23 persen, sedangkan secara nasional turun dari 8,57 persen menjadi 8,25 persen.

Selain melihat perkembangan jangka pendek, analisis benchmarking juga dilakukan terhadap tren beberapa tahun terakhir. Dalam periode 2021–2025, tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul menurun dari 17,69 persen menjadi 14,15 persen, atau turun sebesar 3,54 poin persentase. Penurunan ini juga termasuk yang terbesar kedua di wilayah DIY setelah Kabupaten Kulon Progo yang mengalami penurunan sebesar 3,86 poin persentase. Dalam periode yang sama,

tingkat kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta menurun dari 12,8 persen menjadi 10,23 persen atau turun sebesar 2,57 poin persentase, sedangkan secara nasional turun dari 9,71 persen menjadi 8,25 persen atau turun sebesar 1,46 poin persentase. Kondisi ini menunjukkan bahwa laju penurunan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul dalam beberapa tahun terakhir relatif lebih cepat dibandingkan rata-rata DIY maupun nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa laju penurunan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul tergolong cukup baik dibandingkan daerah lain baik dalam jangka waktu satu tahunan maupun lima tahun terakhir.

Perbandingan tren persentase kemiskinan kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam periode 2021–2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.30
Perbandingan Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021–2025

Wilayah	2021	2022	2023	2024	2025	Pertumbuhan 2024–2025	Pertumbuhan 2021–2025
<i>Kulon Progo</i>	18,39	16,39	15,64	15,62	14,53	1,09	3,86
<i>Bantul</i>	14,04	12,27	11,95	11,66	11,54	0,12	2,5
<i>Gunungkidul</i>	17,69	15,86	15,6	15,18	14,15	1,03	3,54
<i>Sleman</i>	8,64	7,74	7,52	7,46	6,71	0,75	1,93
<i>Yogyakarta</i>	7,69	6,62	6,49	6,26	6,14	0,12	1,55
<i>D.I.Yogyakarta</i>	12,8	11,34	11,04	10,83	10,23	0,6	2,57
<i>Nasional</i>	9,71	9,57	9,36	8,57	8,25	0,32	1,46

Sumber : BPS (data diolah)

Berdasarkan hasil benchmarking tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul masih relatif tinggi dibandingkan sebagian wilayah lain di DIY, namun laju penurunannya baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan mulai memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul termasuk yang cukup besar di wilayah DIY, hanya berada di bawah Kabupaten Kulon Progo.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul masih relatif tinggi, namun laju penurunannya cukup baik.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa berbagai program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan mulai memberikan dampak positif terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat. Untuk mempercepat penurunan kemiskinan secara lebih optimal, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus memperkuat sinergi program penanggulangan kemiskinan melalui berbagai strategi yang terintegrasi.

Melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang dilaksanakan melalui tiga strategi utama yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Arah kebijakan daerah juga difokuskan pada penguatan sistem perlindungan sosial serta peningkatan layanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti gelandangan dan pengemis, anak jalanan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Pada tahun 2025 jumlah PPKS di Kabupaten Gunungkidul tercatat sebanyak 15.232 orang, dengan jumlah yang telah mendapatkan intervensi bantuan sebanyak 13.483 orang, sehingga cakupan perlindungan dan jaminan sosial mencapai 88,52 persen.

Beberapa program yang dilaksanakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan antara lain rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan tuna sosial di luar panti; jaminan sosial lanjut usia; bantuan sembako; pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) fakir miskin dan usaha sosial ekonomi produktif; serta pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penetapan sasaran program bantuan sosial. Kondisi ini mengindikasikan bahwa berbagai program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan mulai memberikan dampak positif terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, berbagai kebijakan dan program telah dilaksanakan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin. Program-program tersebut antara lain melalui penyelenggaraan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Permasalahan tersebut berkaitan dengan keterbatasan anggaran, akurasi dan pemutakhiran data kemiskinan, keterbatasan dukungan pemberdayaan ekonomi, serta akses masyarakat terhadap program bantuan sosial.

Untuk mengidentifikasi permasalahan sekaligus merumuskan langkah perbaikan yang perlu dilakukan, dilakukan analisis terhadap aspek-aspek utama dalam penanggulangan kemiskinan yang mencakup permasalahan yang dihadapi, faktor pendukung, serta upaya perbaikan yang telah dan akan dilakukan. Ringkasan analisis tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.31 Analisis Faktor Penghambat, Faktor Pendukung, Upaya Perbaikan, dan Dampak terhadap Capaian Kinerja Menurunnya Angka Pengangguran

Kategori / Aspek	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Upaya dan Arah Perbaikan	Dampak terhadap Pencapaian Sasaran
Perlindungan sosial bagi PPKS	Penanganan dan pemberian bantuan sosial kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar belum maksimal karena keterbatasan anggaran dibandingkan jumlah PPKS	Dukungan kebijakan nasional melalui program perlindungan sosial serta keberadaan TKPKD	Optimalisasi dukungan pendanaan dari Kementerian Sosial dan pihak ketiga untuk pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan	Cakupan layanan sosial meningkat dan kebutuhan dasar kelompok rentan lebih terpenuhi
Kualitas dan Kompetensi	Sebagian calon tenaga kerja	Antusiasme masyarakat	Pelaksanaan pelatihan	Meningkatnya kompetensi dan

Kategori / Aspek	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Upaya dan Arah Perbaikan	Dampak terhadap Pencapaian Sasaran
Tenaga Kerja	masih memiliki keterampilan yang terbatas sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.	untuk mengikuti pelatihan kerja dan meningkatkan keterampilan.	berbasis kompetensi seperti pelatihan menjahit, pengelasan, dan servis sepeda motor serta penguatan program pelatihan berbasis kebutuhan industri.	kesiapan kerja tenaga kerja sehingga peluang untuk terserap di dunia kerja menjadi lebih besar.
Pemutakhiran data kemiskinan	Data DTKS dan data PPKS belum sepenuhnya mutakhir karena keterbatasan kapasitas SDM di tingkat kalurahan dalam penginputan data	Adanya sistem informasi desa (SID) serta koordinasi lintas tingkat pemerintahan	Pengembangan database kemiskinan melalui SID, verifikasi faktual data DTKS, serta bimbingan teknis bagi operator kalurahan	Data sasaran program bantuan sosial menjadi lebih akurat dan tepat sasaran
Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin	Dukungan anggaran pemberdayaan PPKS masih terbatas sehingga peningkatan kemandirian ekonomi belum optimal	Program pemberdayaan sosial seperti KUBE dan usaha sosial ekonomi produktif	Penguatan kolaborasi dengan program CSR dan pihak swasta untuk mendukung kegiatan pemberdayaan	Peningkatan peluang usaha dan kemandirian ekonomi masyarakat miskin
Akses bantuan sosial	Masih terdapat masyarakat miskin yang belum dapat mengakses bantuan secara optimal	Adanya program bantuan sosial seperti bantuan sembako dan jaminan sosial lanjut usia	Peningkatan koordinasi program, penguatan sistem pengaduan masyarakat, serta perbaikan mekanisme penyaluran	Akses masyarakat terhadap bantuan sosial menjadi lebih merata

Kategori / Aspek	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Upaya dan Arah Perbaikan	Dampak terhadap Pencapaian Sasaran
			bantuan	
Keberlanjutan usaha ekonomi produktif	Sebagian penerima bantuan usaha ekonomi produktif belum mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan	Adanya program KUBE dan dukungan pemberdayaan ekonomi masyarakat	Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penerima bantuan usaha ekonomi produktif	Keberlanjutan usaha masyarakat meningkat dan berpotensi meningkatkan pendapatan

Permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran, kapasitas sumber daya manusia, maupun ketersediaan data yang akurat dan mutakhir. Oleh karena itu, penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kualitas basis data kemiskinan, serta pengembangan kolaborasi dengan pemerintah pusat, dunia usaha, dan masyarakat menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan.

Analisis Realisasi Anggaran

Keberhasilan capaian Sasaran Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu:

1. Program Pengurangan Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja; dan
2. Program Penanggulangan Kemiskinan.

Berdasarkan data realisasi anggaran pada program yang mendukung pengurangan pengangguran dan penanggulangan kemiskinan, secara umum pelaksanaan program menunjukkan tingkat serapan anggaran yang cukup tinggi. Total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp5.446.805.250, dengan realisasi sebesar Rp5.327.441.470 atau mencapai 97,81 persen dari pagu anggaran yang tersedia. Dengan demikian terdapat selisih anggaran sebesar Rp119.363.780 atau tingkat efisiensi sebesar 2,19 persen. Realisasi anggaran Pencapaian Sasaran Strategis tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.32
Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Angka Pengangguran dan Jumlah Penduduk Miskin Menurun

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Pengurangan Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja	1.291.025.000	1.273.719.982	98,66	17.305.018	1,34
2.	Penanggulangan Kemiskinan	4.155.780.250	4.053.721.488	97,54	102.058.762	2,46
	Jumlah	5.446.805.250	5.327.441.470	97,81	119.363.780	2,19

Pada Program Pengurangan Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1.291.025.000 dengan realisasi sebesar Rp1.273.719.982 atau mencapai 98,66 persen dari anggaran yang tersedia. Selisih anggaran sebesar Rp17.305.018 menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan cukup optimal dengan tingkat efisiensi sekitar 1,34 persen. Tingginya realisasi anggaran ini menunjukkan bahwa kegiatan yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sementara itu, pada Program Penanggulangan Kemiskinan, dari anggaran sebesar Rp4.155.780.250 terealisasi sebesar Rp4.053.721.488 atau 97,54 persen dari total anggaran. Terdapat selisih anggaran sebesar Rp102.058.762 dengan tingkat efisiensi sebesar 2,46 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan sosial, bantuan sosial, serta pemberdayaan masyarakat miskin dapat dilaksanakan dengan baik dan mendukung upaya penurunan tingkat kemiskinan.

Secara keseluruhan, tingkat serapan anggaran yang tinggi pada kedua program tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan relatif efektif dan efisien. Efisiensi yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh optimalisasi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan serta adanya penghematan pada beberapa komponen belanja. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dalam mendukung program pengurangan pengangguran dan penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan secara cukup baik sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan 3: Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi

Tujuan Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam memperkuat struktur perekonomian daerah yang berbasis pada potensi lokal serta peningkatan iklim investasi. Tujuan ini mendukung pencapaian Misi 2 RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021–2026, yaitu “Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah”. Melalui tujuan tersebut diharapkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sektor-sektor unggulan daerah dapat dikelola secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

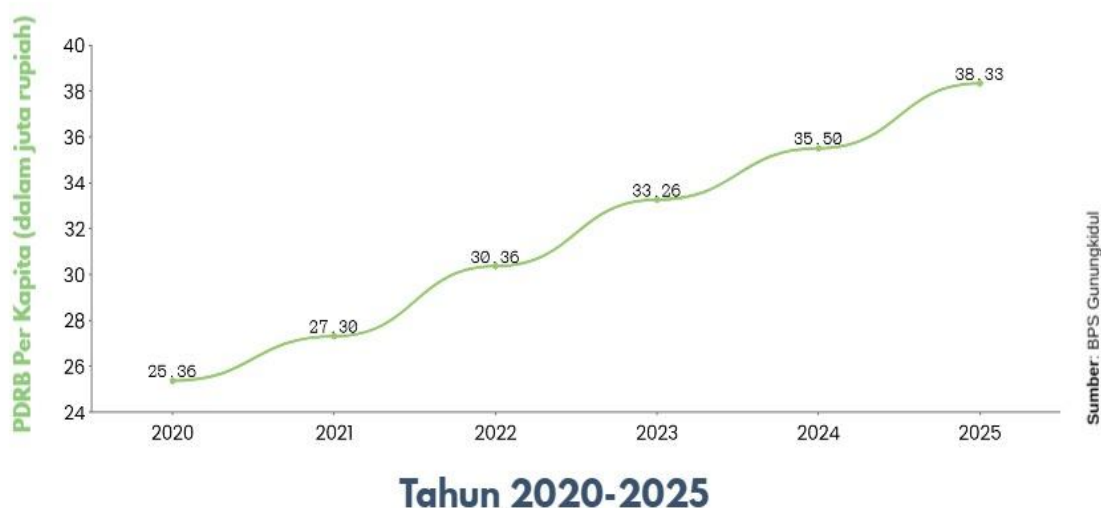
Pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Atas Dasar Harga Berlaku, yang menggambarkan rata-rata nilai tambah yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi daerah per penduduk dalam satu tahun. Indikator ini digunakan sebagai ukuran tingkat kemakmuran masyarakat serta kemampuan perekonomian daerah dalam menciptakan nilai tambah ekonomi.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, capaian PDRB per kapita Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 adalah Rp38,33 juta. Apabila dibandingkan dengan target PDRB per kapita pada akhir periode RPJMD tahun 2026 sebesar Rp28,90 juta, capaian PDRB per kapita Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 sebesar Rp38,33 juta telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan aktivitas ekonomi daerah mampu meningkatkan rata-rata pendapatan masyarakat lebih cepat dari yang direncanakan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Capaian PDRB per Kapita menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, PDRB per kapita tercatat sebesar Rp25,36 juta, kemudian meningkat menjadi Rp27,30 juta pada tahun 2021, dan Rp30,36 juta pada tahun 2022. Tren peningkatan tersebut berlanjut pada tahun

2023 dengan realisasi sebesar Rp33,60 juta, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp35,50 juta. Selanjutnya pada tahun 2025, PDRB per kapita Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar Rp38,33 juta.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan tersebut, tren PDRB per kapita Kabupaten Gunungkidul selama periode tahun 2020–2025 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3.29 PDRB per Kapita tahun 2020-2025

Berdasarkan perkembangan data tersebut, dapat terlihat bahwa PDRB per kapita Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan aktivitas ekonomi di berbagai sektor yang berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi daerah. Selain itu, peningkatan PDRB per kapita juga menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi masyarakat yang tercermin dari meningkatnya rata-rata pendapatan per penduduk.

Peningkatan PDRB per kapita tersebut dipengaruhi oleh perkembangan berbagai sektor ekonomi daerah serta peningkatan investasi dan infrastruktur. Analisis lebih rinci mengenai faktor-faktor pengungkit yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja ekonomi daerah dijelaskan pada capaian masing-masing sasaran yang mendukung pencapaian tujuan ini.

Analisis Perbandingan (*benchmarking*) PDRB per kapita Kabupaten Gunungkidul dengan kabupaten/kota lain di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi kinerja ekonomi daerah, dilakukan analisis perbandingan (*benchmarking*) PDRB per kapita Kabupaten Gunungkidul dengan kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui posisi relatif tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunungkidul dibandingkan dengan daerah lain di tingkat provinsi.

Berdasarkan data PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2025, rata-rata PDRB per kapita Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebesar Rp55,04 juta per kapita per tahun. Sementara itu, pada tingkat kabupaten/kota, Kota Yogyakarta menempati posisi tertinggi dengan nilai Rp140,64 juta per kapita, diikuti oleh Kabupaten Sleman sebesar Rp58,6 juta, Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp40,07 juta, Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp38,33 juta, dan Kabupaten Bantul sebesar Rp38,19 juta. Berdasarkan perbandingan tersebut, Kabupaten Gunungkidul berada pada peringkat keempat dari lima kabupaten/kota di DIY dengan nilai PDRB per kapita Rp38,33 juta, masih berada di bawah rata-rata provinsi sebesar Rp55,04 juta. Meskipun demikian, nilai PDRB per kapita Kabupaten Gunungkidul relatif mendekati Kabupaten Kulon Progo serta sedikit lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Bantul. Sementara itu, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman memiliki nilai yang jauh lebih tinggi karena didukung oleh struktur ekonomi perkotaan yang didominasi sektor jasa, perdagangan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi bernilai tambah tinggi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara nominal PDRB per kapita Kabupaten Gunungkidul masih berada di bawah rata-rata provinsi, perkembangan aktivitas ekonomi daerah menunjukkan kondisi yang cukup baik dan memiliki potensi untuk terus meningkat melalui penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah serta peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Secara umum, peningkatan kinerja ekonomi daerah didorong oleh berkembangnya berbagai sektor ekonomi, peningkatan investasi, serta pembangunan infrastruktur yang memperkuat konektivitas wilayah dan memperlancar aktivitas perekonomian masyarakat.

Peningkatan PDRB per kapita tersebut merupakan hasil dari berkembangnya sektor-sektor ekonomi daerah serta dukungan investasi dan infrastruktur. Analisis lebih rinci mengenai faktor-faktor pengungkit yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja ekonomi tersebut dijelaskan pada capaian masing-masing sasaran yang mendukung pencapaian tujuan ini.

Dalam rangka mencapai tujuan Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menetapkan beberapa sasaran strategis yang berperan sebagai faktor pengungkit peningkatan kinerja perekonomian daerah. Sasaran tersebut meliputi pengelolaan potensi sumber daya daerah meningkat, pembangunan kawasan yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta nilai investasi meningkat.

Ketiga sasaran tersebut saling mendukung dalam mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi daerah. Pengelolaan sumber daya alam dan penguatan perekonomian masyarakat meningkatkan aktivitas ekonomi produktif, pembangunan kawasan memperkuat konektivitas dan efisiensi kegiatan ekonomi, sedangkan peningkatan investasi memperluas kapasitas produksi dan membuka lapangan kerja. Sinergi dari ketiga sasaran tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah yang tercermin dalam peningkatan PDRB per kapita.

Selanjutnya, untuk melihat kontribusi masing-masing sasaran terhadap pencapaian tujuan tersebut, disajikan analisis capaian kinerja pada setiap sasaran beserta indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Sasaran 5 : Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Masyarakat Meningkat

Capaian sasaran Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Masyarakat Meningkat diukur melalui dua indikator kinerja utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan indeks gini. Kedua indikator tersebut digunakan untuk menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi daerah, baik dari sisi peningkatan aktivitas ekonomi maupun pemerataan pendapatan masyarakat.

Pengukuran capaian sasaran ini didasarkan pada data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil pengukuran kinerja indikator pada tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.33
Pengukuran Capaian Sasaran Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Masyarakat Meningkat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,16	5,47	106	Sangat Tinggi
2.	Indeks Gini	0,322	0,333	96,58	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian Kinerja				109,75	Sangat tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,47 persen, melampaui target sebesar 5,16 persen dengan capaian kinerja 106 persen dan termasuk kategori sangat tinggi. Sementara itu, indeks gini tercatat sebesar 0,333 dibandingkan target sebesar 0,322 dengan capaian kinerja 96,58 persen, yang juga berada dalam kategori sangat tinggi.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 109,75 persen dengan kategori sangat tinggi, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mampu terjaga dengan baik disertai upaya menjaga tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat tetap terkendali.

Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai dinamika kinerja tersebut, berikut disajikan analisis capaian masing-masing indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi dan indeks gini.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menggambarkan dinamika aktivitas perekonomian suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dalam suatu wilayah dalam periode tertentu. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya mencerminkan perkembangan kegiatan ekonomi daerah, tetapi juga menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul dalam beberapa tahun terakhir serta perbandingannya dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.33
Realisasi Pertumbuhan Ekonomi 2025 dan Capaiannya terhadap Target Akhir Tahun 2026 RPJMD 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target 2026 (Akhir RPJMD)	Capaian 2025 terhadap 2026 (%)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,16	5,47	106	4,50	106,89

Berdasarkan data tersebut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,47 persen, Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 4,50 persen, capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2025 telah melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 106,89 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomian daerah mampu tumbuh lebih baik dibandingkan dengan proyeksi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melihat posisi kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul secara lebih komprehensif, dilakukan analisis perkembangan pertumbuhan ekonomi secara runtut antar tahun (*time series*) sekaligus perbandingan dengan kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta serta tingkat provinsi dan nasional, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.35 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota/Provinsi dan Nasional Tahun 2022-2025 (persen)

Wilayah	2022	2023	2024	2025	Perubahan 2024 -2025 (%)
Kulonprogo	6,58	5,65	4,77	4,36	-8,59
Gunungkidul	5,37	5,04	4,81	5,47	+13,72
Bantul	5,19	5,06	5,04	4,92	-2,38
Sleman	5,15	5,09	5,19	6,53	+25,82
Kota Yogyakarta	5,12	5,08	5,05	4,95	-1,98
Provinsi DIY	5,15	5,07	5,03	5,49*	+9,15
Nasional	5,31	5,05	5,03	5,11	+1,59

Sumber : BPS, diolah

Ket : *Angka Sementara

Berdasarkan tabel tersebut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 sebesar 5,47 persen menunjukkan kinerja yang relatif bersaing dengan daerah lain. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Kulon Progo (4,36 persen), Kabupaten Bantul (4,92 persen), dan Kota Yogyakarta (4,95 persen). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Gunungkidul hanya berada di bawah Kabupaten Sleman yang mencapai 6,53 persen, yang didukung oleh struktur ekonomi perkotaan dengan dominasi sektor jasa, perdagangan, serta kegiatan ekonomi bernilai tambah tinggi.

Apabila dibandingkan dengan tingkat yang lebih luas, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul juga berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,11 persen, serta relatif mendekati pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY sebesar 5,49 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika perekonomian Kabupaten Gunungkidul mampu berkembang secara positif dan memiliki daya saing yang cukup baik di tingkat regional.

Jika dilihat dari perkembangan tahun sebelumnya, kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 4,81 persen pada tahun 2024 menjadi 5,47 persen pada tahun 2025 atau mengalami kenaikan sekitar 13,72 persen. Persentase peningkatan tersebut lebih tinggi dibandingkan peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY yang mencapai sekitar 9,15 persen maupun nasional yang hanya meningkat sekitar 1,59 persen.

Selain itu, dari lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul yang mengalami peningkatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, sementara daerah lainnya mengalami perlambatan. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Gunungkidul menempati posisi sebagai daerah dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di DIY. Capaian ini menjadi cukup signifikan apabila dilihat dari karakteristik wilayah Kabupaten Gunungkidul yang sebagian besar masih didominasi wilayah perdesaan dengan struktur perekonomian yang bertumpu pada sektor primer serta kegiatan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Sementara itu, Kabupaten Sleman selain memiliki karakteristik wilayah perkotaan dengan dominasi sektor jasa dan perdagangan, juga memperoleh dorongan dari pembangunan infrastruktur berskala nasional seperti Proyek Strategis Nasional Jalan Tol Yogyakarta–Bawen yang berpotensi meningkatkan konektivitas dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Berdasarkan distribusi dan laju pertumbuhan PDRB tahun 2025, peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul didorong oleh kombinasi kinerja sektor primer serta berkembangnya sektor jasa yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi penopang utama perekonomian daerah dengan kontribusi sebesar 25,32 persen terhadap PDRB serta mencatat pertumbuhan sebesar 11,05 persen, yang merupakan salah satu pertumbuhan tertinggi di antara seluruh lapangan usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor berbasis sumber daya alam masih menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain sektor primer, pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh meningkatnya aktivitas pada sektor jasa yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat dan perkembangan pariwisata. Hal ini terlihat dari pertumbuhan pada sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,92 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,95 persen, serta Jasa Lainnya sebesar 7,58 persen. Pertumbuhan pada sektor-sektor tersebut mencerminkan semakin berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatnya pergerakan barang, jasa, dan wisatawan di Kabupaten Gunungkidul. Sementara itu, sektor Perdagangan dan Reparasi yang juga memiliki kontribusi relatif besar terhadap perekonomian daerah tercatat tumbuh sebesar 5,7 persen, menunjukkan bahwa aktivitas distribusi barang dan perdagangan masyarakat tetap berjalan secara stabil dalam menopang dinamika ekonomi daerah.

Apabila dilihat secara lebih strategis, terdapat beberapa sektor yang berperan sebagai pengungkit utama pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai basis ekonomi masyarakat, sektor Perdagangan dan Reparasi yang memperkuat aktivitas distribusi barang dan jasa, serta sektor Transportasi dan Akomodasi yang berkembang seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas pariwisata. Sinergi dari sektor-sektor tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul tidak hanya ditopang oleh sektor primer, tetapi juga mulai diperkuat oleh perkembangan sektor jasa yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, struktur pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul didorong oleh sinergi antara sektor primer sebagai basis ekonomi masyarakat dengan berkembangnya sektor jasa dan perdagangan yang semakin memperkuat aktivitas ekonomi daerah. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 mencapai 5,47 persen, sekaligus menempatkan Kabupaten Gunungkidul sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga mencerminkan semakin meningkatnya dinamika aktivitas perekonomian daerah.

Indeks Gini

Selain pertumbuhan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengukur capaian kinerja pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat adalah Indeks Gini. Indeks ini menjadi parameter utama dalam menilai distribusi pendapatan dan tingkat kesenjangan ekonomi di suatu wilayah.

Indeks Gini atau *Gini Concentration Ratio* mengukur seberapa merata pendapatan diterima oleh masyarakat. Skala Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1, di mana:

- Nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna, semua penduduk menerima pendapatan yang sama.
- Nilai 1 menunjukkan ketimpangan total, di mana seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu individu atau kelompok kecil.

Menurut Michael Todaro, seorang ahli ekonomi pembangunan, kriteria umum Indeks Gini adalah:

1. 0,50 – 0,70: pemerataan sangat timpang, menunjukkan kesenjangan tinggi.
2. 0,36 – 0,49: kesenjangan sedang.
3. 0,20 – 0,35: pemerataan relatif tinggi (merata), menandakan distribusi pendapatan yang cukup adil di antara masyarakat.

Realisasi Indeks Gini Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025, beserta target untuk tahun 2026 (akhir RPJMD 2021–2026), adalah sebagai berikut:

Tabel 3.36
Indeks Gini 2025 dan Capaiannya terhadap Target Akhir Tahun 2026
RPJMD 2021-2026

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target 2026 (Akhir RPJMD)	Capaian 2025 terhadap 2026 (%)
1.	Indeks Gini	0,322	0,333	96,58	0,291	85,57

Berdasarkan tabel tersebut, Indeks Gini Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,333, lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 0,322, sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai 96,58 persen. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penurunan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat belum sepenuhnya mencapai kondisi yang ditargetkan, mengingat pada indikator Indeks Gini nilai yang lebih rendah menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan yang lebih baik.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 0,291, capaian tahun 2025 baru mencapai 85,57 persen. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan yang perlu dikejar pada tahun terakhir periode perencanaan untuk mewujudkan tingkat pemerataan pendapatan yang lebih baik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, Indeks Gini Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar 0,333, sementara target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 0,322, sehingga capaian kinerja indikator ini mencapai 96,58 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat masih sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi yang ditargetkan.

Meskipun demikian, apabila dilihat dari perkembangan antar waktu, capaian tahun 2025 menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, Indeks Gini Kabupaten Gunungkidul tercatat sebesar 0,355, sehingga pada tahun 2025 terjadi penurunan sebesar 0,022 poin. Penurunan ini

mengindikasikan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan masyarakat, yang menunjukkan bahwa manfaat aktivitas perekonomian mulai dirasakan secara lebih merata.

Untuk melihat perkembangan Indeks Gini Kabupaten Gunungkidul secara lebih komprehensif, perlu dilihat tren capaian indikator dalam beberapa tahun terakhir sekaligus perbandingan tingkat ketimpangan pendapatan dengan kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta dengan tingkat provinsi dan nasional. Perkembangan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.37 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota, Provinsi DIY dan Nasional Tahun 2021–2025

Wilayah	2021	2022	2023	2024	2025
Kulon Progo	0,367	0,38	0,402	0,373	0,351
Bantul	0,441	0,41	0,454	0,417	0,427
Gunungkidul	0,323	0,316	0,343	0,355	0,333
Sleman	0,425	0,418	0,433	0,431	0,419
Yogyakarta	0,464	0,519	0,454	0,449	0,435
D.I.Yogyakarta	0,441	0,439	0,449	0,435	0,426
Nasional	0,381	0,381	0,388	0,379	0,375

Berdasarkan perkembangan tersebut, tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan dinamika yang fluktuatif, namun pada tahun 2025 kembali menunjukkan perbaikan.

Berdasarkan data pada tabel tersebut, perkembangan Indeks Gini Kabupaten Gunungkidul selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang sempat meningkat pada tahun 2023–2024, namun kembali mengalami perbaikan pada tahun 2025. Indeks Gini yang pada tahun 2024 mencapai 0,355 menurun menjadi 0,333 pada tahun 2025 atau turun 0,022 poin. Perkembangan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan masyarakat setelah sempat mengalami peningkatan ketimpangan pada periode sebelumnya.

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2025 Indeks Gini Kabupaten Gunungkidul merupakan yang terendah, yaitu 0,333, lebih rendah dibandingkan Kabupaten Kulon Progo (0,351), Kabupaten Sleman (0,419), Kabupaten Bantul (0,427), maupun Kota Yogyakarta (0,435). Posisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Gunungkidul relatif lebih rendah dibandingkan wilayah lain di DIY.

Jika dilihat dalam konteks yang lebih luas, nilai Indeks Gini Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 juga lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi DIY sebesar 0,426 dan rata-rata nasional sebesar 0,375. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun capaian indikator belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan dalam perencanaan, struktur distribusi pendapatan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul relatif lebih merata.

Dukungan terhadap capaian pertumbuhan ekonomi dan pengendalian ketimpangan pendapatan (Indeks Gini) tidak terlepas dari perkembangan berbagai sektor ekonomi daerah. Sektor-sektor tersebut berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat di berbagai wilayah. Beberapa sektor utama yang memberikan kontribusi terhadap kinerja perekonomian daerah antara lain sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, perdagangan, industri, serta penguatan koperasi dan UMKM, yang perkembangannya diuraikan sebagai berikut..

1. Sektor Pertanian

Salah satu potensi unggulan Kabupaten Gunungkidul dalam mendukung perekonomian daerah adalah sektor pertanian. Sektor ini memiliki peran strategis karena menjadi sumber mata pencaharian masyarakat, menjaga ketahanan pangan, serta berkontribusi terhadap stabilitas harga dan pembentukan nilai tambah perekonomian daerah. Sektor pertanian terdiri dari beberapa subsektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan.

- a. Subsektor komoditas tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura.

Kontribusi sektor pertanian salah satunya tercermin dari kinerja produksi komoditas tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura. Perkembangan luas panen dan produksi komoditas tersebut selama tahun 2023–2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.38

Rata-rata Pertumbuhan Luas Tanam (Ha) dan Produksi Tanaman Pangan (Ton) Tahun 2023-2025

No	Jenis Tanaman Pangan	Luas Panen (Ha)			Produksi (Ton)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	Padi	56.266	54.385	55.595	306.416	264.237	297.507
2	Jagung	54.615	52.673	53.323	276.589	290.002	295.111
3	Kedelai	5.364	650	1.122	6.806	917	1.404
4	Ubi Kayu	43.654	43.101	41.612	927.159	725.239	779.032
5	Jambu Mete	5.489	5.360	5.280	1.038	421	385
6	Kelapa	9.718	7.497	7.749	6.931	6.787	6.650
7	Bawang Merah	155	113	173	1.709	504	1.301
8	Cabai	204	236	262	2.880	6.665	2.133

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Pangan (Diolah), 2025

Berdasarkan data pada Tabel Rata-rata Pertumbuhan Luas Tanam dan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2023–2025, sektor pertanian di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan dinamika yang bervariasi pada beberapa komoditas utama. Padi, jagung, dan ubi kayu masih menjadi komoditas dengan kontribusi produksi terbesar dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat.

Produksi padi pada tahun 2025 tercatat sebesar 297.507 ton, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 264.237 ton, meskipun masih sedikit lebih rendah dibandingkan produksi tahun 2023. Sementara itu, jagung menunjukkan tren produksi yang meningkat dalam dua tahun terakhir, dari 276.589 ton pada tahun 2023 menjadi 295.111 ton pada tahun 2025, yang mengindikasikan adanya peningkatan produktivitas pada komoditas tersebut. Di sisi lain, ubi kayu yang selama ini menjadi salah satu komoditas unggulan Gunungkidul

masih memberikan kontribusi produksi yang cukup besar meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023.

Perkembangan produksi pada beberapa komoditas tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan. Peningkatan produktivitas komoditas pangan berperan dalam menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan pendapatan petani.



Gambar 3.30 Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura



Gambar 3.31 Penyerahan Alat Pertanian dan Pembangunan Sumur

b. Subsektor peternakan

Selain tanaman pangan, subsektor lain yang juga berperan dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat adalah subsektor peternakan. Kabupaten Gunungkidul dikenal sebagai salah satu sentra ternak di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga pengembangan subsektor ini diarahkan untuk meningkatkan populasi ternak dan produksi hasil ternak guna mendukung ketahanan pangan serta kesejahteraan peternak.

Pada tahun 2025 produksi peternakan menunjukkan perkembangan yang positif. Produksi daging yang meliputi sapi potong, kambing, domba, dan unggas potong mencapai 10.349,43 ton, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 8.580,48 ton. Demikian pula produksi telur yang berasal dari ayam buras, ayam ras, itik, dan puyuh mencapai 9.311,81 ton, meningkat dari tahun 2024 yang sebesar 8.391,38 ton.

Peningkatan produksi tersebut menunjukkan bahwa subsektor peternakan memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat perdesaan serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Perkembangan sektor ini juga turut mendorong aktivitas ekonomi lokal yang pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan masyarakat.



Gambar 3.32
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan

c. Subsektor Perikanan

Sebagai salah satu kawasan minapolitan di Indonesia, pengembangan sektor kelautan dan perikanan menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan produksi perikanan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat pesisir. subsektor perikanan juga menjadi salah satu potensi daerah yang diharapkan mampu mendorong pendapatan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.

Perikanan budidaya maupun perikanan tangkap memiliki peran penting tidak hanya dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga dalam meningkatkan pendapatan masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya pada sektor tersebut. Hal ini tercermin dari pendapatan per kapita masyarakat perikanan yang mengalami peningkatan dari Rp39.599.314,96 pada tahun 2024 menjadi Rp45.073.623,00 pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja usaha perikanan serta meningkatnya nilai ekonomi hasil tangkapan maupun budidaya.

Secara sederhana, salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan nelayan adalah Nilai Tukar Nelayan (NTN), yaitu perbandingan antara pendapatan yang diterima nelayan dari hasil penjualan ikan dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk kebutuhan usaha maupun kebutuhan rumah tangga. Interpretasinya, apabila nilai NTN berada di atas 100, maka pendapatan nelayan relatif lebih besar dibandingkan pengeluarannya sehingga kondisi kesejahteraan nelayan cenderung membaik.

Sepanjang tahun 2025, NTN di Kabupaten Gunungkidul cenderung berada di atas angka 100, yang menunjukkan bahwa tingkat pendapatan nelayan relatif mampu mengimbangi bahkan melampaui pengeluaran rumah tangga nelayan. Bahkan pada November 2025 NTN mencapai 104,94, dan pada Desember 2025 kembali meningkat sebesar 0,36 persen menjadi 105,32. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa usaha perikanan masih memberikan margin pendapatan yang positif bagi nelayan, sehingga mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Peningkatan pendapatan tersebut antara lain dipengaruhi oleh pergeseran aktivitas nelayan yang mulai banyak menangkap lobster yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi, meningkatnya harga serta produksi perikanan budidaya, serta semakin berkembangnya aktivitas usaha perikanan di wilayah pesisir.

Perkembangan tersebut memberikan dampak terhadap meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, bertambahnya pendapatan rumah tangga nelayan, serta berkembangnya usaha perikanan dan perdagangan hasil tangkapan. Kondisi ini pada akhirnya turut mendukung penguatan ekonomi lokal berbasis sumber daya kelautan, yang berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperluas pemerataan pendapatan masyarakat.

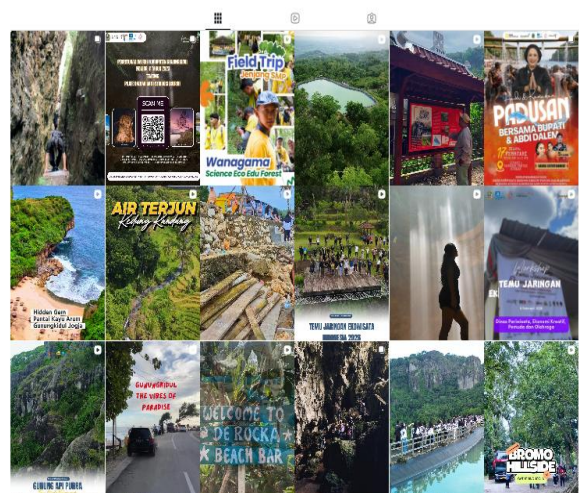
2. Sektor Pariwisata

Potensi daerah lain yang dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adalah pengelolaan sektor pariwisata daerah. Industri pariwisata memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi karena mampu menggerakkan berbagai sektor usaha lain sebagai pendukungnya (multiplier effect). Komponen utama dalam industri pariwisata meliputi daya tarik wisata berupa destinasi dan atraksi wisata, perhotelan, restoran, serta transportasi lokal, sedangkan komponen pendukungnya mencakup berbagai sektor usaha lain seperti transportasi, makanan dan minuman, perbankan, hingga sektor manufaktur. Perkembangan sektor-sektor tersebut sangat dipengaruhi oleh jumlah kunjungan wisatawan serta besaran nilai belanja wisatawan di suatu daerah.

Pada tahun 2025, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Gunungkidul tercatat sebanyak 3.298.392 wisatawan, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 3.286.940 wisatawan. Sejalan dengan peningkatan jumlah kunjungan tersebut, nilai belanja wisatawan pada tahun 2025 juga tercatat sebesar Rp589.247,00. Peningkatan jumlah kunjungan dan nilai belanja wisatawan tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata masih menjadi salah satu penggerak penting dalam aktivitas ekonomi daerah.

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan nilai belanja wisatawan tersebut antara lain didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. peningkatan kualitas dan pengelolaan destinasi wisata;
- b. pengembangan atraksi wisata berbasis budaya dan masyarakat;
- c. peningkatan aksesibilitas dan sarana prasarana pendukung pariwisata;
- d. penyelenggaraan event atau festival daerah yang mampu menarik kunjungan wisatawan;
- e. meningkatnya promosi dan pemasaran pariwisata daerah.



Promosi Wisata Melalui Medsos (Online) dan Penyebaran Leaflet

Gambar 3.33 Kegiatan Peningkatan Sektor Pariwisata

Perkembangan sektor pariwisata tersebut memberikan dampak terhadap meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor perdagangan, jasa, akomodasi, kuliner, transportasi lokal, serta usaha mikro dan kecil di sekitar kawasan wisata. Peningkatan kunjungan wisatawan juga mendorong bertambahnya peluang usaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Kondisi ini pada akhirnya turut mendukung penguatan perekonomian daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi lokal sekaligus memperluas distribusi pendapatan masyarakat, yang tercermin dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta upaya pengendalian tingkat ketimpangan pendapatan (Indeks Gini).

3. Sektor Koperasi dan UMKM

Upaya penguatan perekonomian masyarakat juga dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Koperasi memiliki

peran strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan karena mampu menghimpun dan menggerakkan potensi ekonomi anggota serta masyarakat secara kolektif. Pada tahun 2025, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi menunjukkan kinerja yang sangat baik, yang tercermin dari realisasi omzet koperasi aktif sebesar Rp107.319.590.155,00, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp102.771.286.148.

Capaian tersebut didukung oleh berbagai upaya penguatan kelembagaan koperasi, antara lain melalui penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi, monitoring dan pengawasan koperasi, sosialisasi serta penilaian kesehatan koperasi, pembinaan usaha koperasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi. Penguatan kelembagaan tersebut mendorong meningkatnya aktivitas usaha koperasi dan memperluas layanan ekonomi kepada anggota. Kondisi ini berkontribusi pada meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat serta memperkuat akses permodalan bagi pelaku usaha, yang pada akhirnya turut mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperluas pemerataan pendapatan masyarakat. Alam baik berupa sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata,

Selain koperasi, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi penggerak penting dalam perekonomian daerah. Pengembangan UMKM merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat karena sektor ini mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta menciptakan peluang usaha baru.

Pada tahun 2025, pertumbuhan omzet UMKM binaan menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan capaian sebesar 17,60 persen, yang menunjukkan adanya perkembangan aktivitas usaha pelaku UMKM di daerah. Peningkatan tersebut didukung oleh berbagai program pemberdayaan UMKM, antara lain melalui pendataan pelaku usaha, fasilitasi kemitraan usaha, kemudahan perizinan melalui Nomor Induk

Berusaha (NIB), sosialisasi sertifikasi halal dan PIRT, pelatihan dan pembinaan kewirausahaan, serta monitoring dan pendampingan usaha.

Selain itu, pengembangan usaha mikro juga diarahkan pada peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil melalui pelatihan digital marketing, fasilitasi pameran produk dalam daerah, serta pembinaan promosi dan pemasaran produk UMKM. Berbagai upaya tersebut mendorong peningkatan kapasitas usaha masyarakat serta memperluas peluang pasar bagi produk lokal. Dengan meningkatnya aktivitas usaha dan pendapatan pelaku UMKM, sektor ini berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat pemerataan distribusi pendapatan di daerah.

4. Sektor Perdagangan

Pertumbuhan ekonomi daerah juga didukung oleh perkembangan sektor perdagangan yang berperan dalam memperlancar distribusi barang dan jasa serta meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat. Aktivitas perdagangan, khususnya di pasar rakyat, menjadi salah satu indikator penting dalam menggambarkan dinamika ekonomi lokal.

Pada tahun 2025, nilai sektor perdagangan tercatat sebesar Rp1.798.635.881.500,00, meningkat sebesar 1,70 persen dibandingkan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp1.768.498.150.000,00. Nilai tersebut diperoleh dari akumulasi omzet penjualan pedagang di pasar rakyat yang mencerminkan aktivitas transaksi ekonomi masyarakat.

Peningkatan nilai sektor perdagangan menunjukkan adanya pertumbuhan aktivitas jual beli serta meningkatnya perputaran ekonomi di tingkat lokal. Kondisi ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha perdagangan, memperluas peluang kerja di sektor informal, serta mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, perkembangan sektor perdagangan turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mendukung pemerataan pendapatan masyarakat.

5. Sektor Perdagangan

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah juga dilakukan melalui penguatan sektor perdagangan yang berperan dalam memperlancar distribusi barang dan jasa serta meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat. Aktivitas perdagangan, khususnya yang berlangsung di pasar rakyat, menjadi salah satu indikator penting dalam menggambarkan dinamika perekonomian daerah karena berkaitan langsung dengan aktivitas transaksi masyarakat.

Pengukuran nilai sektor perdagangan dilakukan dengan membandingkan nilai perdagangan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, yang dihitung berdasarkan akumulasi omzet penjualan seluruh pedagang di pasar rakyat. Pada tahun 2025, nilai sektor perdagangan tercatat sebesar Rp1.798.635.881.500,00, meningkat 1,70 persen dibandingkan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp1.768.498.150.000,00. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan aktivitas transaksi ekonomi masyarakat serta meningkatnya perputaran barang dan jasa di tingkat lokal.

Peningkatan realisasi nilai perdagangan tersebut didukung oleh berbagai upaya pemerintah daerah, antara lain melalui pengawasan perizinan usaha perdagangan terutama pada toko modern, swalayan, agen dan pangkalan gas LPG; pelaksanaan operasi pasar atau pasar murah secara rutin untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bekerja sama dengan BULOG dan distributor; serta partisipasi dalam kegiatan promosi perdagangan melalui pameran berskala nasional seperti INACRAFT di Jakarta dan JIFFINA Expo di Yogyakarta. Selain itu, pemerintah daerah juga melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) guna menjamin kepastian transaksi perdagangan, serta memberikan pelatihan e-commerce kepada pelaku usaha agar mampu beradaptasi dengan perkembangan perdagangan berbasis digital.

Berbagai upaya tersebut berkontribusi dalam meningkatkan aktivitas perdagangan masyarakat, memperkuat kepercayaan konsumen dalam transaksi perdagangan, serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal. Kondisi ini pada akhirnya turut mendorong peningkatan pendapatan pelaku usaha perdagangan dan memperkuat perputaran ekonomi daerah, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung pemerataan pendapatan masyarakat..



Gambar 3.34 Kegiatan Operasi Pasar dan Pameran Produk IKM

6. Sektor Perindustrian

Sektor perindustrian juga menjadi salah satu penggerak perekonomian daerah melalui pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) yang mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal serta memperluas kesempatan kerja masyarakat. Pengembangan sektor ini

diarahkan pada penguatan kapasitas produksi, peningkatan kualitas produk, serta perluasan akses pasar bagi pelaku industri kecil di daerah.

Pada tahun 2025, pertumbuhan sektor industri tercatat sebesar 15 persen. Capaian ini melanjutkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, yaitu 3 persen pada tahun 2022, 6 persen pada tahun 2023, 10 persen pada tahun 2024, dan meningkat menjadi 15 persen pada tahun 2025.

Peningkatan kinerja sektor industri tersebut didukung oleh berbagai upaya pengembangan industri kecil dan menengah melalui kegiatan pembinaan, pendampingan, serta fasilitasi pengembangan sentra industri di Kabupaten Gunungkidul. Upaya tersebut mendorong peningkatan kapasitas usaha pelaku industri kecil, memperkuat daya saing produk lokal, serta memperluas peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat

6. Pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat

Selain sektor ekonomi produktif, pengembangan ragam budaya berbasis pemberdayaan masyarakat juga menjadi salah satu upaya penting dalam mendukung pencapaian sasaran pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat. Pengembangan budaya tidak hanya berperan dalam menjaga identitas dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, memperkuat kepercayaan diri komunitas, serta menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam berkarya.

Pada tahun 2025, realisasi pengembangan budaya di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan hasil yang positif dengan capaian Indeks Pelestarian Budaya sebesar 91,34 persen. Capaian ini didukung oleh meningkatnya jumlah kalurahan kantong budaya yang berkembang menjadi kalurahan rintisan budaya sebanyak 63 kalurahan, terselenggaranya 214 event kebudayaan, serta terealisasinya 21 objek warisan budaya yang berhasil dilestarikan.

Berbagai upaya tersebut memberikan dampak berupa meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya, berkembangnya ekonomi kreatif berbasis budaya, serta semakin kuatnya daya tarik budaya daerah yang dapat mendukung pengembangan pariwisata dan kegiatan ekonomi masyarakat. Kondisi ini pada akhirnya

turut berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 3.35 Kegiatan Even Budaya

Berbagai upaya pembangunan yang dilaksanakan melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, budaya, koperasi, UMKM, perdagangan, dan industri menunjukkan kontribusi yang saling mendukung dalam mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Peningkatan produksi sektor primer, berkembangnya kegiatan usaha masyarakat, bertambahnya aktivitas perdagangan, serta tumbuhnya industri dan ekonomi kreatif berbasis budaya telah memberikan dampak antara berupa meningkatnya kesempatan kerja, bertambahnya pendapatan masyarakat, serta semakin berkembangnya aktivitas ekonomi lokal di berbagai wilayah.

Namun, dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa tantangan dan kendala yang mempengaruhi optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam dan pengembangan perekonomian masyarakat. Oleh

karena itu, berikut disajikan identifikasi terhadap faktor pendukung, permasalahan yang dihadapi, serta arah perbaikan ke depan.

Tabel 3.39 Analisis Faktor Penghambat, Faktor Pendukung, Upaya Perbaikan, dan Dampak terhadap Capaian Kinerja Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Masyarakat Meningkatkan

Kategori / Aspek	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Upaya dan Arah Perbaikan	Dampak terhadap Pencapaian Sasaran
Pertanian	Ketersediaan infrastruktur pendukung seperti sumber air/sumur, kepastian alokasi pupuk bersubsidi, modernisasi alat mesin pertanian (alsintan), dukungan kelompok tani dan ketersediaan lahan pertanian	Pola pertanian masih konvensional, regenerasi petani rendah, pemanfaatan teknologi pertanian dan digitalisasi masih terbatas, produktivitas dipengaruhi kondisi iklim	Pengembangan pertanian terpadu dan penggunaan teknologi pertanian modern, pelatihan pertanian digital dan smart farming, program petani milenial untuk meningkatkan minat generasi muda, penguatan kelembagaan kelompok tani serta peningkatan sarana irigasi	Produktivitas pertanian meningkat dan keberlanjutan sektor pertanian lebih terjaga sebagai penopang ekonomi masyarakat
Perikanan	Program pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan, bantuan sarana budidaya (benih, pakan, peralatan), pembinaan kelompok nelayan dan pengelolaan TPI, potensi sumber daya perikanan	Infrastruktur perikanan tangkap terbatas (TPI, pabrik es, SPBN), skala usaha dan teknologi nelayan masih sederhana, SDM pengelola TPI terbatas, diversifikasi	Peningkatan fasilitas TPI dan sarana perikanan (pabrik es, cold storage), pelatihan teknologi penangkapan dan manajemen usaha nelayan, penguatan kelembagaan nelayan/KUB, pengembangan diversifikasi produk	Produksi dan kualitas hasil perikanan meningkat serta mendorong peningkatan pendapatan nelayan

Kategori / Aspek	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Upaya dan Arah Perbaikan	Dampak terhadap Pencapaian Sasaran
	laut dan budidaya	produk olahan ikan rendah	olahan dan pemasaran hasil perikanan	
Pariwisata	Keindahan alam dan destinasi unik, dukungan budaya dan tradisi lokal, promosi melalui media digital dan pameran, pemanfaatan platform informasi pariwisata, dukungan event wisata	Cuaca ekstrem yang mempengaruhi kunjungan, risiko keselamatan di wisata pantai, keterbatasan SDM pengelola wisata, keterbatasan anggaran infrastruktur	Peningkatan sarana prasarana destinasi wisata, penguatan sistem keselamatan wisata (lifeguard, rambu keselamatan, SOP wisata pantai), peningkatan kapasitas SDM pariwisata, penguatan promosi digital dan penyelenggaraan event wisata	Kunjungan wisata lebih stabil, meningkatnya rasa aman wisatawan, serta meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah
UMKM dan Ekonomi Kreatif	Program pemberdayaan UMKM, fasilitasi perizinan usaha (NIB), sertifikasi halal dan PIRT, pelatihan kewirausahaan dan digital marketing, pameran produk UMKM	Nilai tambah produk lokal masih rendah, kapasitas manajemen dan pemasaran pelaku usaha terbatas, akses pasar dan daya saing produk masih terbatas	Pendampingan peningkatan kualitas produk dan kemasan, fasilitasi sertifikasi produk, penguatan pemasaran digital dan marketplace, pengembangan kemitraan usaha dan akses pembiayaan	Daya saing produk UMKM meningkat serta memperluas akses pasar dan pertumbuhan usaha
Perdagangan	Pengawasan perizinan usaha, pelaksanaan operasi pasar, pameran perdagangan, pelatihan e-	Fluktuasi harga bahan pokok, transformasi digital perdagangan belum merata, daya beli	Penguatan pengawasan distribusi barang dan stabilisasi harga, peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam	Stabilitas harga lebih terjaga serta meningkatnya nilai transaksi perdagangan daerah

Kategori / Aspek	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Upaya dan Arah Perbaikan	Dampak terhadap Pencapaian Sasaran
	commerce bagi pelaku usaha, dukungan distribusi barang pokok	masyarakat fluktuatif	perdagangan digital, promosi produk daerah melalui pameran dan marketplace	
Perindustrian	Ketersediaan pelaku industri kecil dan menengah (IKM), dukungan program pembinaan dan pelatihan industri, potensi bahan baku lokal, serta adanya promosi produk melalui pameran dan pemasaran digital	Nilai tambah produk industri masih rendah, teknologi produksi masih sederhana, kapasitas SDM pelaku industri terbatas, akses pasar dan permodalan masih terbatas	Peningkatan kapasitas SDM pelaku industri melalui pelatihan dan pendampingan, fasilitasi penggunaan teknologi produksi yang lebih modern, penguatan kemitraan usaha dan akses pembiayaan, serta pengembangan promosi dan pemasaran produk industri	Produktivitas dan daya saing industri daerah meningkat serta mendorong peningkatan nilai tambah produk lokal dan penyerapan tenaga kerja
Pelestarian Budaya	Pengembangan desa/kantong budaya, penyelenggaraan event budaya, penetapan warisan budaya menjadi cagar budaya, dukungan komunitas seni dan budaya	Pelestarian nilai budaya belum optimal, jumlah desa budaya terbatas, SDM pengelola budaya terbatas	Sosialisasi nilai budaya kepada masyarakat, pembinaan pelaku seni dan lembaga adat, pengembangan desa budaya, penyelenggaraan festival budaya	Pelestarian budaya semakin kuat serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya

Upaya mencapai keberhasilan capaian sasaran pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat dilaksanakan melalui Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan. Realisasi anggaran seperti dalam tabel berikut:

Tabel 3.40
Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Perekonomian Masyarakat Meningkat

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan	49.229.089.973	48.120.755.311	97,75	1.108.334.662	2,25

Realisasi anggaran pada Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam mendukung pencapaian sasaran pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat. Dari total anggaran sebesar Rp49.229.089.973, terealisasi sebesar Rp48.120.755.311 atau mencapai 97,75% dari pagu anggaran yang tersedia. Tingkat penyerapan anggaran tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan yang direncanakan dalam program ini telah dilaksanakan secara optimal.

Selisih antara anggaran dan realisasi sebesar Rp1.108.334.662 atau sekitar 2,25% menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Efisiensi tersebut dapat terjadi karena adanya optimalisasi pelaksanaan kegiatan, efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa, maupun penyesuaian kebutuhan riil di lapangan tanpa mengurangi capaian output program yang telah direncanakan.

Secara keseluruhan, tingkat penyerapan anggaran yang tinggi dengan selisih yang relatif kecil mengindikasikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program telah berjalan cukup efektif dan efisien. Hal ini turut mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka penguatan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan potensi ekonomi lokal yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran 6: Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan

Sasaran Strategis Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan merupakan bagian dari upaya pencapaian Misi 2 RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021–2026, yaitu “Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah”, dengan tujuan terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi. Sasaran ini diarahkan untuk memastikan bahwa pembangunan kawasan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.

Dalam implementasinya, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggunakan dua indikator kinerja utama, yaitu Indeks Infrastruktur Daerah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan kawasan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, capaian sasaran strategis tersebut menunjukkan kondisi sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.41
Pengukuran Capaian Sasaran Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1.	Indeks Infrastruktur Daerah	75	74,26	99,01	Sangat Tinggi
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,38	77,66	107,29	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian Kinerja				103,15	Sangat tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, Sasaran Strategis Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan menunjukkan capaian yang sangat baik. Indeks Infrastruktur Daerah terealisasi sebesar 74,26 dari target 75, atau mencapai 99,01%, yang berada pada kategori sangat tinggi dan

menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur daerah hampir sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terealisasi sebesar 77,66 dari target 72,38, atau mencapai 107,29%, yang juga berada pada kategori sangat tinggi dan mencerminkan keberhasilan pengendalian kualitas lingkungan di atas target yang direncanakan.

Dengan demikian, rata-rata capaian kinerja sasaran ini sebesar 103,15%, yang berada pada kategori sangat tinggi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kawasan di Kabupaten Gunungkidul telah berjalan relatif seimbang antara penguatan infrastruktur dan keberlanjutan lingkungan, sehingga mendukung terwujudnya pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Penjelasan dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

Indeks Infrastruktur Daerah

Indeks Infrastruktur Daerah pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 75 dan terealisasi sebesar 74,26 atau mencapai 99,01%. Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur daerah telah berjalan secara optimal dalam mendukung konektivitas wilayah, aksesibilitas layanan dasar, serta aktivitas perekonomian masyarakat.

Meskipun realisasi belum sepenuhnya mencapai target, tingkat capaian yang mendekati 100% mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan infrastruktur telah berjalan efektif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan kawasan yang terintegrasi. Nilai Indeks Infrastruktur Daerah tersebut berasal dari hasil perhitungan yang disampaikan secara resmi oleh Bapperidda Kabupaten Gunungkidul melalui surat Nomor B/400.1.3/1/2026 tentang Laporan Capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.

Perbandingan realisasi Indeks Infrastruktur Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2025, serta target dan capaian kinerja terhadap tahun akhir RPJMD 2021-2026 adalah:

Tabel 3.42 Indeks Infrastruktur Kabupaten Gunungkidul 2022-2025 dan Capaian 2025 terhadap Target Tahun Akhir RPJMD 2021-2026

Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026 (Akhir RPJMD)	Capaian 2025 terhadap 2026 (%)
65,90	71,79	72,16	74,26	85	87,36

Indeks Infrastruktur Daerah menunjukkan tren meningkat sepanjang periode RPJMD. Realisasi tahun 2022 sebesar 65,90, meningkat menjadi 71,79 pada 2023, 72,16 pada 2024, dan 74,26 pada 2025. Secara kumulatif terjadi kenaikan 8,36 poin dalam empat tahun terakhir, yang mencerminkan perbaikan bertahap kualitas infrastruktur daerah.

Pada tahun 2025, capaian terhadap target tahunan (75) mencapai 99,01%, menunjukkan pelaksanaan program berjalan efektif. Namun dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2026 sebesar 85, capaian 2025 baru mencapai 87,36%, sehingga masih terdapat selisih 10,74 poin. Indeks Infrastruktur Daerah sebesar 74,26 diperoleh dari komponen penghitung sebagai berikut:

Tabel 3.43 Komponen Penghitung Indeks Infrastruktur Daerah Tahun 2025

Komponen	Realisasi	Bobot (Persen)	Indeks
Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap	62,39	20	12,48
Persentase keluarga yang memiliki akses air minum perpipaan	49,17	5	2,46
Persentase keluarga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah layak	99,30	30	29,79
Persentase bangunan gedung kapanewon dan instansi perangkat daerah kabupaten kondisi baik	86,79	23	20,48
Persentase luasan Daerah Irigasi (DI) kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	28,70	5	1,43
Persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani	0	2	0
Persentase jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tertangani	26,83	5	1,35
Persentase ketersediaan sarpras lalu lintas	62,54	10	6,25
INDEKS INFRASTRUKTUR DAERAH		100	74,26

Capaian pembangunan infrastruktur pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum

Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum diukur dengan indikator Nilai Infrastruktur Pekerjaan Umum. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum menunjukkan capaian yang sangat baik. Dari target sebesar 72,28 terealisasi sebesar 72,92 sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100,88% dan termasuk dalam kategori sangat tinggi. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas infrastruktur dasar secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Capaian tersebut didukung oleh kinerja pada enam indikator sebagai berikut:

a. Jumlah Daerah Irigasi (DI) dalam Kondisi Baik

Terjadi peningkatan dari 46 DI menjadi 48 DI dalam kondisi baik, yang menunjukkan efektivitas upaya peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi guna mendukung keberlanjutan sektor pertanian.

b. Persentase Kepala Keluarga Berakses Air Minum Layak

Realisasi sambungan rumah sebanyak 1.342 SR melampaui target 1.184 SR. Hal ini menunjukkan optimalisasi perluasan jaringan air minum perpipaan dan peningkatan akses masyarakat terhadap air minum yang layak.

c. Persentase Cakupan Kepala Keluarga dengan Akses Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pembangunan 102 tangki septik individu dari target 92 unit menunjukkan capaian yang melampaui target serta berkontribusi terhadap peningkatan sanitasi dan kualitas kesehatan lingkungan.

d. Persentase Ketersediaan Sarpras Persampahan

Penyediaan 17 TPST/TPS 3R terealisasi sesuai target tahunan dari total kebutuhan 25 unit. Hal ini menunjukkan progres yang konsisten dalam penguatan sistem pengelolaan sampah secara bertahap dan berkelanjutan.

e. Persentase Keandalan Gedung Pemerintah

Realisasi 47 bangunan dari target 50 bangunan (94%) menunjukkan kinerja yang baik meskipun belum sepenuhnya mencapai target. Upaya renovasi dan pembangunan tetap meningkatkan fungsi dan standar keandalan aset pemerintah daerah.

f. Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik

Pelaksanaan pembangunan, rekonstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan rutin jalan mendukung peningkatan kemantapan jalan kabupaten serta memperkuat konektivitas dan mobilitas wilayah.

Secara keseluruhan, keenam indikator tersebut menunjukkan bahwa intervensi yang dilaksanakan tidak hanya memenuhi target output, tetapi juga memberikan dampak nyata (*outcome*) terhadap peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan pelayanan publik, sehingga mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Berikut dokumentasi realisasi infrastruktur pekerjaan umum:

Pembangunan RS Pratama Ngoro-Oro 	Pengaspalan ruas jalan Pantai Sepanjang 	Pembangunan drainase Alun-alun 
SPAM Girisuko 	Pembangunan Tangki Septic 	Penanganan Luweng Bintaos 

Gambar 3.36 Dokumentasi Hasil Pekerjaan Infrastruktur Pekerjaan Umum

2. Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman

Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman diukur dengan indikator Nilai Infrastruktur Perumahan dan Permukiman. Capaian Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2025 sebesar 34,62 dari target 46,82, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 73,94% dengan kategori Sedang.

Capaian ini mengindikasikan bahwa sebagian program dan kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman. Namun demikian, tingkat realisasi belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja berada di bawah ekspektasi perencanaan awal.

Tidak tercapainya target kinerja terutama disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu belum jelasnya pendanaan dari pemerintah pusat untuk penanganan kawasan kumuh perkotaan. Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebenarnya telah berkomitmen menyediakan anggaran sebesar Rp3.000.000.000 untuk penanganan kawasan kumuh. Namun, terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta adanya perubahan nomenklatur Kementerian Pekerjaan Umum menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat, menyebabkan ketidakjelasan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut berdampak pada kebijakan penyesuaian anggaran daerah, di mana dana APBD sebesar Rp3.000.000.000 kemudian difokuskan untuk kegiatan lain, yaitu pembangunan jalan kabupaten dan jalan lingkungan. Refocusing anggaran tersebut berimplikasi pada tertundanya sebagian intervensi penanganan kawasan kumuh, sehingga target indikator tidak dapat tercapai secara optimal.

Secara keseluruhan, ketidaktercapaian target lebih dipengaruhi oleh faktor kebijakan dan pendanaan di tingkat pusat, bukan semata-mata oleh lemahnya pelaksanaan program di tingkat daerah.



Gambar 3.37

Dokumentasi Hasil Pekerjaan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

3. Meningkatnya kualitas layanan jaringan komunikasi data dan informatika

Pembangunan infrastruktur tidak hanya ditopang oleh pembangunan infrastruktur fisik tetapi juga didukung oleh penguatan infrastruktur nonfisik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks tersebut, peningkatan kualitas infrastruktur dimaknai secara lebih luas, tidak hanya mencakup sarana dan prasarana dasar seperti jalan, irigasi, air minum, sanitasi, dan permukiman, tetapi juga infrastruktur digital yang menjadi fondasi penerapan pemerintahan berbasis elektronik.

Infrastruktur digital memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik, keterbukaan informasi, integrasi sistem, serta kualitas tata kelola pemerintahan. Di Kabupaten Gunungkidul, pembangunan sektor ini dilaksanakan dalam konteks wilayah yang luas, kondisi geografis berbukit, serta masih terdapat area blankspot di beberapa titik. Tantangan

tersebut menuntut adanya pendekatan pembangunan yang adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

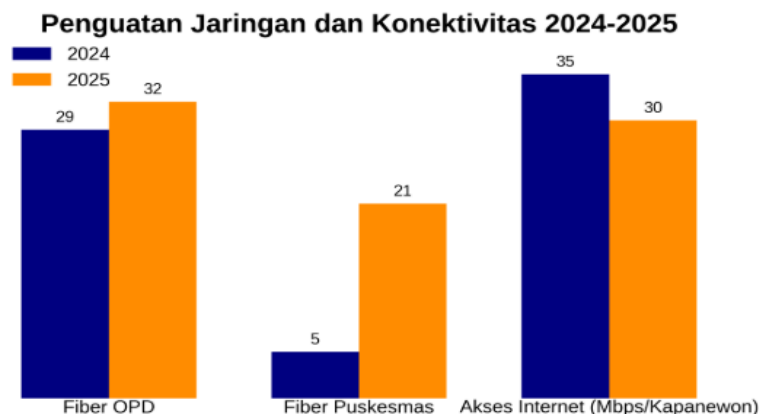
Keberhasilan pembangunan tersebut tercermin dari meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika yang diukur melalui Indeks Kepuasan Layanan Komunikasi dan Informatika Pemerintah. Indikator ini menjadi ukuran utama dalam menilai persepsi dan kepuasan terhadap layanan yang diberikan.

Berdasarkan pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Tahun 2025, dari target yang ditetapkan sebesar 89,72 terealisasi sebesar 119,91 menunjukkan bahwa kualitas layanan komunikasi dan informatika tidak hanya memenuhi target, tetapi melampauinya secara signifikan. Capaian 115,96% menempatkan indikator ini pada kategori “Sangat Tinggi”, yang mencerminkan meningkatnya kepuasan masyarakat dan perangkat daerah terhadap layanan yang diberikan. Keberhasilan pembangunan komunikasi dan informatika ditopang oleh empat aspek utama, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas layanan jaringan komunikasi data dan informatika;

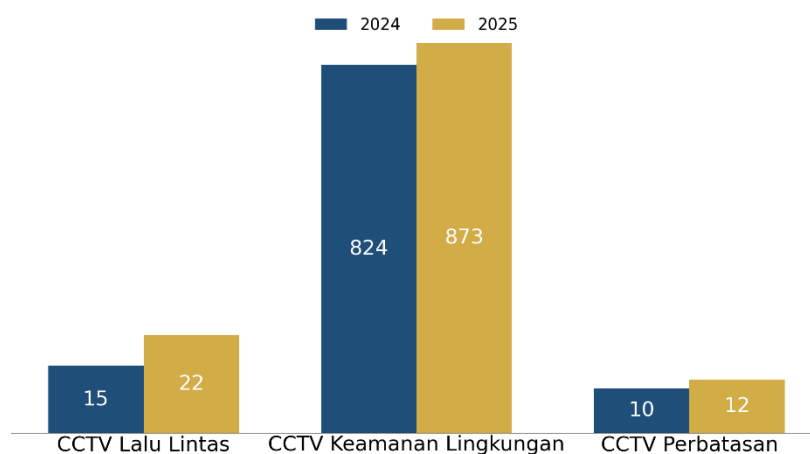
Infrastruktur jaringan yang terus diperkuat memungkinkan seluruh OPD di Kabupaten Gunungkidul terhubung dalam sistem internet/intranet, sehingga mendukung kelancaran kinerja perangkat daerah. Berdasarkan pembaruan data, terdapat sejumlah penguatan infrastruktur secara bertahap. sebagai berikut

1) Penguatan Jaringan dan Konektivitas Broadband



Dari grafik terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten mempunyai prioritas pada peningkatan kualitas layanan pemerintahan melalui penguatan konektivitas pada sektor pelayanan publik, khususnya fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan berbasis digital yang naik signifikan. Perluasan fiber optik menjadi upaya untuk mengurangi ketergantungan pada jaringan wireless serta meminimalisir dampak *blankspot*. Sementara itu, penyesuaian bandwidth internet per kecamatan merupakan bagian dari manajemen kapasitas jaringan agar distribusi layanan tetap optimal dan berkelanjutan secara anggaran

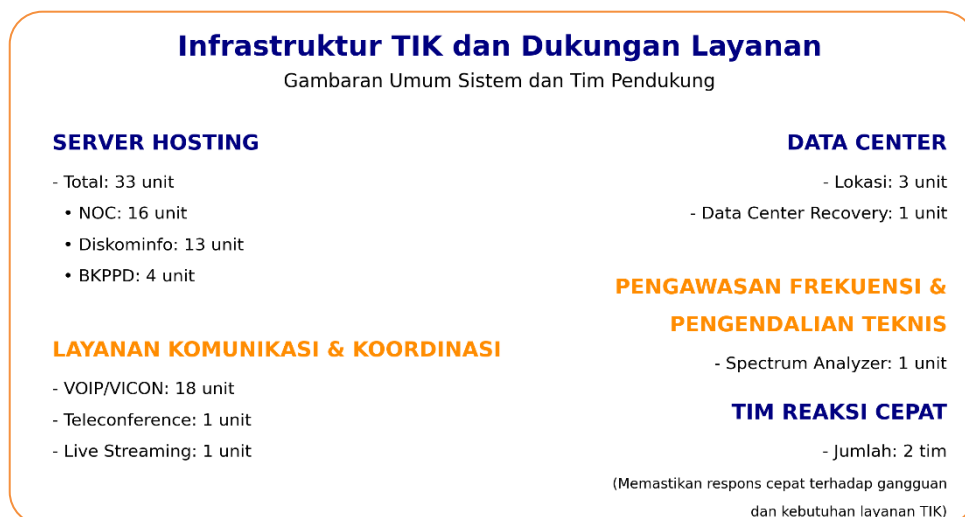
2) Penguatan Infrastruktur Pengawasan (CCTV)



Pembangunan CCTV dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan jaringan dan prioritas keamanan wilayah strategis.

3) Stabilitas Infrastruktur Inti dan Sistem Pendukung

Infrastruktur inti relatif stabil dan tidak mengalami perubahan jumlah dibanding kondisi tahun 2024. Kondisi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:



- b. Perangkat Daerah yang memiliki layanan Informasi yang dikelola secara aktif;

Dengan dukungan jaringan dan sistem yang terintegrasi, seluruh Perangkat Daerah mampu mengelola layanan informasi secara aktif meskipun berada dalam wilayah dengan tantangan geografis yang kompleks. Sistem informasi pemerintahan telah terstruktur dalam 6 kategori aplikasi, meliputi pelayanan publik, administrasi umum, legislasi, manajemen pembangunan, manajemen keuangan (e-planning hingga e-monitoring), serta manajemen kepegawaian.

- c. Layanan Keamanan Informatika;

Realisasi persentase layanan keamanan informasi tahun 2025 mencapai 100%, sama dengan capaian tahun 2024. Kinerja yang tetap optimal tersebut didukung oleh pelaksanaan Counter Surveillance (CS) atau sterilisasi ruangan pada seluruh lokasi yang menjadi objek pengamanan, serta pendampingan pemanfaatan tanda tangan elektronik kepada 47 OPD termasuk 18 Kapanewon, Perangkat Kalurahan, dan Puskesmas. Penerbitan sertifikat elektronik tetap berjalan seiring adanya mutasi dan promosi jabatan.

Adapun layanan keamanan informasi yang dilaksanakan meliputi sosialisasi keamanan informasi, IT Assessment (penetration test), counter surveillance, pendampingan pemanfaatan sertifikat elektronik, serta pengamanan dan kirim terima berita. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan sistem pengamanan informasi yang terjaga dan berkelanjutan dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

d. Penerapan metadata sesuai standar.

Capaian kinerja persentase penerapan metadata sesuai standar pada tahun 2025 mencapai 100%, sama dengan tahun sebelumnya. Capaian tersebut diperoleh dari seluruh Perangkat Daerah (47 PD) yang telah menerapkan metadata sesuai standar yang ditetapkan

Keberhasilan tersebut didukung oleh kebijakan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Gunungkidul, yang menjadi pedoman pengelolaan data pembangunan daerah. Penyelenggaraan Satu Data Daerah dilaksanakan sesuai prinsip standar data, penyediaan metadata, interoperabilitas, serta penggunaan kode referensi dan data induk, sehingga menjamin data yang akurat, mutakhir, lengkap, dan akuntabel.

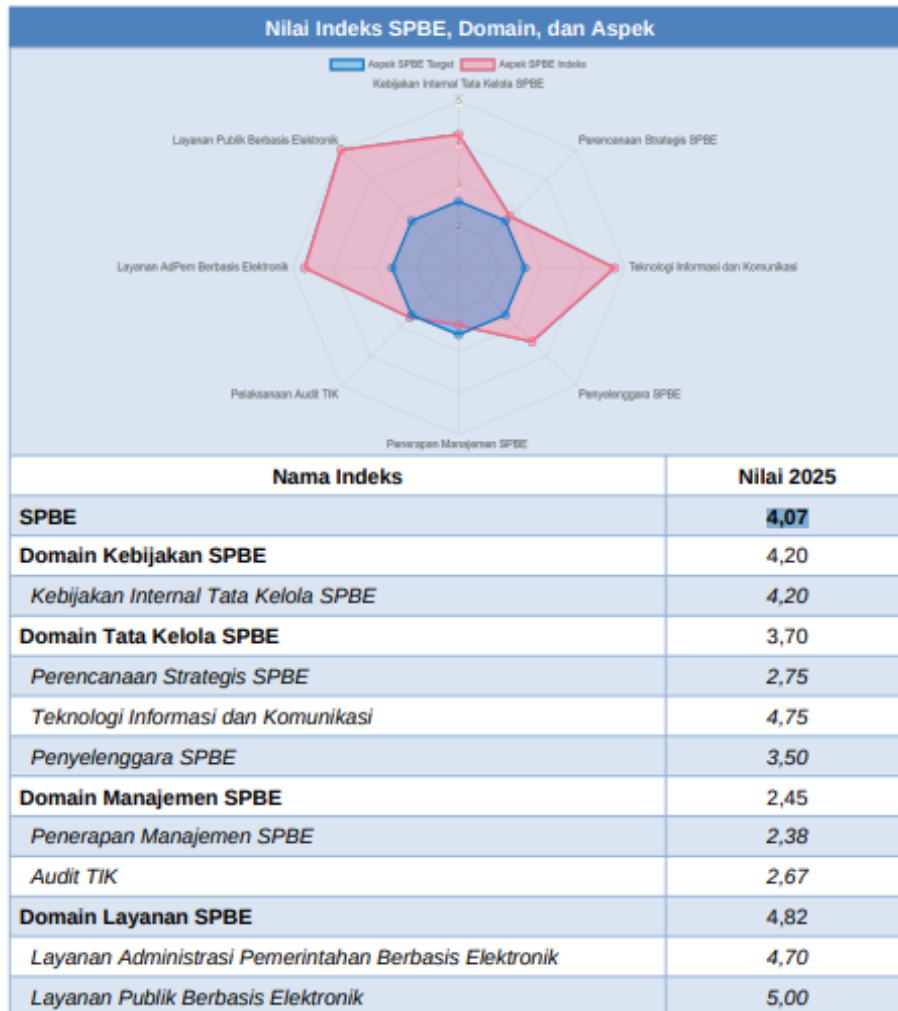
Upaya penguatan juga dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti DOPADU (Data Olahan Per Sektor Terpadu), Bimtek EPSS, Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI), serta forum Tim Berisik (Berbincang Asik Statistik). Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan tata kelola data yang semakin terstandar dan mendukung perencanaan serta pengambilan kebijakan berbasis data.

Penguatan keempat aspek tersebut berkontribusi langsung terhadap meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis digital di Kabupaten Gunungkidul. Integrasi jaringan yang semakin andal, pengelolaan aplikasi yang aktif di setiap perangkat daerah, sistem keamanan informasi yang terjaga, serta standardisasi metadata yang mendukung interoperabilitas data

menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ekosistem pemerintahan digital yang efektif dan terintegrasi.

Capaian kinerja meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis digital tergambar dengan keberhasilan Kabupaten Gunungkidul dalam implementasi *Smart City*. Implementasi *Smart City* yang dilaksanakan secara berkelanjutan sejak tahun 2019 tidak semata-mata hanya teknologi informatika, namun mencakup semua aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan dalam pemanfaatan teknologi informatika serta bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan publik. Keberhasilan ini dibuktikan dengan capaian tahun 2024, di mana Kabupaten Gunungkidul meraih peringkat ke-3 Nasional dalam Penyelenggaraan *Smart City* dan peringkat pertama di DIY dengan nilai 3,81, meningkat dari 3,66 pada tahun 2023. Pada tahun 2025 tidak dilaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) *Smart City*, namun capaian sebelumnya menunjukkan konsistensi dan komitmen pengembangan kota cerdas.

Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dan tata kelola digital juga tercermin pada capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang meningkat dari nilai 3,96 pada tahun 2024 menjadi 4,07 dengan kategori sangat baik pada tahun 2025. Keberhasilan tersebut ditopang oleh penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan serta pengembangan aplikasi, dan pemberdayaan informatika yang menjadi fondasi pelaksanaan e-Government dan implementasi *Smart City* di Kabupaten Gunungkidul.



Gambar 3.38
Capaian Indeks SPBE Tahun 2025

Dengan demikian, keberhasilan pada level Smart City dan SPBE tersebut merupakan hasil konkret dari penguatan infrastruktur jaringan, optimalisasi sistem informasi perangkat daerah, peningkatan keamanan informasi, serta penerapan tata kelola data yang terstandar dan berkelanjutan.



Gambar 3.39
Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Komunikasi dan Informatika

4. Ketersediaan dan Kualitas Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Selain didukung oleh pembangunan infrastruktur fisik dan penguatan infrastruktur digital, capaian Indeks Infrastruktur Pemerintah Kabupaten juga diperkuat oleh peningkatan kualitas layanan di bidang perhubungan. Aspek transportasi dan lalu lintas merupakan bagian integral dari infrastruktur publik yang berperan langsung dalam menjamin konektivitas, mobilitas masyarakat, serta kelancaran distribusi barang dan jasa.

Peningkatan penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) menjadi fokus strategis untuk mendukung kualitas infrastruktur daerah secara menyeluruh. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kontribusi sektor ini adalah persentase ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), yang mencerminkan sejauh mana sarana, prasarana, dan sistem pengelolaan transportasi tersedia dan berfungsi secara optimal.

Berdasarkan pengukuran pada tahun 2025, realisasi ketersediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) mencapai 66,96% dari target 63,53%, menghasilkan capaian 105,39%. Capaian ini bukan hanya sekadar pemenuhan target, tetapi juga menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan dibandingkan tahun 2024. Terdapat kenaikan realisasi sebesar 5,52% dari tahun 2024, yang sebelumnya hanya mencapai 61,44% dari target tahun tersebut. Secara keseluruhan, capaian tahun ini juga meningkat dari capaian tahun lalu sebesar 99,62% menjadi 105,39%.

Pencapaian ini didukung oleh kinerja kuat di berbagai bidang, antara lain:

- a. Pada bidang lalu lintas dilaksanakan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten dengan indikator hasil kegiatan persentase penurunan angka pelanggaran angkutan umum. Berdasarkan data tahun 2024 dan 2025, terjadi penurunan rata-rata jumlah pelanggaran dari 18,80% menjadi 15,44%. Penurunan sebesar 3,36 poin persentase tersebut menunjukkan adanya perbaikan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku.

Meskipun frekuensi operasi yustisi pada tahun 2025 lebih sedikit (9 kali) dibandingkan tahun 2024 (20 kali), efektivitas pelaksanaan operasi tetap terjaga. Jumlah pelanggaran yang tercatat turun dari 376 kasus menjadi 139 kasus, yang mengindikasikan bahwa upaya penegakan peraturan dan pembinaan yang dilakukan sebelumnya memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku masyarakat.

- b. Pada bidang pengelolaan angkutan dan terminal dilaksanakan kegiatan pengelolaan terminal, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang serta kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten.

Pengelolaan terminal menunjukkan kinerja sangat baik dengan capaian pendapatan retribusi sebesar 118,45% dari target. Meskipun masih terkendala dengan belum maksimalnya fasilitas pendukung, namun capaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2024, di mana realisasi pendapatan retribusi terminal sebesar 79% dari target. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengelolaan terminal, optimalisasi pemungutan retribusi, serta meningkatnya aktivitas pelayanan di terminal.

Sementara itu, ketersediaan layanan angkutan umum tercapai 58,54%, Meskipun belum mencapai tingkat ketersediaan secara penuh, keberadaan 30 trayek aktif tetap memberikan kontribusi terhadap konektivitas wilayah dan pelayanan transportasi masyarakat. Capaian sebesar 58,54% menunjukkan bahwa lebih dari separuh trayek yang direncanakan telah beroperasi aktif, namun masih terdapat trayek yang

belum berjalan optimal. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh faktor tingkat permintaan masyarakat, kelayakan operasional, serta dinamika perubahan pola mobilitas yang berdampak pada keberlangsungan trayek

Adapun tingkat ketaatan perizinan angkutan umum mencapai 48,52%. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan Tahun 2024, di mana tingkat ketaatan perizinan hanya sebesar 44,33%. Meskipun peningkatannya belum signifikan, tren tersebut mengindikasikan adanya perbaikan kepatuhan administrasi pelaku usaha angkutan umum. Namun demikian, tingkat kepatuhan pelaku usaha angkutan umum dalam memperpanjang izin trayek masih berada di bawah 50%, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan pengawasan dan pembinaan. Rendahnya tingkat perpanjangan izin dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi operasional usaha angkutan, perubahan pola permintaan layanan transportasi, maupun kesadaran administratif dari pemilik kendaraan.

Secara umum, kinerja bidang ini cukup baik, dengan pengelolaan pendapatan yang optimal, namun masih terdapat ruang perbaikan pada aspek ketersediaan layanan dan kepatuhan perizinan.

Langkah strategis yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan keselamatan transportasi adalah melalui penyediaan layanan bus sekolah. Pada Tahun 2025, jumlah total penumpang bus sekolah tercatat sebanyak 81.980 penumpang, meningkat signifikan dibandingkan Tahun 2024 yang berjumlah 50.852 penumpang. Peningkatan jumlah penumpang tersebut sejalan dengan penambahan jumlah trayek, dari 6 trayek pada tahun 2024 menjadi 7 trayek pada tahun 2025. Bus sekolah sebanyak 7 (tujuh) unit tersebut beroperasi dengan jalur:

- 1) Gedangsari – Wonosari (PP)
- 2) Wonosari – Semin (PP)
- 3) Semin – Wonosari (PP)
- 4) Ponjong – Wonosari (PP)
- 5) Wonosari – Tanjungsari (PP)
- 6) Semin – Wonosari (PP)
- 7) Nglipar – Wonosari (PP)

Penambahan jumlah trayek secara langsung memperluas jangkauan layanan transportasi sekolah, sehingga meningkatkan kemudahan akses bagi pelajar di berbagai wilayah. Ketujuh trayek tersebut melayani koridor utama dari wilayah kapanewon menuju pusat Kota Wonosari dan sebaliknya (pulang–pergi), yang berdampak pada semakin terbukanya akses pelajar dari wilayah pinggiran menuju pusat layanan pendidikan secara lebih aman dan terjangkau.

Kenaikan jumlah penumpang yang cukup signifikan menunjukkan bahwa layanan bus sekolah semakin diminati dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini mencerminkan efektivitas kebijakan penyediaan angkutan khusus pelajar dalam mendukung keselamatan, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh pelajar, serta meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik secara berkelanjutan.

- c. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang lain adalah di bidang PJU dan Perparkiran dengan kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten dan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. Capaian dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator hasil kegiatan persentase ketersediaan fasilitas dan perlengkapan jalan. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah fasilitas jalan yang terbangun dengan jumlah kebutuhan fasilitas jalan di Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2024, tingkat pemenuhan fasilitas dan perlengkapan jalan telah mencapai 48,73% dari total kebutuhan, dan pada tahun 2025, angka ini berhasil ditingkatkan signifikan menjadi 50,40%. Kenaikan sebesar 1,67% dalam setahun ini menunjukkan efektivitas program dan komitmen daerah dalam usaha menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan nyaman.

Tabel 3.44
Kebutuhan dan Pemenuhan Fasilitas dan Perlengkapan Jalan

Fasilitas Perlengkapan Jalan	2024	2025			
		Σ Terbangun	Σ Kebutuhan	Bobot	Capaian %
Terminal	3,50	1	4	14%	3,50
Halte	4,70	47	80	8%	4,70
Rambu-rambu lalu lintas	4,18	4.705	9.000	8%	4,18
Traffic light/APILL	6,22	8	18	14%	6,22
Warning lamp	3,92	50	100	8%	4,00
Guardrail	7,01	10.139	20.000	14%	7,10
Marka jalan	3,07	57.719	150.000	8%	3,08
Deliniator	2,98	2.976	6.000	6%	2,98
Cermin tikung	4,68	161	200	6%	4,83
PJU	8,44	23.078	32.910	14%	9,82
Jumlah	48,70	98.884	218.312		50,40



Gambar 3.40 Penyediaan Fasilitas Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Anak Sekolah SIBONA

Pada Tahun Anggaran 2025, kegiatan Fasilitas Parkir dengan indikator Persentase Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir menunjukkan capaian yang sangat baik. Indikator ini dihitung dengan membandingkan realisasi pendapatan retribusi parkir terhadap target yang telah ditetapkan.

Dari target sebesar Rp2.073.000.000, terealisasi sebesar Rp2.088.449.000,- sehingga capaian mencapai 100,75%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi parkir telah dilaksanakan secara optimal dan mampu melampaui target yang direncanakan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas masyarakat, optimalisasi pengawasan pemungutan retribusi, serta perbaikan sistem pengelolaan parkir. Secara keseluruhan, realisasi yang melampaui target ini memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencerminkan efektivitas pengelolaan layanan fasilitas parkir.

Kegiatan lain untuk mendukung penyediaan layanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah pengujian kendaraan bermotor, pemeliharaan alat uji kendaraan, dan pengadaan bukti lulus uji (kartu uji/*smartcard*, tanda uji). Persentase capaian penyelenggaraan LLAJ pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2025 sebesar 96,51%, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 95,00%. Pada tahun 2024, sebanyak 4.142 kendaraan melakukan uji, dan yang lulus uji sebanyak 3.935 kendaraan. Sementara itu, pada tahun 2025 dari 3.406 kendaraan yang melakukan uji, sebanyak 3.287 kendaraan lulus uji. Peningkatan persentase kelulusan ini menunjukkan adanya perbaikan tingkat kepatuhan dan kesiapan teknis kendaraan sebelum mengikuti uji berkala. Meskipun jumlah kendaraan yang diuji pada tahun 2025 lebih sedikit dibandingkan tahun 2024, persentase kelulusan justru meningkat. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas kesiapan kendaraan sebelum uji serta efektivitas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan.

Peningkatan tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan sosialisasi kepada awak kendaraan umum mengenai pentingnya pemenuhan standar teknis dan keselamatan, serta operasi yustisi yang dilaksanakan bersama kepolisian dan PPNS. Selain itu, partisipasi kendaraan luar kabupaten yang melakukan uji di Gunungkidul serta kendaraan dari luar daerah yang mutasi masuk ke Gunungkidul turut mendukung optimalisasi penyelenggaraan

pengujian kendaraan bermotor. Dengan demikian, berbagai upaya tersebut berkontribusi langsung terhadap meningkatnya persentase kendaraan yang lulus uji dan memenuhi persyaratan laik jalan.

Berdasarkan hasil analisis, capaian Indeks Infrastruktur Pemerintah Kabupaten didukung oleh tiga aspek utama, yaitu kualitas infrastruktur fisik, kualitas pelayanan komunikasi dan informatika, serta penyelenggaraan layanan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Ketiga aspek tersebut saling melengkapi dalam membentuk sistem infrastruktur daerah yang terintegrasi.

Aspek infrastruktur fisik berkontribusi melalui peningkatan kualitas jalan, irigasi, air minum, sanitasi, permukiman, dan sarana pendukung lainnya yang menjadi fondasi pelayanan dasar masyarakat. Aspek pelayanan komunikasi dan informatika mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan melalui penguatan jaringan komunikasi data, pengelolaan informasi yang aktif, keamanan informatika, serta penerapan metadata sesuai standar. Sementara itu, aspek perhubungan memperkuat konektivitas wilayah melalui pengelolaan terminal, penyediaan angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor, serta pengawasan perizinan angkutan.

Sinergi ketiga aspek tersebut menunjukkan bahwa peningkatan indeks infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik saja, tetapi juga oleh keandalan sistem digital dan efektivitas layanan transportasi. Dengan pendekatan yang terintegrasi, capaian indeks infrastruktur dapat terus ditingkatkan guna mendukung pelayanan publik yang lebih berkualitas, aman, dan berkelanjutan.

Tabel 3.45 Analisis Faktor Penghambat, Arah Perbaikan dan Hasil yang Diharapkan

Kategori Infrastruktur	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Upaya / Arah Perbaikan	Hasil yang Diharapkan
Infrastruktur Jalan dan Konektivitas Wilayah	Belum meratanya kondisi jalan kabupaten antar kapanewon dan	Dukungan program pembangunan daerah, adanya	Perbaikan jalan melalui musrenbang kapanewon	Meningkatnya konektivitas wilayah, kelancaran

Kategori Infrastruktur	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Upaya / Arah Perbaikan	Hasil yang Diharapkan
	kalurahan serta menuju pusat pertumbuhan ekonomi dan objek pariwisata; keterbatasan anggaran pembangunan.	forum perencanaan melalui musrenbang, serta peluang pendanaan dari pemerintah pusat dan DIY.	dengan alokasi PIWK dan PIS, serta pengusulan pendanaan melalui DAK, Dana Keistimewaan, dan Inpres Jalan Daerah.	mobilitas masyarakat dan distribusi barang/jasa, serta mendukung pengembangan ekonomi dan pariwisata daerah.
Manajemen Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur	Keterbatasan SDM teknis serta pelaksanaan pekerjaan yang melibatkan pihak ketiga sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan atau ketidaksesuaian kualitas pekerjaan.	Komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pembangunan serta adanya sistem evaluasi kinerja penyedia jasa konstruksi.	Penilaian kinerja rekanan, pelatihan kepada penyedia barang dan jasa, serta peningkatan komunikasi dan koordinasi antar pelaksana kegiatan.	Meningkatnya kualitas pekerjaan infrastruktur, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, serta akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.
Pendanaan Infrastruktur	Keterbatasan sumber daya keuangan daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur secara merata.	Adanya peluang sumber pendanaan dari pemerintah pusat, Dana Keistimewaan, serta potensi kerja sama dengan kementerian/lembaga maupun sektor swasta.	Optimalisasi anggaran yang tersedia serta pencarian alternatif pendanaan melalui DAK, Dana Keistimewaan, Inpres Jalan Daerah, dan kerja sama lintas sektor.	Peningkatan kapasitas pembiayaan pembangunan sehingga program pembangunan infrastruktur dapat terlaksana lebih optimal.
Transportasi dan	Menurunnya minat masyarakat menggunakan	Dukungan regulasi transportasi	Meningkatkan sinergitas lintas sektor,	Meningkatnya ketertiban lalu lintas,

Kategori Infrastruktur	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Upaya / Arah Perbaikan	Hasil yang Diharapkan
Keselamatan Lalu Lintas	transportasi umum, deviasi rute angkutan pedesaan, serta rendahnya kepatuhan terhadap perizinan kendaraan angkutan umum.	serta koordinasi lintas instansi dalam pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan.	pelaksanaan operasi yustisi, pembinaan kepada pengusaha angkutan umum, serta penyediaan prasarana dan fasilitas jalan untuk meningkatkan keselamatan.	keselamatan pengguna jalan, serta kualitas pelayanan transportasi di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
Infrastruktur Transportasi (Terminal dan Pengujian Kendaraan)	Kondisi sarana prasarana terminal belum memadai serta menurunnya minat masyarakat terhadap layanan pengujian kendaraan bermotor.	Adanya sistem layanan digital serta dukungan kebijakan peningkatan standar pelayanan transportasi.	Rehabilitasi dan pembangunan fasilitas terminal sesuai standar pelayanan minimal serta optimalisasi layanan pengujian kendaraan bermotor melalui sistem pendaftaran online (e-KIR) dan kemudahan sistem pembayaran.	Meningkatnya kualitas layanan transportasi serta efisiensi pelayanan pengujian kendaraan bermotor bagi masyarakat.
Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Masih terdapat area blankspot serta rendahnya literasi digital masyarakat sehingga pemanfaatan	Dukungan program pengembangan TIK dan keberadaan komunitas informasi masyarakat.	Pengembangan infrastruktur jaringan komunikasi, peningkatan literasi digital melalui berbagai media	Meningkatnya akses informasi dan pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat serta

Kategori Infrastruktur	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Upaya / Arah Perbaikan	Hasil yang Diharapkan
	teknologi informasi belum optimal.		serta pemberdayaan komunitas seperti KIM, Forum Humas, dan Forum Influencer.	mendukung pelayanan publik berbasis elektronik.
Tata Kelola Informasi Publik dan Layanan Pengaduan	Kapasitas pengelola PPID/PLID dalam penyediaan dokumentasi informasi publik masih terbatas serta layanan SP4N LAPOR belum dimanfaatkan secara optimal.	Adanya regulasi keterbukaan informasi publik serta sistem pengelolaan pengaduan nasional yang telah tersedia.	Optimalisasi koordinasi dan peningkatan kapasitas PPID/PLID serta peningkatan sosialisasi pemanfaatan layanan SP4N LAPOR kepada masyarakat.	Meningkatnya transparansi informasi publik serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi dan pengaduan pelayanan publik.
Mitigasi Risiko Infrastruktur	Infrastruktur rentan terhadap dampak bencana alam seperti banjir atau kerusakan lingkungan yang dapat mempengaruhi keberlanjutan fungsi infrastruktur.	Dukungan kelembagaan penanggulangan bencana serta koordinasi lintas perangkat daerah.	Koordinasi dengan BPBD dalam rangka mitigasi dan penanganan dampak bencana pada infrastruktur daerah.	Meningkatnya ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana serta keberlanjutan pelayanan infrastruktur bagi masyarakat.

Secara umum, permasalahan pada aspek infrastruktur di Kabupaten Gunungkidul masih berkaitan dengan pemerataan konektivitas wilayah, keterbatasan sumber pembiayaan pembangunan, serta tantangan dalam pengelolaan transportasi dan infrastruktur teknologi informasi. Selain itu, pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang melibatkan pihak ketiga juga memerlukan penguatan pengawasan dan peningkatan kapasitas penyedia jasa konstruksi agar kualitas pekerjaan dapat terjaga.

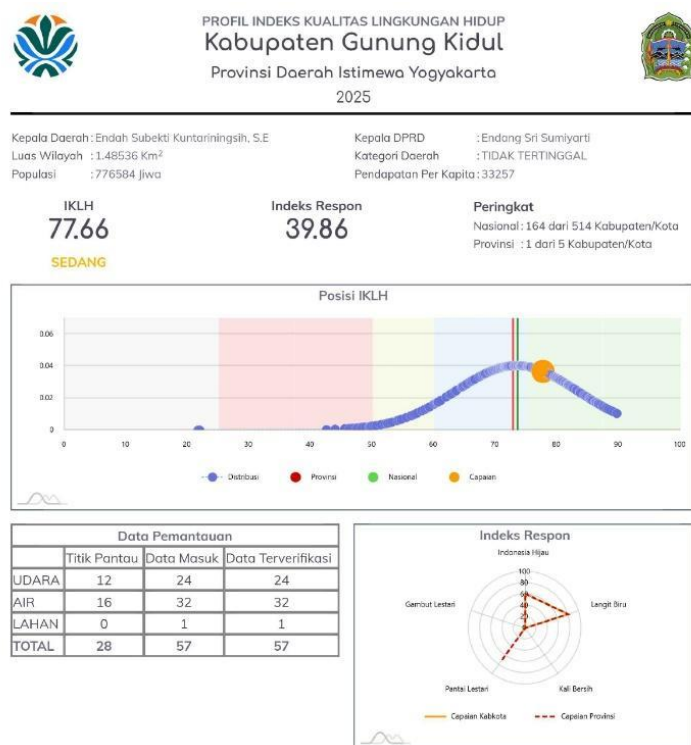
Namun demikian, terdapat beberapa faktor pendorong yang mendukung peningkatan kinerja pembangunan infrastruktur, antara lain adanya dukungan kebijakan pembangunan daerah, peluang pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah DIY, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Melalui berbagai upaya perbaikan yang dilakukan, diharapkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gunungkidul dapat berjalan lebih optimal, meningkatkan konektivitas wilayah, mendukung aktivitas perekonomian, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Selain Indeks Infrastruktur Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator kinerja utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang berwawasan lingkungan. IKLH merupakan indeks komposit yang disusun berdasarkan pengukuran

kualitas media lingkungan, yang meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Nilai IKLH mencerminkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada periode tertentu.

Pada tahun 2025, nilai IKLH Kabupaten Gunungkidul mencapai 77,66 dengan klasifikasi sedang. Dengan target yang ditetapkan sebesar 72,38, maka capaian kinerja mencapai 107,29%, sehingga termasuk dalam kategori sangat



tinggi. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup berada di atas target yang direncanakan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 72,38, terjadi peningkatan sebesar 5,28 poin. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan pada satu atau lebih komponen penyusun IKLH, baik pada kualitas air, udara, lahan, maupun air laut. Secara substantif, capaian tersebut mencerminkan efektivitas pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, serta upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dilaksanakan secara berkelanjutan..

Perbandingan realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2025, serta target dan capaian kinerja terhadap tahun akhir RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.46 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul 2022-2025 dan Capaian 2025 terhadap Target Tahun Akhir RPJMD 2021-2026

Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026 (Akhir RPJMD)	Capaian 2025 terhadap 2026 (%)
66,83	68,32	72,38	77,66	71,00	109,38

Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 tercatat sebesar 77,66, sedangkan target akhir RPJMD tahun 2026 ditetapkan sebesar 71,00. Dengan demikian, capaian terhadap target akhir RPJMD telah mencapai 109,38%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa nilai IKLH tahun 2025 telah melampaui target yang direncanakan pada akhir periode RPJMD dengan selisih sebesar 6,66 poin di atas target akhir. Posisi ini menggambarkan bahwa kinerja pengelolaan kualitas lingkungan hidup sudah berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

Nilai tersebut menjadi dasar dalam melihat dinamika perkembangan kualitas lingkungan hidup daerah, sekaligus memberikan gambaran posisi capaian tahun berjalan terhadap arah kebijakan pembangunan lingkungan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Capaian IKLH dalam 7 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Gambar 3.41
Capaian IKLH Tahun 2018-2025



Benchmarking IKLH Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024–2025

Nilai IKLH Kabupaten Gunungkidul tahun 2024 sebesar 74,26 (kategori sedang) dengan Indeks Respon 26,24. Pada tingkat nasional, Gunungkidul berada pada peringkat 167 dari 514 kabupaten/kota, serta menempati peringkat 1 dari 5 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

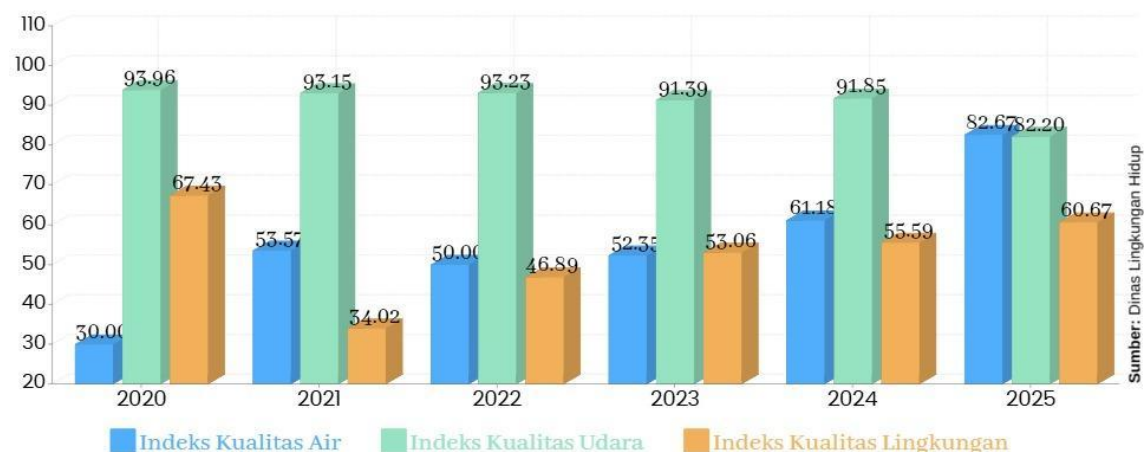
Pada tahun 2025, nilai IKLH meningkat menjadi 77,66 (kategori sedang) dengan Indeks Respon naik signifikan menjadi 59,26. Peringkat nasional juga membaik menjadi 166 dari 514 kabupaten/kota, dan tetap mempertahankan peringkat 1 di tingkat provinsi.

Perbaikan nilai IKLH yang diikuti dengan kenaikan peringkat nasional menunjukkan adanya peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup dibandingkan tahun sebelumnya. Konsistensi mempertahankan peringkat pertama di tingkat provinsi juga mengindikasikan bahwa kinerja pengendalian dan

pengelolaan lingkungan hidup relatif lebih baik dibandingkan kabupaten/kota lain di DIY.

Capaian dari 3 Indeks pembentuk IKLH adalah sebagai berikut:

Gambar 3.42
Capaian IKA, IKU dan IKL Tahun 2020-2025



Berdasarkan hasil perhitungan tahun 2025, nilai IKLH Kabupaten Gunungkidul sebesar 77,66 tersusun dari capaian masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Target IKA sebesar 75,43 dengan realisasi 82,67. Dengan demikian, capaian mencapai sekitar 109,60% dari target. Nilai ini menunjukkan bahwa parameter kualitas air berada di atas standar yang direncanakan. Secara teknis, hal ini mengindikasikan kondisi mutu air permukaan yang relatif terkendali berdasarkan parameter uji yang digunakan dalam penilaian.

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Target IKU sebesar 72,11 dan terealisasi 82,20, sehingga capaian sekitar 114,00%. Capaian ini menunjukkan bahwa konsentrasi parameter kualitas udara ambien berada dalam rentang yang lebih baik dibandingkan target. Secara umum, nilai tersebut mencerminkan kondisi pencemaran udara

yang relatif rendah berdasarkan parameter pemantauan seperti partikulat dan gas pencemar lainnya.

Kualitas udara di Kabupaten Gunungkidul dipengaruhi oleh kombinasi faktor klimatologis dan karakteristik wilayah. Berdasarkan data klimatologi, total curah hujan tahunan mencapai 2.497 mm dengan 147 hari hujan atau rata-rata 12,25 hari hujan per bulan. Intensitas hujan tertinggi terjadi pada awal dan akhir tahun, yaitu Januari sebesar 379 mm (21 hari hujan), Maret 459 mm (19 hari hujan), dan November 404 mm (18 hari hujan). Sebaliknya, pada periode kemarau terjadi penurunan signifikan, terutama Juli yang hanya mencatat 1 mm dengan 1 hari hujan, serta Agustus 22 mm dan September 42 mm. (Sumber data : BPS, Kabupaten Gunungkidul dalam Angka 2026).

Tingginya curah hujan pada awal dan akhir tahun berperan sebagai mekanisme *wet deposition* atau pencucian alami atmosfer, yang membantu menurunkan konsentrasi partikulat debu dan polutan gas. Dengan frekuensi hujan yang relatif tinggi, partikel tersuspensi lebih cepat terikat dan mengendap, sehingga kualitas udara cenderung lebih baik pada periode tersebut.

Selain faktor klimatologis, karakteristik wilayah Kabupaten Gunungkidul yang didominasi kawasan non-industri dan kepadatan lalu lintas relatif rendah menjadi faktor pendukung utama kualitas udara yang baik. Minimnya aktivitas industri berat serta belum tingginya konsentrasi kendaraan bermotor membatasi sumber emisi utama pencemar udara.

Secara keseluruhan, faktor pendukung utama IKU di Kabupaten Gunungkidul adalah tingginya curah hujan tahunan, distribusi hari hujan yang cukup, serta karakteristik wilayah yang minim sumber emisi besar. Sementara itu, periode kemarau, pembakaran terbuka, serta potensi peningkatan aktivitas transportasi menjadi faktor risiko yang perlu dikelola secara preventif.

3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Target IKL sebesar 60,90 dengan realisasi 60,67 atau sekitar 99,62% dari target. Nilai ini menunjukkan bahwa capaian kualitas lahan relatif sesuai dengan target, meskipun belum melampaui secara signifikan. Secara teknis,

komponen ini dipengaruhi oleh tutupan lahan, tingkat degradasi, serta perubahan penggunaan lahan yang terjadi dalam periode penilaian.

Dari ketiga komponen tersebut, terlihat bahwa kontribusi terbesar terhadap kenaikan IKLH tahun 2025 berasal dari peningkatan nilai IKA dan IKU yang melampaui target, sementara IKL berada pada posisi relatif stabil mendekati target. Capaian ini menunjukkan distribusi kontribusi antar-media lingkungan dalam membentuk nilai komposit IKLH sebesar 77,66 dengan klasifikasi sedang.

Dalam mendukung pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menempatkan penguatan tata kelola lingkungan hidup sebagai bagian penting dalam arah kebijakan pembangunan berkelanjutan. Kinerja penguatan tata kelola tersebut diukur melalui indikator Nilai Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup. Pada tahun 2025, target Nilai Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup ditetapkan sebesar 95,27, dengan realisasi sebesar 89,22, sehingga capaian kinerja mencapai 93,65% dan termasuk dalam kategori Sangat Tinggi.

Penguatan tata kelola tersebut didukung melalui pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan persampahan, peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat, pemberian penghargaan lingkungan hidup bagi masyarakat, serta pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati). Rangkaian upaya tersebut menjadi instrumen dalam menjaga kualitas media lingkungan sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya tata kelola lingkungan hidup antara lain:

a. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Persentase pengendalian pencemaran tahun 2025 tercatat sebesar 100%, yang dihitung dari perbandingan antara jumlah potensi pencemar yang dilakukan upaya pencegahan/pengendalian sebanyak 81 sumber dibandingkan dengan total potensi pencemar terdata sebanyak 81 sumber.

Dengan demikian, seluruh sumber potensi pencemar yang teridentifikasi telah berada dalam cakupan pengendalian.

Sumber potensi pencemar di Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh sektor pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, klinik, laboratorium), diikuti oleh sektor peternakan/pembibitan ayam ras, industri pengolahan kulit dan kimia, perhotelan, pertambangan/penggalian, serta industri dan jasa lainnya. Karakteristik ini menunjukkan bahwa potensi pencemaran di daerah tidak hanya berasal dari industri manufaktur, tetapi juga dari kegiatan layanan publik dan usaha skala menengah.

Cakupan pengendalian dilakukan melalui berbagai kegiatan teknis, antara lain:

- a. Sampling udara menggunakan *metode passive sampler*, untuk memantau konsentrasi parameter kualitas udara ambien.
- b. Sampling air limbah, sebagai bentuk pengawasan terhadap pembuangan limbah dari kegiatan usaha dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- c. Sampling air sungai dan air laut, untuk mengukur kualitas badan air penerima dan memastikan tidak terjadi penurunan mutu yang melampaui baku mutu.
- d. Uji emisi kendaraan bermotor, guna mengendalikan sumber pencemar bergerak.
- e. Kegiatan Jumat Bersih, sebagai bentuk pengendalian berbasis partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Dengan cakupan 100% terhadap seluruh sumber potensi pencemar terdaftar, pengendalian telah dilakukan secara menyeluruh terhadap objek yang teridentifikasi. Persentase 100% dalam indikator ini menggambarkan cakupan pengendalian terhadap jumlah sumber terdata, sehingga untuk melihat efektivitas pengendalian dapat dilihat dari hasil pemantauan kualitas media lingkungan yang tercermin dalam komponen IKLH.

b. Pengelolaan sampah

Pengelolaan persampahan ini merupakan salah satu komponen penting dalam menjaga kualitas lingkungan hidup, khususnya pada aspek kualitas lahan dan air, yang selanjutnya berkontribusi dalam pembentukan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan Data Neraca Sampah SIPSN Semester I Tahun 2025, jumlah timbulan sampah tercatat sebesar 144.124,84 ton/tahun, meningkat 7,30% dibandingkan tahun 2024. Peningkatan ini tidak hanya berkaitan dengan faktor demografis, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi, meningkatnya aktivitas sosial ekonomi, sektor pariwisata, perdagangan, jasa, serta pertumbuhan UMKM yang berkontribusi terhadap bertambahnya sampah kemasan dan produk sekali pakai.

Dari sisi pengurangan sampah, terjadi penurunan signifikan. Jumlah pengurangan sampah tahun 2025 sebesar 33,06 ton, turun 68,92% dibandingkan tahun 2024. Penurunan terbesar terjadi pada kegiatan pemanfaatan kembali sampah yang berkurang hingga 98,15%. Sementara itu, kegiatan pendauran ulang mulai tercatat sebesar 31,09 ton pada tahun 2025, setelah pada tahun sebelumnya belum tercatat, meskipun belum mampu mengimbangi penurunan pada komponen lainnya.

Pada aspek penanganan, persentase sampah terkelola tahun 2025 tercatat sebesar 27,24%, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 (39,29%) dan masih di bawah target tahun berjalan. Jumlah sampah tidak terkelola meningkat menjadi 72,76% dari total timbulan. Namun demikian, data tahun 2025 masih bersifat sementara karena baru mencakup Semester I.

Upaya pengelolaan tetap dilaksanakan melalui pengurangan sampah di TPA Wukirsari Baleharjo, pengangkutan sampah, serta gerakan kebersihan pasca event sebagai bagian dari sistem penanganan dan pengendalian timbulan sampah di daerah.

c. Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat

Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 229,63%, diperoleh dari 124 lembaga/kelompok yang menjalankan kegiatan dibandingkan 54 kelompok yang mendapat sosialisasi. Capaian di atas 100% ini mengindikasikan bahwa dampak kegiatan tidak hanya terbatas pada peserta sosialisasi, tetapi juga mendorong tumbuhnya inisiatif dan partisipasi kelompok lain secara mandiri.

Sepanjang tahun 2025, kegiatan dilaksanakan secara masif melalui sosialisasi dan pembinaan pembentukan Bank Sampah, Satgas Siaga Sampah, JPSM, pengelolaan sampah organik metode ember tumpuk, Proklamasi, pembinaan ekowisata, hingga pengembangan Taman Kehati serta penguatan sekolah Adiwiyata. Intensitas kegiatan yang tinggi dan menjangkau berbagai wilayah menjadi faktor pendorong meningkatnya jumlah kelompok yang aktif menjalankan program lingkungan.

Dari sisi implementasi, tercatat 108 Bank Sampah aktif serta 16 sekolah berstatus Adiwiyata berbagai tingkatan. Hal ini menunjukkan berkembangnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan hidup secara lebih terstruktur dan berbasis komunitas.

f. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kinerja pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati) diukur melalui indikator Persentase RTH Publik dalam Kondisi Baik pada tahun 2025 tercapai sebesar 99,95%. Nilai tersebut diperoleh dari luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dalam kondisi baik sebesar 75.226,39 Ha dibandingkan total luas RTH publik 75.266,65 Ha. Capaian ini menunjukkan bahwa hampir seluruh RTH publik berada dalam kondisi terpelihara dan berfungsi secara optimal.

Komposisi RTH Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh hutan rakyat (59.491,44 Ha) dan hutan negara (13.792,44 Ha), disusul sempadan sungai (1.109,92 Ha) dan taman hutan rakyat (670,33 Ha). Komposisi ini menggambarkan bahwa fungsi ekologis wilayah masih sangat kuat, terutama dalam mendukung daya dukung lingkungan, konservasi tanah dan air, serta perlindungan keanekaragaman hayati.

Upaya pengelolaan yang dilakukan meliputi monitoring dan evaluasi pembangunan serta pemeliharaan RTH (seperti alun-alun dan sumur resapan), pemangkasan pohon, pemasangan fasilitas pendukung, pembinaan taman kehati, serta pemberian bibit tanaman buah kepada masyarakat. Kegiatan ini menunjukkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada luasan, tetapi juga pada kualitas dan keberlanjutan fungsi ekologis.

Gambar 3.43
Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Sampah



Sampling udara dengan metode *Passive Sampler*, sampling limbah, air sungai, air laut, dan uji emisi kendaraan bermotor

Tabel 3.47 Analisis Faktor Capaian dan Upaya Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Aspek	Faktor Pendukung	Hambatan	Upaya / Arah Perbaikan	Hasil yang Diharapkan
Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat mulai meningkat serta adanya partisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah dan kegiatan lingkungan	Partisipasi masyarakat dan kelembagaan lingkungan (bank sampah, sekolah adiwiyata) masih fluktuatif	Pendampingan dan penguatan kelembagaan komunitas peduli lingkungan, jejaring pengelolaan sampah mandiri, serta peningkatan edukasi perubahan perilaku	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan pengurangan timbulan sampah dari sumber
Kolaborasi pemangku kepentingan	Terjalinnnya kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha dalam pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan	Koordinasi lintas sektor belum sepenuhnya optimal dan keterlibatan pemangku kepentingan masih perlu diperkuat	Penguatan koordinasi lintas sektor (pentahelix) dengan akademisi, praktisi, masyarakat, dunia usaha, dan media	Terwujudnya sinergi pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan
Dukungan kebijakan dan pendanaan	Tersedianya dukungan anggaran dari APBD dan Dana Keistimewaan serta sarana prasarana operasional	Keterbatasan armada dan peralatan pengelolaan sampah, baik dari sisi jumlah maupun modernisasi	Perencanaan pengelolaan persampahan yang lebih komprehensif serta peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah	Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan dan efektivitas pengelolaan sampah

Aspek	Faktor Pendukung	Hambatan	Upaya / Arah Perbaikan	Hasil yang Diharapkan
Pengendalian pencemaran dan kepatuhan usaha	Komitmen pengendalian pencemaran dan penanganan pengaduan lingkungan berjalan optimal dengan seluruh pengaduan tertangani	Ketaatan pelaku usaha belum merata serta keterbatasan pengawasan akibat keterbatasan SDM dan anggaran	Penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha, termasuk kewajiban pelaporan periodik dan evaluasi pengelolaan lingkungan	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan lingkungan dan menurunnya potensi pencemaran
Perencanaan dan tata kelola lingkungan	Dokumen perencanaan lingkungan hidup telah tersusun secara lengkap sehingga arah kebijakan pengelolaan lingkungan lebih terstruktur	Pemanfaatan data lingkungan seperti neraca sampah belum sepenuhnya optimal sepanjang tahun	Penguatan sistem monitoring dan evaluasi serta optimalisasi pemanfaatan data lingkungan sebagai dasar perencanaan	Tersedianya data lingkungan yang lebih akurat dan mendukung pengambilan kebijakan
Tekanan terhadap kualitas lingkungan	Tersedianya fasilitas pengolahan sampah TPST Wukirsari yang mendukung pengurangan timbulan sampah melalui pengolahan dan pemanfaatan kembali.	Tingginya timbulan sampah, belum optimalnya penerapan prinsip 3R, serta alih fungsi lahan dan dampak perubahan iklim	Penyusunan rencana aksi pengurangan timbulan sampah dan peningkatan 3R berbasis wilayah serta penguatan upaya konservasi lahan	Berkurangnya tekanan terhadap kualitas lingkungan dan meningkatnya nilai komponen IKLH

Keberhasilan capaian sasaran Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan dilaksanakan melalui Program Pembangunan Infrastruktur dengan alokasi anggaran sebesar Rp107.511.438.985,00 dan realisasi sebesar Rp104.845.418.749,00, sehingga mencapai tingkat penyerapan anggaran sebesar 97,52%. Dari pelaksanaan program tersebut terdapat selisih anggaran sebesar Rp2.666.020.236,00 dengan tingkat efisiensi sebesar 2,48%, yang menunjukkan pengelolaan anggaran berjalan efektif dan optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.

Tabel 3.48 Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan

Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
Program Pembangunan Infrastruktur	107.511.438.985	104.845.418.749	97,52	2.666.020.236	2,48

Secara keseluruhan, tingkat penyerapan anggaran yang tinggi dengan selisih yang relatif kecil menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pada Program Pembangunan Infrastruktur telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan program ini memberikan kontribusi penting dalam mendukung pembangunan kawasan secara terintegrasi dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang memadai guna menunjang aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah.

Sasaran 7 : Nilai Investasi Meningkatkan

Sasaran strategis “Nilai Investasi Meningkatkan” merupakan instrumen penting dalam mendukung pencapaian Misi 2 RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021–2026, yaitu **“Meningkatkan pembangunan manusia dan keunggulan potensi daerah.”** Sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing melalui peningkatan investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Investasi memiliki peran fundamental dalam memperluas kapasitas produksi, menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat struktur ekonomi lokal. Oleh karena itu, peningkatan nilai investasi tidak hanya dipandang sebagai pertumbuhan angka saja, tetapi juga sebagai indikator meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim investasi daerah serta efektivitas kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah.

Capaian sasaran ini diukur melalui satu indikator kinerja utama, yaitu Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB mencerminkan besarnya nilai penambahan aset tetap dalam suatu periode tertentu, seperti pembangunan gedung, infrastruktur, mesin, dan peralatan produksi, yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas ekonomi daerah. Dengan demikian, perkembangan angka PMTB menjadi tolok ukur penting dalam menilai dinamika investasi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Melalui indikator PMTB, analisis kinerja akan difokuskan pada tren pertumbuhan investasi, kontribusinya terhadap perekonomian daerah, serta keterkaitannya dengan kebijakan dan program yang telah dilaksanakan dalam rangka mendorong iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja untuk tahun 2025, sasaran ini menunjukkan capaian yang signifikan. Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 tercatat mencapai Rp4.421.970.000.000,- (Empat Triliun Empat Ratus Dua Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah). Data capaian PMTB ini dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui laporan "Kabupaten Gunungkidul dalam Angka 2026" yang dirilis pada tanggal 27 Februari 2026. Rincian pengukuran capaian sasaran strategis terkait Nilai Investasi yang Meningkat pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

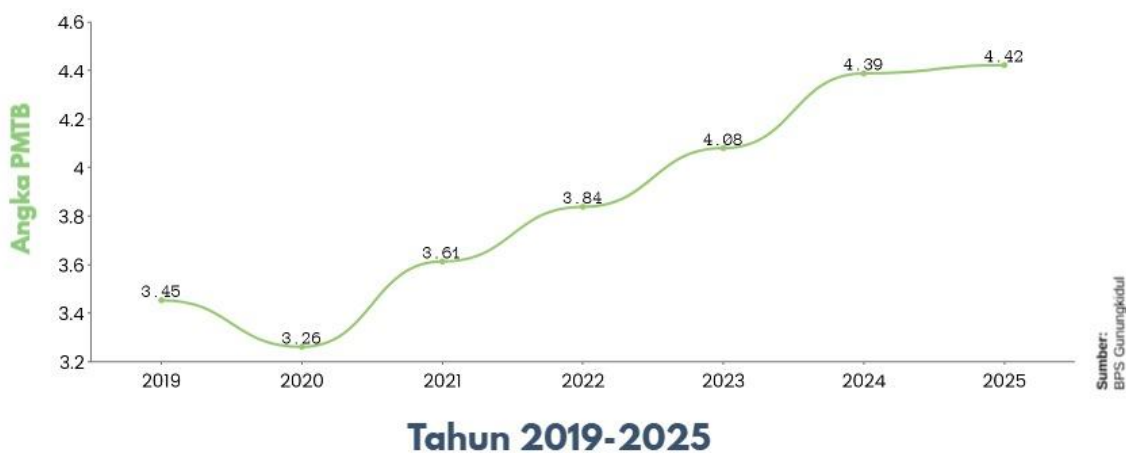
Tabel 3.49
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kategori	Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (juta rupiah)	4.387.740	4.421.970	100,78	Sangat Tinggi	4.300.000	102,84

Sumber : BPS Gunungkidul, *Gunungkidul Dalam Angka 2026*)

Berdasarkan hasil evaluasi data di atas terlihat bahwa realisasi Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar Rp4.421.970.000,00 pada tahun 2025, selain melampaui target sebagaimana ditetapkan di Perjanjian Kinerja 2025, juga telah melampaui target akhir RPJMD pada tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp4.300.000.000.000,- Dengan demikian, capaian tahun 2025 telah mencapai 102,84% dari target akhir RPJMD. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja investasi daerah berkembang lebih cepat dari proyeksi perencanaan jangka menengah, sekaligus mencerminkan efektivitas kebijakan dalam mendorong pertumbuhan investasi dan pembentukan barang modal sebagai fondasi penguatan ekonomi daerah.

Capaian PMTB Kabupaten Gunungkidul dalam 6 tahun terakhir adalah sebagai berikut:



Gambar 3.44 Capaian Pembentukan Modal Tetap Bruto Tahun 2019-2025

Kabupaten Gunungkidul menunjukkan komitmen kuat dalam peningkatan investasi, yang tercermin dari capaian Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 dengan angka Rp3,26 triliun, investasi telah bangkit dan menunjukkan tren pemulihan yang berkelanjutan.

Sejak tahun 2021, PMTB terus meningkat dari Rp3,61 triliun, berlanjut ke Rp3,84 triliun pada tahun 2022, dan mencapai Rp4,08 triliun pada tahun 2023. Tren positif ini semakin menguat pada tahun 2024, di mana PMTB menyentuh angka Rp4,39 triliun, menandai kenaikan signifikan sebesar 7,55% dibandingkan tahun sebelumnya.

Melanjutkan momentum tersebut, pada tahun 2025, Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Gunungkidul mencapai Rp4,42 triliun. Angka ini tidak hanya menegaskan keberlanjutan tren peningkatan investasi dalam tiga tahun terakhir, tetapi juga menunjukkan bahwa capaian investasi daerah semakin menguat secara signifikan. Bahkan jika dibandingkan dengan kondisi pra-pandemi tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp3,45 triliun, capaian PMTB pada tahun 2025 telah melampaui sebesar Rp970 miliar,

menguatkan pertumbuhan investasi yang solid dan iklim ekonomi yang kondusif di Kabupaten Gunungkidul.

Peningkatan PMTB ini mengindikasikan adanya perbaikan iklim investasi serta meningkatnya aktivitas pembentukan barang modal di daerah, baik dalam bentuk konstruksi, mesin dan peralatan, kendaraan, maupun komponen investasi lainnya. Tren ini memperlihatkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan investasi mulai menunjukkan hasil yang positif dan berkelanjutan.

Meningkatnya angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Gunungkidul tidak terlepas dari meningkatnya investasi yang masuk di wilayah Gunungkidul dari tahun ke tahun. PMTB dan perubahan persediaan terbentuk akibat dari adanya kegiatan investasi. Kabupaten Gunungkidul memiliki daya tarik yang cukup kuat bagi investor, karena memiliki berbagai macam potensi yang masih terbuka luas misalnya sektor pariwisata baik alam maupun buatan, sektor industri, pertanian dan kelautan sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Pertumbuhan investasi Kabupaten Gunungkidul beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Realisasi nilai investasi dari tahun 2017– 2025, diterangkan dalam grafik berikut:



Gambar 3.45 Realisasi Nilai Investasi dari Tahun 2017-2025

Berdasarkan data realisasi investasi, tren capaian menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Pada Tahun 2025, realisasi investasi tercatat sebesar Rp851.746.764.728,-, meningkat sebesar Rp26.093.179.006,- atau sekitar 3,16% dibandingkan Tahun 2024 yang mencapai Rp825.653.585.722,-. Kenaikan ini mencerminkan terjaganya kepercayaan pelaku usaha serta efektivitas kebijakan dan fasilitasi investasi yang telah dilaksanakan.

Sejalan dengan peningkatan tersebut, pada Tahun 2025 jumlah permohonan perizinan dan nonperizinan yang masuk tercatat sebanyak 9.712 permohonan, dengan jumlah izin/sertifikat yang berhasil diterbitkan sebanyak 9.647 dokumen, sehingga tingkat penyelesaian layanan mencapai 99,33%. Capaian ini menunjukkan tingginya efektivitas dan responsivitas pelayanan, serta memberikan kepastian proses bagi pelaku usaha. Kinerja pelayanan perizinan yang optimal menjadi salah satu faktor pendukung meningkatnya realisasi investasi, karena mempercepat proses legalitas usaha dan mendorong percepatan realisasi kegiatan investasi di daerah.

Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan target tersebut antara lain adalah :

1. Fasilitasi dan kemudahan dalam mengurus perizinan

Dalam rangka memberikan kemudahan dan kepastian layanan bagi investor, informasi perizinan disediakan secara terbuka meliputi persyaratan, prosedur, biaya, jangka waktu, dan mekanisme pengaduan melalui media elektronik maupun non-elektronik.

Selain itu, dilakukan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi Sistem Pelayanan Online (SIMPEL) untuk menyempurnakan proses permohonan berbasis daring agar lebih cepat, transparan, dan terintegrasi..

Pada Tahun 2025 dilaksanakan inovasi Perizinan Mobile, yaitu penyediaan layanan perizinan di beberapa titik lokasi di luar pelayanan reguler Mal Pelayanan Publik. Inovasi ini merupakan upaya mendekatkan layanan kepada masyarakat serta memperluas akses terhadap pelayanan perizinan. Perizinan Mobile diharapkan menjadi terobosan dalam meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan pemerataan layanan perizinan di daerah.

2. Optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gunungkidul

Pada tahun 2025, terdapat 18 gerai layanan terdiri dari layanan PD dan Instansi Vertikal lainnya sebanyak 92 jenis pelayanan yang dapat diakses di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gunungkidul. Jumlah layanan yang diberikan sepanjang tahun 2025 adalah sebanyak 39.211 dari keseluruhan pelayanan yang tersedia di MPP.

3. Penyediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan perizinan dan non perizinan
4. Inovasi dan terobosan untuk menarik investasi masuk ke Gunungkidul:
 - a. Kegiatan Temu Bisnis

Penyelenggaraan promosi penanaman modal dengan inovasi pelaksanaan Temu Bisnis tahun 2025 yang mengusung tema "Peran



Gambar 3.46
Pelayanan Perizinan Mobile dan MPP

Investasi dalam Mendorong Ekonomi Gunungkidul yang Berkelanjutan: Investasi Tumbuh, Ekonomi Maju.” Kegiatan Temu Bisnis 2025 merupakan salah satu strategi dalam mendukung pencapaian sasaran peningkatan realisasi investasi daerah. Kegiatan ini dirancang sebagai platform kolaboratif yang mempertemukan unsur pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi bisnis, serta lembaga perbankan dalam satu forum dialog dan promosi investasi. Pendekatan ini sejalan dengan upaya penguatan ekosistem investasi melalui perluasan jejaring, peningkatan kepercayaan investor, dan penyediaan informasi investasi.

Peserta yang hadir meliputi berbagai kalangan dunia usaha dan asosiasi seperti HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia), PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), PPJI (Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia), HPI (Himpunan Pramuwisata Indonesia), dan GKTC (Gunungkidul Tourism Community). Selain itu, sejumlah lembaga perbankan juga turut ambil bagian.

Melalui penyajian proyek investasi siap tawar (Investment Project Ready to Offer/IPRO), pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan promotor investasi. Hal ini menunjukkan pergeseran pendekatan dari administratif menjadi proaktif dan *market-oriented*. Dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan secara langsung, kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas komunikasi bisnis, percepatan peninjauan kerja sama, serta potensi konversi minat investasi menjadi realisasi investasi.



Gambar 3.47 Temu Bisnis Tahun 2025

b. Pembuatan Kajian Peta Potensi Investasi

Kajian Peta Potensi Investasi merupakan kajian potensi investasi yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Gunungkidul dan dilaksanakan secara kontinu dengan mengkaji wilayah yang berbeda di Kabupaten Gunungkidul setiap tahunnya. Pada tahun 2025 ini, disusun dokumen Kajian Peta Potensi Investasi di Kawasan Selatan Gunungkidul dengan potensi investasi Agrowisata Pantai Baron, Agribisnis Cold Storage serta Rest Area dan Akomodasi Kelok 23.

Gambar 3.48
Kajian Peta Potensi Investasi Kabupaten Gunungkidul



c. Promosi Investasi

Dalam rangka meningkatkan Promosi Investasi Kabupaten Gunungkidul, pada tahun 2025 juga diterbitkan Buku Profil Investasi Kabupaten Gunungkidul yang memuat gambaran umum potensi investasi di Kabupaten Gunungkidul. Buku tersebut dapat dijadikan panduan atau rujukan bagi calon investor yang sedang melirik potensi apa yang dapat dikembangkan di Kabupaten Gunungkidul, baik dari sektor pariwisata, pertanian, kelautan, peternakan dan lain-lain.



Gambar 3.49 Buku Profil Investasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

d. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis OSS (*Online Single Submission*)

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi *Online Single Submission* (OSS) kepada pelaku usaha dilakukan dalam rangka untuk memasyarakatkan perizinan online berbasis risiko serta memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha untuk dapat mengurus perizinan usahanya (memperoleh legalitas usahanya).

e. Pengawasan Pelaku Usaha

Pengawasan kegiatan Pengawasan Penanaman Modal kepada pelaku usaha di wilayah Kabupaten Gunungkidul dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memastikan kegiatan usaha dari para pelaku usaha sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini melibatkan Perangkat Daerah lain seperti DPUPRKP, Dinas Lingkungan Hidup, DPTR, Dinas Kesehatan serta Dinas teknis lain sesuai ketugasan

Capaian kinerja pada aspek pelayanan penanaman modal dan realisasi investasi menunjukkan adanya peningkatan efektivitas fasilitasi perizinan serta pertumbuhan kegiatan berusaha di daerah. Namun demikian, peningkatan investasi tidak hanya ditentukan oleh kelancaran proses perizinan, melainkan juga oleh faktor pendukung lainnya.

Kepastian administrasi pertanahan dan tertib penyelenggaraan penataan ruang merupakan prasyarat penting dalam menjamin kelancaran realisasi investasi. Kepastian atas status lahan serta kesesuaian pemanfaatan ruang memberikan landasan hukum dan teknis bagi pelaksanaan pembangunan fisik kegiatan usaha. Oleh karena itu, berikut disajikan capaian kinerja pada urusan pertanahan dan penataan ruang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam mendukung peningkatan investasi daerah.

Pada Tahun 2025, kinerja penyelenggaraan penataan ruang yang diukur melalui indikator Persentase Penyelesaian Administrasi Penyelenggaraan Penataan Ruang mencapai 83,56%. Capaian kinerja ini didukung oleh penyelesaian berbagai output prioritas, antara lain:

1. Pada aspek regulasi dan perencanaan, telah disusun 1 Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Koridor Wonosari–Gading, sehingga total Peraturan Bupati terkait RTBL menjadi 8 dokumen. Selain itu, terselesaikan 5 dokumen kelengkapan Persetujuan Substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dari target 7 kawasan, dengan 2 RDTR telah ditetapkan dan terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS). Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga ditindaklanjuti melalui penyelesaian audit bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta pemenuhan data Lahan Baku Sawah (LBS) yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

2. Pada aspek pengendalian dan pelayanan, dilaksanakan 14 kali sosialisasi tata ruang dan pemasangan papan informasi. Penguatan kapasitas geospasial dilakukan melalui sosialisasi Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) dan bimbingan teknis bersama Badan Informasi Geospasial (BIG). Sepanjang tahun 2025 diterbitkan 955 dokumen pelayanan tata ruang, meliputi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Keterangan Rencana Kota (KRK), dan Keterangan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKR), serta diselesaikan 3 dokumen pengawasan tata ruang, termasuk evaluasi kesesuaian kegiatan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar proses administrasi penataan ruang telah diselesaikan sesuai ketentuan, sehingga memberikan kepastian pemanfaatan ruang bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Kepastian ini menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran kegiatan pembangunan dan investasi, karena meminimalkan potensi hambatan akibat ketidaksesuaian tata ruang.

Sementara itu, kinerja sasaran tata kelola administrasi pertanahan meningkat indikator Persentase Tata Kelola Administrasi Pertanahan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam tiga tahun terakhir, yaitu sebesar 41,49% pada 2023, meningkat menjadi 61,51% pada 2024, dan kembali meningkat signifikan menjadi 79,44% pada 2025. Peningkatan bertahap tersebut mencerminkan adanya perbaikan sistem administrasi, penguatan pengendalian dokumen pertanahan, serta peningkatan kapasitas pengelolaan data dan layanan pertanahan. Capaian kinerja Tata Kelola Administrasi Pertanahan tahun 2025 mencapai 79,44%, didukung oleh penyelesaian berbagai output prioritas, antara lain:

1. Pada aspek penyelesaian permasalahan tanah, telah disusun 90 Berita Acara tukar menukar tanah. Dari total 876 kasus yang terinventarisasi, 228 kasus (26,03%) telah terselesaikan. Selain itu, terbit 39 Izin Gubernur, termasuk penyelesaian 17 bidang tanah pada tahun berjalan, serta pengadaan tanah untuk TPR Pantai Tepus.

2. Dalam rangka pencegahan korupsi melalui MCP KPK, dilakukan pra ukur 600 bidang, penyelesaian 420 berkas (411 terdaftar di BPN dan terbit SPS), serta penerbitan 49 sertifikat. Diselesaikan pula 1 dokumen pembayaran pisungsum kepada Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan 1 dokumen inventarisasi alih fungsi tanah kalurahan.
3. Pada percepatan sertifikasi tanah desa dan Kasultanan, terselesaikan 694 berkas pendaftaran tanah desa murni (HM Kasultanan), pemasangan 6.000 patok batas, 394 pengukuran bidang, dan 5.000 verifikasi berkas. Dari total 10.882 bidang tanah kalurahan, 4.865 bidang (44,71%) telah bersertifikat. Sementara tanah Kasultanan sebanyak 4.046 bidang, 3.749 bidang (92,66%) telah bersertifikat, dan sisanya masih berproses di BPN.
4. Selain itu, disusun 50 dokumen pengawasan pemanfaatan tanah kalurahan dan Sultan Ground (SG), serta 30 dokumen bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah Kasultanan dan Kadipaten sebagai dasar penerbitan Izin Gubernur atau Serat Kekancingan.

Tren peningkatan tata kelola pertanahan dan capaian penataan ruang yang relatif tinggi pada tahun 2025 menunjukkan semakin kuatnya dasar legalitas dan administratif dalam pemanfaatan lahan. Kondisi ini memberikan kepastian hukum dan kepastian lokasi bagi pelaksanaan kegiatan investasi, sehingga berkontribusi secara tidak langsung terhadap peningkatan realisasi investasi dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) daerah.

Selain kepastian administrasi pertanahan dan kesesuaian pemanfaatan ruang, peningkatan investasi daerah juga didukung aspek lain yang tidak kalah penting dalam mendukung investasi daerah yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penataan ruang yang tertib perlu diimbangi dengan pengendalian dampak lingkungan agar kegiatan usaha dapat berjalan secara berkelanjutan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, capaian kinerja pada urusan lingkungan hidup turut berkontribusi dalam menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam mendukung peningkatan investasi daerah yang berkelanjutan, selain pada aspek pelayanan perizinan serta kepastian tata ruang, penguatan juga dilaksanakan dalam menjaga kepatuhan dan tata kelola lingkungan usaha. Capaian kepatuhan pelaku usaha sebesar 73,61% atau 125,72% dari target menunjukkan adanya perbaikan tata kelola lingkungan dan meningkatnya kepastian regulasi bagi dunia usaha. Realisasi ini bahkan telah melampaui target akhir Renstra Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2026 sebesar 65%, dengan tingkat capaian terhadap target akhir sebesar 113,25%. Pada sisi perencanaan lingkungan hidup tersusun 6 dokumen perencanaan, serta dalam penanganan pengaduan lingkungan juga mencapai kinerja 100% yaitu dari 7 aduan semuanya aduan tersebut bisa tertangani. Kinerja yang solid ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan, pengawasan, dan penanganan risiko lingkungan telah berjalan secara efektif.

Pencapaian pada aspek pengawasan penanaman modal, penataan ruang, administrasi pertanahan, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan kepastian usaha dan mendukung realisasi investasi di Kabupaten Gunungkidul, karena keempatnya memberikan jaminan kepatuhan regulasi, kepastian kesesuaian lokasi, kepastian hukum atas status lahan, serta keberlanjutan kegiatan usaha sesuai ketentuan lingkungan hidup.

Untuk melihat sejauh mana dukungan sumber daya terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pada aspek-aspek dimaksud, berikut disajikan gambaran realisasi anggaran tahun berjalan sebagai instrumen pendukung pencapaian kinerja Sasaran Nilai Invesasi Meningkatkan. Upaya mencapai keberhasilan capaian sasaran nilai investasi meningkat melalui program peningkatan investasi dengan anggaran sebesar Rp11.888.507.400,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp10.335.283.348,00 yang dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 3.50
Realisasi Anggaran Sasaran Nilai Investasi Meningkat

Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
Program peningkatan investasi	11.888.507.400	10.335.283.348	86,94	1.553.224.052	13,06

Data diolah dari aplikasi SIPANDA

Berdasarkan tabel tersebut, Program Peningkatan Investasi yang dialokasikan anggaran sebesar Rp11.888.507.400,00 terealisasi sebesar Rp10.335.283.348,00 atau 86,94% dari total pagu anggaran. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan efektif dalam mendukung peningkatan nilai investasi, sekaligus mencerminkan efisiensi anggaran sebesar 13,06% tanpa mengurangi substansi dan kualitas pelaksanaan kegiatan. Efisiensi tersebut mengindikasikan optimalisasi penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian sasaran peningkatan investasi.

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Keterbatasan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung geologi (Kawasan Bentang Alam Karst/KBAK).

Sejumlah lokasi strategis yang selama ini menjadi daya tarik investor, khususnya pada sektor pariwisata sebagai sektor unggulan Kabupaten Gunungkidul, berada dalam kawasan lindung geologi atau Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK). Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kawasan KBAK tidak diperkenankan dilakukan perubahan bentang alam, serta setiap kegiatan usaha di dalamnya wajib dilengkapi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ketentuan ini berdampak pada meningkatnya kompleksitas persyaratan dan proses perizinan, sehingga memerlukan penyesuaian perencanaan investasi dari sisi investor.

2. Penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 158/SK-HK/02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD), Kabupaten Gunungkidul ditetapkan memiliki luas LSD sebesar 31.560 hektare atau sekitar 43% dari total luas LSD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagian kawasan yang diminati calon investor berada dalam area LSD, sehingga alih fungsi lahan menjadi terbatas dan harus memperoleh rekomendasi dari Kementerian ATR/BPN. Kondisi ini membatasi fleksibilitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan investasi tertentu.

3. Belum optimalnya dukungan sarana prasarana dan infrastruktur penunjang investasi.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan publik belum berjalan secara maksimal, termasuk optimalisasi fungsi Mal Pelayanan Publik yang masih menghadapi kendala keterbatasan alokasi anggaran.
5. Masih terdapat pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam mengakses dan memanfaatkan sistem Online Single Submission (OSS)
6. Masih banyaknya permasalahan tanah:

a. Dinamika regulasi dan keterlambatan penyusunan RTRW

Penyelesaian RTRW Kabupaten Gunungkidul belum optimal akibat perubahan regulasi penataan ruang yang dinamis, termasuk penetapan target persentase Lahan Baku Sawah (LBS) sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta perlunya penyesuaian substansi RTRW dengan kebijakan pemerintah pusat.

b. Lemahnya pengendalian dan penegakan pemanfaatan ruang

Masih terdapat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang, dipengaruhi oleh belum sinkronnya peraturan zonasi dengan sistem perizinan berusaha (OSS) serta belum tersedianya PPNS Tata Ruang sehingga penegakan hukum belum optimal.

c. Keterbatasan kapasitas kelembagaan dan pemahaman publik

Jumlah dan kompetensi SDM penataan ruang masih terbatas, disertai rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan dan informasi pemanfaatan ruang.

- d. Dalam penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengelolaan aset daerah, masih terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan penanganan secara sistematis dan berkelanjutan, antara lain:
- 1) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa yang belum sepenuhnya tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Proses tukar-menukar tanah Kasultanan, Kadipaten, dan tanah desa yang relatif lama akibat kompleksitas mekanisme dan prosedur perizinan.
 - 3) Terbatasnya pemahaman perangkat desa dan masyarakat terhadap kebijakan serta administrasi pertanahan.
 - 4) Belum optimalnya pensertipikatan aset tanah Pemerintah Kabupaten karena belum sinkronnya data aset serta keterbatasan waktu dan sumber daya pelaksanaan.

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Untuk mengatasi keterbatasan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung serta dinamika regulasi pertanahan, diperlukan strategi yang komprehensif dan adaptif:
 - a. Kajian wilayah dan sektor potensial yang berbeda dan variatif melalui penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahunnya sehingga peluang investasi tidak terpaku pada kawasan lindung geologi, tetapi diarahkan pada lokasi dan sektor yang sesuai dengan ketentuan tata ruang dan peraturan perundang-undangan.
Peta Potensi Investasi tersebut menjadi panduan bagi calon investor dalam mengidentifikasi peluang usaha yang legal dan berkelanjutan, baik pada sektor pariwisata, pertanian, kelautan, peternakan, maupun sektor potensial lainnya.
 - b. Perlu disusun kajian komprehensif mengenai pemanfaatan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) untuk mengidentifikasi secara detail zona yang masih dapat dimanfaatkan dengan persyaratan tertentu serta zona

yang harus dilindungi secara ketat berdasarkan pertimbangan ekologis dan regulasi yang berlaku.

Melalui dua pendekatan tersebut, promosi investasi tetap dapat berjalan secara optimal, memberikan kepastian hukum bagi investor, serta tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan secara berkelanjutan.

2. Meningkatkan dukungan sarana prasarana dan infrastruktur penunjang investasi melalui penguatan fasilitas layanan, penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai, serta penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor dan lintas Perangkat Daerah agar tercipta ekosistem investasi yang terintegrasi, responsif, dan berdaya saing
3. Mendorong inovasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan publik secara berkelanjutan, termasuk optimalisasi fungsi Mal Pelayanan Publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas SDM guna mewujudkan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.;
4. Menyediakan layanan bantuan (helpdesk) yang komprehensif dan mudah diakses, baik secara daring maupun luring, untuk mendampingi pelaku usaha dalam penggunaan sistem *Online Single Submission* (OSS), disertai sosialisasi dan pendampingan teknis secara berkala guna meningkatkan literasi dan kemandirian pelaku usaha dalam pengurusan perizinan..
5. Dengan banyaknya permasalahan di bidang pertanahan, perlu adanya langkah partisipatif dan antisipatif dari Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan:

- a. Percepatan dan adaptasi penyelesaian RTRW

Melakukan percepatan penyusunan RTRW melalui penguatan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, sinkronisasi substansi RTRW secara adaptif terhadap perubahan regulasi, serta penyusunan roadmap yang jelas dan terukur.

- b. Penguatan pengendalian dan penegakan pemanfaatan ruang

Mendorong sinkronisasi peraturan zonasi dengan sistem OSS, memperkuat pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang yang tidak

sesuai, serta meningkatkan kapasitas aparaturnya pengawas tata ruang guna mendukung efektivitas pengendalian.

c. Penguatan kapasitas kelembagaan dan literasi publik

Meningkatkan kompetensi dan jumlah SDM penataan ruang, mengembangkan sistem informasi tata ruang yang mudah diakses, serta melaksanakan sosialisasi dan edukasi pemanfaatan ruang secara berkelanjutan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

d. Langkah-langkah strategis yang terintegrasi dan berkelanjutan mengatasi permasalahan penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengelolaan aset tanah pemerintah daerah:

- 1) Meningkatkan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan tanah desa serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah kalurahan dan OPD terkait agar pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Mempercepat proses tukar-menukar tanah melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah DIY dan instansi terkait, pendampingan administrasi yang sistematis, serta penyusunan dan penerapan SOP guna meminimalkan keterlambatan perizinan.
- 3) Meningkatkan pemahaman perangkat desa dan masyarakat melalui sosialisasi, penyuluhan tertib administrasi pertanahan, serta penyediaan media informasi yang mudah diakses dan dipahami.
- 4) Mengoptimalkan pensertipikatan aset tanah Pemerintah Kabupaten melalui sinkronisasi dan validasi data aset, penyusunan basis data terintegrasi berbasis bidang dan luasan, serta penetapan prioritas dan penyesuaian target kinerja sesuai kapasitas pelaksanaan.

C. Akuntabilitas Keuangan

1. Realisasi Anggaran

Secara umum, kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam memenuhi target masing-masing sasaran tercapai berkat dukungan pengalokasian anggaran yang memadai. Dukungan pagu anggaran untuk 3 Tujuan dan 7 Sasaran Strategis pada tahun 2025 sebesar Rp1.029.816.665.678. Pada akhir tahun 2025, anggaran yang berhasil terserap sebesar Rp979.292.277.437 dengan persentase serapan anggaran sebesar 95,09%.

2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Prinsip efisiensi merupakan salah satu dari 3 (tiga) prinsip pengelolaan keuangan sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yaitu prinsip 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis). Dalam peraturan tersebut, pengertian efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau dengan penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah dilakukan melalui berbagai program yang disertai dengan sejumlah masukan, salah satunya adalah penggunaan anggaran.

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis dengan persentase realisasi anggaran dalam tiap Tujuan dan Sasaran tersebut. Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis mencapai $\geq 100\%$ (lebih besar dari atau sama dengan seratus persen), dan persentase realisasi anggaran $<$ (lebih kecil dari) persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis.
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis $<$ (kurang dari) 100%, dan persentase realisasi anggaran $>$ (lebih besar dari) persentase rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran.

Hasil analisis rata-rata capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis dan realisasi anggaran, disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.51
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya per Sasaran/Indikator Kinerja

No	Tujuan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Rata-rata Capaian Kinerja	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Efisiensi
I	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	100,07		573.582.617.638	543.398.003.062	94,74	5,26
1.	Kapasitas tata kelola pemerintah meningkat	Opini BPK	97,04	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	561.942.183.518	532.250.945.927	94,72	5,28
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)						
2.	Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban	100,00	Program Peningkatan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	7.652.979.574	7.458.013.254	97,45	2,55
		Indeks Ketahanan Daerah	101,25	Program Penanggulangan Bencana	3.987.454.546	3.690.043.881	92,54	7,46
II	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	IPM Tahun 2026	97,51		287.605.011.682	272.591.816.967	94,78	5,22
3.	Derajat kualitas SDM meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	100,81	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	282.158.206.432	267.264.375.497	94,72	5,28
4.	Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin menurun	Angka Pengangguran	95,12	Program Pengurangan Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja	1.291.025.000	1.273.719.982	98,66	1,34
		Persentase Angka Kemiskinan	105,67	Program Penanggulangan Kemiskinan	4.155.780.250	4.053.721.488	97,54	2,46
III	Terwujudnya pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi	PDRB Perkapita	107,97		168.629.036.358	163.301.457.408	96,84	3,16
5.	Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat	Pertumbuhan ekonomi	101,29	Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan	49.229.089.973	48.120.755.311	97,75	2,25
		Indeks gini						

No	Tujuan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Rata-rata Capaian Kinerja	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Efisiensi
6.	Pembangunan kawasan terintegrasi dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Daerah	103,15	Program Pembangunan Infrastruktur	107.511.438.985	104.845.418.749	97,52	2,48
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)						
7.	Nilai Investasi Meningkat	Angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (dalam juta)	100,78	Program Peningkatan Investasi	11.888.507.400	10.335.283.348	86,94	13,06
Rata-rata capaian Kinerja			100,81		1.029.816.665.678	979.292.277.437	95,09	4,91

Secara keseluruhan, realisasi anggaran program mencapai 95,09% dari total pagu anggaran sebesar Rp1.029.816.665.678, dengan tingkat efisiensi sebesar 4,91%. Realisasi tertinggi terdapat pada program yang mendukung tujuan sumber daya manusia yang berkualitas sebesar 98,66% sedangkan realisasi terendah terdapat pada program peningkatan investasi dengan capaian 86,94%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar program telah dilaksanakan secara optimal.

BAB IV

Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kepada publik atas capaian kinerja tahun 2025 yang diukur melalui indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 15 (lima belas) indikator kinerja yang terdiri dari 3 (tiga) indikator tujuan dan 12 (dua belas) indikator sasaran strategis, diperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 100,81% sehingga termasuk dalam kategori Sangat Tinggi sesuai dengan skala penilaian kinerja.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya mencapai target kinerja dan memerlukan perhatian untuk perbaikan ke depan. Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) belum mencapai target terutama dipengaruhi oleh belum optimalnya integrasi lintas perangkat daerah dalam perencanaan dan pengukuran kinerja serta kualitas analisis pelaporan kinerja yang masih bervariasi dan belum sepenuhnya berbasis data serta berorientasi pada outcome.

Pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada level tujuan, capaian belum mencapai target karena pengukurannya menggunakan target IPM Tahun 2026, sehingga realisasi tahun 2025 masih merupakan tahapan menuju pencapaian target akhir periode RPJMD. Meskipun demikian, perkembangan IPM Kabupaten Gunungkidul menunjukkan tren peningkatan yang positif yang didukung oleh perbaikan pada aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

Capaian Angka Pengangguran dipengaruhi oleh keterbatasan ketersediaan lapangan kerja yang belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah pencari kerja serta kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang masih perlu ditingkatkan. Selain itu,

integrasi informasi pasar kerja dan pemutakhiran data ketenagakerjaan juga masih perlu diperkuat guna meningkatkan efektivitas penempatan tenaga kerja.

Capaian Indeks Gini dipengaruhi oleh masih adanya kesenjangan produktivitas antar sektor ekonomi serta keterbatasan nilai tambah pada beberapa sektor usaha masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan ekonomi kreatif serta perluasan akses pasar dan pemanfaatan teknologi.

Sementara itu, capaian Indeks Infrastruktur Daerah dipengaruhi oleh belum meratanya kondisi infrastruktur antar wilayah serta keterbatasan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Selain itu, tantangan dalam pengelolaan pembangunan dan peningkatan kualitas sarana prasarana juga menjadi faktor yang mempengaruhi optimalisasi pembangunan infrastruktur secara menyeluruh.

Selain capaian indikator kinerja, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan juga didukung oleh pengelolaan anggaran yang cukup baik. Dukungan pagu anggaran untuk mendukung pencapaian 3 (tiga) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran strategis pada tahun 2025 sebesar Rp1.034.743.424.996, dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.008.983.515.028 atau 97,51% dari total anggaran yang dialokasikan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Beberapa indikator yang belum mencapai target menjadi bahan evaluasi penting untuk memperkuat kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang. Melalui peningkatan sinergi antar perangkat daerah, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya pembangunan, diharapkan capaian kinerja pemerintah daerah dapat terus meningkat dan memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat sekaligus sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan di masa yang akan datang.